

**PEMAHAMAN PRAKTISI BMT DI LAMPUNG TERHADAP
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK)
NO.106 TAHUN 2007 AKUNTANSI *MUSYARAKAH***



Oleh:
Ika Trisnawati Alawiyah
NIM : 07913149

T E S I S
Diajukan kepada Program Pascasarjana
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Dalam
Ilmu Ekonomi Islam

YOGYAKARTA
2009

**PEMAHAMAN PRAKTISI BMT DI LAMPUNG TERHADAP
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK)
NO.106 TAHUN 2007 AKUNTANSI *MUSYARAKAH***



Oleh:

**Ika Trisnawati Alawiyah
NIM : 07913149**

Pembimbing:

Dr. H. Muhammad, M.Ag

T E S I S

**Diajukan kepada Program Pascasarjana
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Dalam
Ilmu Ekonomi Islam**

**YOGYAKARTA
2009**



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 661/PS-MSI/Peng./I/2010

TESIS berjudul : **PEMAHAMAN PRAKTISI BMT DI LAMPUNG
TERHADAP PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN (PSAK) NO.106 TAHUN 2007 AKUNTANSI
MUSYARAKAH**

Ditulis oleh : Ika Trisnawati Alawiyah

N. I. M. : 07913149

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu
Ekonomi Islam

Yogyakarta, 14 Januari 2010
Ketua Program

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Ika Trisnawati Alawiyah
Tempat/tgl.lahir : Tanggul Angin, 07 Maret 1986
N. I. M. : 07913149
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **PEMAHAMAN PRAKTISI BMT DI LAMPUNG TERHADAP
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK)
NO.106 TAHUN 2007 AKUNTANSI MUSYARAKAH**

Ketua/Sekretaris: Drs. H. Asmuni, MA

()

Pembimbing : Dr. H. Muhammad, M.Ag.

()

Penguji : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

()

Penguji : Drs. YUSDANI, M.Ag.

()



Diuji di Yogyakarta pada tanggal 7 Januari 2010

Pukul : 09.30–10.30 WIB

Hasil / Nilai : **88,00 / A**

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII


Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 814/PS-MSI/ND/I/2010

TESIS berjudul : **PEMAHAMAN PRAKTISI BMT DI LAMPUNG
TERHADAP PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN (PSAK) NO.106 AKUNTANSI MUSYARAKAH**

Ditulis oleh : Ika Trisnawati Alawiyah

NIM : 07913149

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program
Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 4 Januari 2010
Ketua Program,

**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIs.



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PERSETUJUAN

TESIS berjudul : **Pemahaman Praktisi BMT Di Lampung Terhadap
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.
106 Akuntansi Musyarakah**

Ditulis oleh : Ika Trisnawati Alawiyah, S.El

N. I. M. : 07913149

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat disetujui untuk diuji dihadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 23/12 . 2009

Pembimbing

DR. Muhammad, M.Ag

MOTTO

“Kesederhanaan, Kepercayaan, Kesabaran, dan Semangat”



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRAK

PEMAHAMAN PRAKTIKI BMT DI LAMPUNG TERHADAP PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO. 106 TAHUN 2007 AKUNTANSI MUSYARAKAH

**Oleh : Ika Trisnawati Alawiyah
NPM. 07913149**

Kemunculan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) sebagai salah satu diantara berbagai macam lembaga keuangan syariah (Islam) mengalami perkembangan signifikan di Indonesia. Sebagai lembaga keuangan, BMT tidak terlepas dari sistem akuntansi keuangan yang digunakan. Walaupun begitu, ada perbedaan mendasar tentang sistem akuntansi yang digunakan antara lembaga keuangan konvensional (non-syariah) dengan lembaga keuangan syariah. Perbedaan tersebut terletak pada prinsip operasi dalam konsep pembagian keuntungan atau kerugian yang bebas bunga sebagaimana yang selama ini digunakan lembaga keuangan konvensional, sebagai solusi maka pemerintah mengeluarkan pedoman sistem akuntansi bagi lembaga keuangan Syariah, yang lebih dikenal dengan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK) khususnya PSAK No. 106, tentang akuntansi musyarakah. Tentu saja pemahaman praktisi lembaga keuangan syariah (BMT) tentang PSAK ini berbeda antara daerah satu dengan daerah lain.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan: 1]. Bagaimana pemahaman praktisi BMT di Lampung terhadap PSAK No.106 Akuntansi Musyarakah?, 2]. Apakah ada perbedaan pemahaman praktisi BMT di Lampung tentang PSAK No.106 Akuntansi Musyarakah jika dilihat dari usia, latar belakang pendidikan, lama bekerja di BMT dan frekuensi mengikuti pelatihan? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sekaligus menganalisis tentang hubungan usia, latar belakang pendidikan, lama bekerja di BMT dan frekuensi mengikuti pelatihan terhadap pemahaman praktisi BMT di Lampung tentang PSAK No. 106 Akuntansi Musyarakah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasinya adalah BMT yang menjadi anggota Puskopsyah Provinsi Lampung, dan subyek penelitiannya adalah manajer dan staf akuntansinya. BMT yang diambil sampel sejumlah 42 BMT, dengan menggunakan teknik purposive random sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Untuk teknik analisis datanya menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial. Dalam penelitian ini variable bebas terdiri dari; usia, lama bekerja, latar belakang pendidikan dan frekuensi mengikuti pelatihan. Sedangkan variable terikatnya adalah pemahaman praktisi BMT pada PSAK No. 106 akuntansi musyarakah.

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan analisis uji Chi Square dapat ditarik kesimpulan bahwa, ada perbedaan pemahaman praktisi BMT tentang PSAK No. 106 Akuntansi Musyarakah jika dilihat dari usia, lama bekerja, latar belakang pendidikan dan frekuensi mengikuti pelatihan. Sedangkan berdasarkan analisis koefisien kontingensi dari masing- masing variable tersebut dapat diketahui bahwa, variabel latar belakang pendidikan merupakan variabel yang paling tinggi hubungannya dengan variabel pemahaman. Besarnya hubungan ini yaitu sebesar 0,686. Kemudian diikuti oleh variabel usia sebesar 0,666 kemudian variabel lama bekerja sebesar 0,614 dan terakhir variabel yang mempunyai hubungan paling kecil adalah variabel frekuensi mengikuti pelatihan yaitu sebesar 0,597.

Kata Kunci ; Pemahaman, Usia, Latar Belakang Pendidikan, Lama Bekerja, dan Frekuensi Mengikuti Pelatihan

ABSTRACT

UNDERSTANDING OF BMT PRACTITIONERS IN LAMPUNG PROVINCE ON STATEMENT OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (PSAK) NO. 106 MUSHARAKA ACCOUNTING

**By: Ika Trisnawati Alawiyah
NPM. 07913149**

The appearance of Baitul Mal wa Tamwil (BMT) run into significant development in Indonesia. In its capacity as a financial institution, of course not separated from the financial accounting system used. There are fundamental differences about the accounting system used between conventional financial institutions (non-Islamic) with Islamic financial institutions. The difference lies in the operating principle of the concept of sharing profits or losses, interest free as long as it used conventional financial institutions, in addition to Islamic financial institutions to make transactions that cannot be done by conventional banks such as the sale and purchase and tenancy. As a way out, the government issued the guidelines for accounting system of Islamic financial institutions, better known as the Statement of Sharia Accounting Standards (PSAK), especially PSAK No. 106, Accounting Musharaka. Of course, understanding of BMT practitioners on PSAK differ between the one with the other regions.

This research was conducted to answer the questions: 1]. How understanding of BMT practitioners in Lampung about PSAK No.106, Musharaka Accounting?, 2]. Is there a difference in understanding of BMT practitioners in Lampung about PSAK No.106 Musharaka Accounting when viewed from the age, long working in the BMT, educational background and training frequency?. This study aims to determine and analyze the relationship of age, while working, educational background and frequency of training for understanding of BMT practitioners in Lampung about PSAK No. 106 Musharaka Accounting. This research is a kind of field research by using quantitative approach. Population is member of the BMT Puskopsyah in Lampung Province, and the research subjects were managers and accounting staff. BMT had taken 42 samples, by using purposive random sampling technique. Data collection techniques in this study using questionnaires and documentation. As a data analysis techniques using statistical, descriptive and inferential statistical analysis. this research consists of free variables; age, long working, educational background and training frequency. While bound variable is understanding of BMT practitioners on PSAK No. 106 about musharaka accounting.

Based on research results using Chi Square test analysis can draw the conclusion that there are differences in understanding of BMT practitioners on PSAK No. 106. Musharaka accounting when viewed from the old, long working, educational background and training frequency. While the coefficient of contingency based on analysis of each of these variables can be seen that the variable of educational background variables is the highest level of understanding, the magnitude of this relationship is 0,686, followed by 0,666 for the age variable, then long work is 0,614 and for training variables is 0,597.

Keywords: *Understanding, age, educational background, while working, and frequency of training.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm		-
ح	Hā'		h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'		-
د	Dāl		-
ذ	Zāl		z (dengan titik di atas)
ر	Rā'		-
ز	Zā'		-
س	Sīn		-
ش	Syīn		-
ص	Sād		s (dengan titik di bawah)
ض	Dād		d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'		t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'		z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	<i>‘</i>	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-

ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
هـ	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbūṭah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	<i>faṭḥah</i>	ditulis	<i>a</i>
-----	<i>Kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>
-----	<i>dammah</i>	ditulis	<i>u</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	<i>zawi al-furūd</i> <i>ahl as-Sunnah</i>
-------------------------	--------------------	--



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayat serta pertolongan-Nya sehingga tesis ini dapat penyusun selesaikan. Tak lupa shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW., berserta keluarga serta para sahabat. Akhirnya setelah melalui perjalanan yang panjang dan berkat bantuan banyak pihak, penyusun dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Pemahaman Praktisi BMT di Lampung Terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106 Akuntansi Musyarakah”**

Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini, penyusun menghaturkan terima kasih yang setulusnya kepada pihak yang memiliki andil dan kontribusi yang sangat berarti dalam penyusunan tesis ini, yaitu:

1. Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Drs. H. M. Fajar Hidayanto, MM, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS, selaku Ketua Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Drs. H. Asmuni, MA, selaku Sekretaris Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.

5. Dr. Muhammad, M.Ag, selaku dosen pembimbing yang selama ini telah membimbing saya dan mencurahkan segala perhatiannya sehingga tesis ini selesai.
6. Dosen-dosen Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia, khususnya konsentrasi Ekonomi Islam yang telah memberikan berbagai macam Ilmu Pengetahuan Keislaman dan Pendidikan Moral yang tiada terhitung budinya.
7. Ir. Kusnoto, M.TA selaku Ketua Puskopsyah BMT Sejahtera Provinsi Lampung yang telah memberikan tempat pada penulis sebagai tempat penelitian.
8. H. Sunaryo, Amd selaku Sekretaris Puskopsyah BMT Sejahtera Provinsi Lampung yang telah memberikan tempat pada penulis sebagai tempat penelitian.
9. Kedua Orangtua penulis H. Akhya Mu'allim Abdillah, S.Hi dan Hj. Zumaroh, S.Pdi serta semua keluarga yang ada di Lampung yang senantiasa mendukung dan memberikan do'a demi kelancaran dalam penyusunan tesis Penulis.
10. Adik-adik penulis, Miftahunnisa Igiriza dan Muhammad Alwi Al-Ghifari, yang bisa menjadi semangat dalam penyelesaian tesis.
11. Saudara-saudaraku, Pak Sholihin, Om Dodo dan Kiki yang selalu mengingatkanku betapa pentingnya menjaga tali persaudaraan.
12. Sahabat-sahabat perempuanku, yang rela mendengarkan segala keluh kesahku, Icut, Ina, Indra, Mba City, dan Airin.
13. Sahabat laki-lakiku, Mas Yusni, Kak Sayeed. Mas Ikhwan, Mas Andi. Reza, Hafri, Danu, dan Aris terimakasih atas dukungan kalian.
14. Seluruh teman-teman di MSI, Konsentrasi Ekonomi Islam Bu Jati, Mba Yusmini, Mba Ning, Mba Anis, Muna, Mba Naura, Mba Hermi, Mba Diana, Mba Nunung, Mba Ida, Mba Fitri, Pak Hadi, Kak Taufik, Hafidz, Mas Rudi, Pak Rudi, Mas Bayquni, Mas Edo, Mas Harizan, Mas Nasrullah. Mas Syarif, Pak Eko, Pak Rinto, Adi Padang, Mas Syafi'i dan lain lain, orang-orang Sukses dimana mereka adalah Inspirator keberhasilan saya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Telaah Pustaka	9

G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS.....	17
A. Landasan Teori.....	17
1. Akuntansi Syari'ah.....	17
2. BMT (Baitul Mal wat Tamwil).....	27
3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106	43
4. Pemahaman	54
B. Kerangka Berpikir.....	66
C. Hipotesis.....	68
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	69
A. Desain penelitian.....	69
B. Pendekatan Penelitian	70
C. Jenis Analisis Penelitian.....	70
D. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	71
E. Subyek Penelitian.....	72
F. Populasi dan Sampel	72
G. Definisi Operasional Variabel.....	76
H. Teknik Pengumpulan Data.....	77
I. Pengembangan Instrumen Penelitian	78
J. Uji Validitas dan Reliabilitas	79
K. Teknik Analisa Data.....	83
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	86
A. Hasil Penelitian	86

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Jumlah BMT anggota Puskopsyah Lampung	74
tabel 3. 2. Jumlah sampel BMT dan responden	76
Tabel 3. 3. Penyebaran nomor butir angket skala pemahaman	80
Tabel 3. 4. Pedoman interpretasi koefisien kontingensi	84
Tabel.4.1. Jumlah BMT yang dijadikan sampel dan tingkat pengembalian Kuesioner	92
Tabel 4. 2. Tingkat penerapan PSAK No. 106 di BMT anggota puskopsyah Lampung	94
Tabel 4. 3. Sumber informasi tentang PSAK No. 106 menurut responden	95
Tabel 4.4. Tingkat kesulitan mempraktekan PSAK 106 menurut responden	96
Tabel 4.5. Latar belakang pendidikan responden.....	97
Tabel 4.6. Distribusi frekuensi kelompok usia responden	99
Tabel 4.7 Distribusi frekuensi latar belakang pendidikan	101
Tabel 4.8 Distribusi frekuensi lamanya bekerja di BMT	102
Tabel 4.9 Distribusi frekuensi responden mengikuti pelatihan	104
Tabel 4.10 Analisis standar deviasi.....	106
Tabel 4.11 Distribusi tingkat pemahaman responden terhadap PSAK No. 106 akuntansi <i>musyarakah</i>	106
Tabel 4.12 Tabel tingkat pemahaman responden dari masing- masing BMT anggota Puskopsyah.....	108
Tabel 4.13 Tingkat pemahaman responden menurut kelompok usia	109

Tabel 4.14 Distribusi frekuensi tingkat pemahaman responden menurut latar belakang pendidikan	110
Tabel 4.15 Tingkat pemahaman responden menurut lama bekerjanya	112
Tabel 4.16 Tingkat pemahaman responden menurut frekuensi mengikuti pelatihan.....	114
Tabel 4.17 Tingkat jawaban responden terhadap butir pertanyaan definisi <i>Musyarakah</i> menurut PSAK No. 106.....	116
Tabel 4.18 Tingkat jawaban responden terhadap butir pertanyaan No. 2.....	117
Tabel 4.19 Tingkat jawaban responden terhadap butir pertanyaan tentang pengakuan hasil usaha <i>musyarakah</i>	118
Tabel 4.20 Tingkat jawaban responden terhadap butir pertanyaan tentang pengukuran akuntansi <i>musyarakah</i>	118
Tabel 4.21 Tingkat jawaban responden terhadap butir pertanyaan tentang penyajian akuntansi <i>musyarakah</i>	119
Tabel 4.22 Tingkat jawaban responden terhadap butir pertanyaan tentang pengungkapan akuntansi <i>musyarakah</i>	120
Tabel 4.23 Tingkat jawaban responden terhadap butir pertanyaan tentang transaksi kasus dan proses pencatatannya menurut PSAK No. 106.....	120
Tabel 4.24 Koefisien kontingensi.....	122

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 4.1 Histogram kelompok usia responden.....	100
Gambar. 4.2 Histogram latar belakang pendidikan responden.....	102
Gambar . 4.3 Histogram lama responden bekerja di BMT	103
Gambar . 4.4. Histogram frekuensi responden dalam mengikuti pelatihan.....	105
Gambar . 4.5. Histogram tingkat pemahaman responden terhadap PSAK 106 akuntansi <i>musyarakah</i>	107
Gambar. 4.6 Histogram tingkat pemahaman responden menurut kelompok usia.....	109
Gambar 4.7 Histogram tingkat pemahaman responden menurut latar belakang pendidikan.....	111
Gambar 4.8 Histogram tingkat pemahaman responden menurut lama bekerja.....	103
Gambar 4.9 Histogram tingkat pemahamn responden menurut frekuensi mengikuti pelatihan.....	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hal memberikan pelayanan yang luas bagi masyarakat bawah, BMT (*Baittul Maal wat Tamwil*) atau padanan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu. Adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan usaha kecil yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. BMT berbadan hukum Koperasi seperti yang disebutkan dalam Keputusan Menteri No.9/Kep/M.KUKM/IX/2004, disebutkan bahwa KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) atau dikenal dengan nama BMT merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syari'ah).¹

Keberadaan BMT sebagai salah satu lembaga keuangan syariah mengalami dinamika yang bagus seiring dengan dinamika perkembangan lembaga ekonomi dan keuangan Islam lainnya di tanah air. Munculnya lembaga keuangan mikro seperti BMT merupakan salah satu *multiplier efect* dari pertumbuhan dan perkembangan lembaga ekonomi dan keuangan bank syariah. Lembaga ekonomi mikro ini lebih dekat dengan kalangan masyarakat bawah.

¹ Ahmad Sumiyanto, *BMT menuju Koperasi Modern*, (Yogyakarta; Ises Publishing, 2008), hal. Lampiran

Dalam operasional kegiatannya, BMT pada prinsipnya melaksanakan fungsi dan kegiatan dalam bidang jasa keuangannya, sektor riil dan sosial. Kegiatan dalam aspek jasa keuangan ini pada prinsipnya sama dengan yang dikembangkan oleh lembaga ekonomi dan keuangan lain berupa penghimpunan dan penyaluran dana dari dan kepada masyarakat. Dalam fungsi ini BMT disamakan dengan sistem perbankan / lembaga keuangan yang mendasarkan kegiatannya dengan syari'at Islam. Demikian pula instrumen yang dipakai untuk kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana dari dan kepada masyarakat.

Dalam sektor riil, pada dasarnya kegiatan sektor riil juga merupakan bentuk penyaluran dana BMT. Penyaluran dana pada sektor riil bersifat permanen atau jangka panjang dan terdapat unsur kepemilikan di dalamnya. Penyaluran dana ini selanjutnya disebut investasi atau penyertaan. Investasi yang dilakukan BMT dapat dengan mendirikan usaha baru atau dengan masuk ke usaha yang sudah ada dengan cara membeli saham. Sedangkan kegiatan ketiga dari BMT adalah kegiatan sosial (Zakat, infak, sedekah, dan wakaf) BMT. Kegiatan ini merupakan jantung kekuatan BMT. Dengan kegiatan ini, BMT sebenarnya memainkan peran yang tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga berperan dalam pembinaan agama bagi para nasabah sektor jasa keuangan BMT. Selain itu, dengan kegiatan ini BMT juga diharapkan turut memperkuat sektor sosial terutama bagi anggotanya dalam menyalurkan ZIS-nya kepada BMT.

Secara legal dan formal, BMT berbadan hukum koperasi, namun standar akuntansi yang digunakan berbeda-beda. Karena biasanya BMT berbadan hukum koperasi, BMT menggunakan PSAK No.27 tentang Akuntansi Koperasi sebagai standar akuntansinya. Mengenai hal ini Triyuwono berpandangan bahwa bentuk koperasi berwatak sosial memberikan warna yang sama pada praktik, atau standar akuntansi keuangan koperasi.² Sementara itu Amin Aziz, Ketua PINBUK mengakui bahwa operasional BMT memang sudah sangat mirip dengan bank dan berbeda dari koperasi. Bila koperasi hanya menerima tabungan dan meminjamkan dana hanya untuk anggotanya, maka BMT banyak yang melayani diluar anggotanya.³

Berhubungan dengan hal diatas, Tujuan utama dari BMT adalah mendorong kegiatan menabung dan memberikan dana pembiayaan dengan sistem syariah untuk para anggotanya. Selain itu, BMT juga dapat menerima titipan zakat, infak dan *shadaqoh*, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanat dari *shohibul maal*. Bidang usahanya selain menghimpun dana dari masyarakat yang berupa tabungan, juga menyalurkan dana kepada masyarakat yang berbentuk pembiayaan, salah satunya pembiayaan dengan prinsip *musyarakah*. Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan

² Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syari'ah dan Koperasi Mencari Bentuk Dalam Metafora Amanah*, Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, Volume 1 No. 1 Mei 1997, hlm. 38-42

³ Amin Aziz dalam *Jangan Paksa BMT Besar Jadi BPRS*, dalam www.republika.co.id Sunday, 19 July 2009 00:27

kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dari produk pembiayaan tersebut, diperlukan standar akuntansi yang berdasarkan prinsip syariah merupakan kunci sukses bagi bank/lembaga keuangan syariah untuk menjalankan sistem dalam rangka melayani masyarakat. Standar akuntansi tersebut akan terefleksi dalam sistem akuntansi yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan sistem laporan keuangan. IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) sudah mengeluarkan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No.101 – 106 Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, pada Tanggal 1 September 2007. Pembuatan standar akuntansi bank syariah yang terpisah dari PSAK No.31 tentang perbankan konvensional disebabkan adanya perbedaan mendasar antara prinsip operasi bank/lembaga syariah dengan bank konvensional. Perbedaan yang mendasar tersebut terletak pada prinsip operasi atas konsep pembagian keuntungan dan atau kerugian yang tidak menggunakan bunga sebagaimana bank konvensional yang menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan biaya atas penggunaan dana karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Selain itu bank/lembaga syariah dapat melakukan transaksi yang tidak mungkin dilakukan oleh bank konvensional seperti jual beli dan sewa menyewa.

Melihat pentingnya mempelajari akad *musyarakah* oleh praktisi BMT di Lampung dengan alasan bahwa kerjasama *musyarakah* sangat

lekat dengan usaha kerjasama antar dua belah pihak atau lebih dimana masing –masing pihak berkontribusi memberikan sumbangan modal yang mana keuntungan dan resiko dari usaha bersama akan dibagi sesuai kesepakatan bersama. Kerjasama ini tampaknya sangat layak dilakukan melihat latar belakang Provinsi Lampung dengan sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang potensial untuk dapat menarik perhatian para *investor* domestik maupun asing untuk bekerja sama dalam pengembangan sumber daya alam di Lampung melalui akad *musyarakah*. Selain dari pada itu, sangat minimnya transaksi akad pembiayaan *musyarakah* dibandingkan dengan akad pembiayaan yang lain (*murabahah* dan *mudharabah*) pada BMT menjadi salah satu motifator untuk menggiatkan usaha-usaha melalui akad *musyarakah*. Sebagai contoh dapat dilihat pada transaksi akad pembiayaan pada salah satu BMT di Indonesia yaitu BMT El-Bummi (lihat lampiran).

Berhubungan dengan kondisi tersebut dibutuhkan kesiapan para praktisi BMT, khususnya di Provinsi Lampung. Semua ini dapat diwujudkan dengan cara memperkaya keilmuan di bidang *syirkah* / kerjasama salah satunya adalah memahami akad *musyarakah*. Selain itu dalam penanganan perhitungan keuangan, hendaknya perlu pemahaman lebih mengenai akuntansi *musyarakah* (PSAK 106). Jika dikaitkan dengan penelitian ini maka, yang dimaksud dengan pemahaman tentang PSAK 106 adalah mengetahui dan mengerti benar akan PSAK 106. Paham dalam arti mengetahui tentang definisi, pengakuan dan pengukuran.

penyajian, serta pengungkapan akuntansi *musyarakah*. Pemahaman tersebut meliputi pemahaman secara teori dan praktek. Dan itu semua dapat dibuktikan dengan praktisi mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang akuntan dalam mencatat suatu akad transaksi *musyarakah* secara baik dan benar sesuai PSAK No. 106.

Namun dalam memahami PSAK 106 tersebut tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Proses pemahaman PSAK ini yang diduga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor tersebut antara lain; tingkat usia, latar belakang pendidikan, lama bekerja dan frekuensi keikutsertaan dalam berbagai pelatihan. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan diuji apakah ke-empat faktor tersebut berpengaruh terhadap pemahaman praktisi BMT tentang PSAK No. 106 Akuntansi Musyarakah. Dalam hal ini yang dimaksud dengan praktisi adalah manajer dan karyawan bagian akuntansi di masing-masing BMT. Pemahaman ini sangat diperlukan oleh para praktisi BMT terutama manajer dan akuntannya yang akan berdampak pada kebijakan, teknik akuntansi, dan terutama pertimbangan investasi.

B. Pembatasan Masalah

Guna memfokuskan pembahasan penelitian ini dalam kerangka yang efektif dan efisien, maka selayaknya penulis perlu membatasi luasan cakupan masalah. Pembatasan masalah ini nantinya akan dijadikan pegangan penulis dalam menyelesaikan penulisan karya ilmiah. Dengan berpegang pada latar belakang masalah diatas, maka pembatasan masalah

yang menjadi fokus penulis adalah tentang pemahaman praktisi BMT terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 106 (akuntansi musyarakah). Adapun untuk menilai tingkat pemahaman praktisi tersebut, dihubungkan dengan usia, latar belakang pendidikan, lama bekerja, dan frekuensi dalam mengikuti pelatihan. Sehingga, dapat dicapai kesimpulan bahwa ada pengaruh antara usia, latar belakang pendidikan, lama bekerja, dan frekuensi mengikuti pelatihan dengan tingkat pemahaman seorang praktisi BMT. Selain dari pada itu, untuk membatasi subyek penelitian agar lebih fokus dan tidak membias, maka subyek yang menjadi bahan penelitian adalah para praktisi yang bekerja di BMT- BMT yang tergabung dalam suatu lembaga yaitu PUSKOPSYAH (Pusat Koperasi Syari'ah) BMT Sejahtera se- Provinsi Lampung.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang dan batasan penelitian diatas maka penulis dapat merumuskan dua hal penting sebagai rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pemahaman praktisi BMT-BMT di Lampung terhadap PSAK No.106 Akuntansi *Musyarakah*?
2. Apakah ada perbedaan pemahaman praktisi BMT pada konsep PSAK No.106 Akuntansi *Musyarakah* jika dilihat dari usia, latar belakang pendidikan, lama bekerja dan frekuensi mengikuti pelatihan.

D. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini, yang secara garis besar adalah :

1. Untuk mengetahui pemahaman praktisi BMT-BMT di Lampung terhadap PSAK No.106 Akuntansi *Musyarakah*.
2. Untuk mengetahui perbedaan pemahaman praktisi BMT tentang PSAK No.106 Akuntansi *Musyarakah* jika dilihat dari usia, latar belakang pendidikan, lama bekerja, dan frekuensi mengikuti pelatihan.

E. Manfaat Penelitian.

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Ikut serta menyumbangkan hasil pemikiran yang positif berupa penelitian ilmiah dalam hal akuntansi yang sesuai dengan PSAK No. 106 Akuntansi *Musyarakah*.
2. Untuk lebih mendorong para ahli Ekonomi Syariah dalam mendalami akuntansi syariah agar relevan dengan kebutuhan perbankan yang berbasis syariah.

F. Telaah Pustaka

Dalam merumuskan konsep dan teori tentang Akuntansi *Musyarakah*, sepanjang yang diketahui selama ini, penulis belum menemukan kajian atau penelitian atau tesis yang berkaitan dengan pemahaman praktisi BMT-BMT di Lampung terhadap PSAK No.106 Akuntansi *Musyarakah*. Hal ini dimungkinkan karena masih sedikitnya BMT yang sudah menggunakan sistem akuntansi yang berbasis syari'ah secara baik dan benar. Sehingga penulis terkait dengan judul di atas, akan mengkaji penelitian ini lebih lanjut dengan mengambil dari teori-teori yang ada selanjutnya mengaplikasikannya sesuai dengan PSAK No.106.

Peneliti berusaha berpegang pada landasan teori sebagai patokan dalam penyelesaian dan mencari jawabannya yang mendekati kebenaran. Dalam hal ini untuk mengetahui bagaimana pemahaman praktisi BMT-BMT di Lampung terhadap PSAK No.106 Akuntansi *Musyarakah* yang menjadi objek penelitian.

Perlu ditegaskan disini, bahwa pemahaman praktisi BMT sangatlah penting demi terciptanya stabilitas laporan keuangan di lembaga-lembaga keuangan yang berprinsip syari'ah. Seperti halnya BMT-BMT di Lampung. Untuk membahas tentang akuntansi syariah, maka perlu kiranya mengetahui beberapa teori yang berkaitan dengan akuntansi syari'ah terlebih dahulu.

Banyak penelitian dan kajian yang membahas akuntansi syariah, akan tetapi sangat sedikit sekali makalah, buku, atau karya ilmiah lain

yang membahas dan terfokus pada pemahaman praktisi BMT terhadap PSAK terlebih lagi fokusnya pada PSAK No. 106 akuntansi *musyarakah*.

Khair menyatakan bahwa akuntansi dalam Islam berlandaskan keadilan, kebenaran dan kewajaran. Standar keadilan, kebenaran maupun kewajaran ini adalah standar menurut Allah SWT.⁴

Shaari Hamid, Russel Craig dan Frank Clark (1993) membahas tentang teori akuntansi syariah yang bebas riba. Agama secara umum dan Islam secara khusus memiliki potensi untuk memperluas pengaruh budaya yang dominan dalam kajian harmonisasi akuntansi Internasional karena Islam melewati batas-batas negara. Agama Islam adalah dimensi budaya yang lebih penting pengaruhnya terhadap kebijakan dan praktik akuntansi daripada pengaruh yang berasal dari hukum adat, kebiasaan hukum dan kebiasaan dagang.⁵

Dalam Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia, terdapat tulisan yang memuat tentang akuntansi syariah, yang berjudul "Rerangka Konseptual Pelaporan Keuangan dalam Perspektif Islam".⁶ Disana dijelaskan bahwa dalam pembuatan tulisan ini penulis melakukan kajian terhadap rerangka konseptual akuntansi konvensional, sekaligus menyampaikan pandangan disekitar rerangka konseptual pelaporan

⁴ Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta; Bumi Aksara, 1997), hal. 181

⁵ *Ibid*, hal. 225

⁶ Zulkfli dan Sulastiningsih, "Rerangka Konseptual Pelaporan Keuangan dalam Perspektif Islam", *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, Vol.II, No. 2, (Desember 1998), hal. 165

keuangan dalam perspektif Islam. Ini meliputi, objektif atau tujuan laporan keuangan, karakteristik kualitatif informasi, dan elemen-elemen laporan keuangan. Kajian penulis, tentu saja didasarkan atas penalaran logis dari sumber utama ajaran syari'ah, yakni Al-Qur'an.

Dalam jurnal *Millah*, Mu'alim dan Abidin, yang berjudul "Profesionalisme Praktisi BMT di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman". Pembahasan dari penelitian ini adalah, pemaknaan profesionalisme yang banyak ditemukan di lapangan menunjukkan, bahwa kebanyakan praktisi BMT memberikan pandangan yang bersifat praktis. Profesionalisme praktisi BMT cenderung dimaknai dalam konteks kualitas pelayanan yang diberikan oleh BMT terhadap nasabahnya. Artinya, tolak ukur profesionalisme yang paling besar terletak pada kualitas pelayanan. Kecenderungan pandangan yang demikian muncul karena dilatarbelakangi oleh refleksi para praktisi BMT terhadap persaingan bisnis lembaga keuangan, dimana diantara lembaga-lembaga keuangan yang ada saling bersaing dalam hal pelayanan. Semakin bagus pelayanan yang diberikan, maka dianggap lebih profesional. Padahal, yang seharusnya menjadi tolak ukur profesionalisme praktisi BMT adalah dalam hal penguasaan konsep keuangan syari'ah, baik secara teoritis maupun praktis. Inilah yang membedakan BMT dengan lembaga keuangan lainnya. Dalam penelitian ini wacana profesionalisme praktisi BMT yang dikaitkan dengan kemampuan, pengetahuan, penguasaan konsep-konsep keuangan syariah tidak muncul. Justru yang paling banyak muncul, adalah refleksi para

praktisi BMT terhadap potret dan tantangan usaha yang dijalannya. Sementara, refleksi terhadap kualitas pengetahuan mengenai konsep keuangan syari'ah sebagai kekhasan BMT kurang mendapat perhatian serius. Seharusnya, profesionalisme BMT yang paling utama harus dikaitkan dengan kemampuan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif tentang konsep lembaga keuangan yang berbasis pada ekonomi-syari'ah.⁷

Ada beberapa tesis yang membahas tentang akuntansi syari'ah secara umum yakni tesis dari Muhammad⁸ yang berjudul "Akuntansi Syariah; Refleksi Akuntansi Berorientasi Sosial Dan Pertanggungjawaban". Didalam tesis tersebut menjelaskan bahwa akuntansi syariah adalah akuntansi yang berorientasi sosial dan pertanggungjawaban. Sebab akuntansi syariah dapat menyajikan atau mengungkap dampak sosial perusahaan terhadap masyarakat dan sekaligus menyajikan laporan pertanggungjawaban yang bersifat *humanis, emansipatoris, transedental dan teological*. Perkembangan lebih lanjut akuntansi bukan sekedar dianggap sebagai ilmu (*science*) dan teknologi universal bebas nilai. Akan tetapi, akuntansi adalah produk sejarah yang merefleksikan budaya di tempat akuntansi dilaksanakan.

⁷ Millah Vol. IV, No. 2, Januari 2005

⁸ Muhammad, *Akuntansi Syari'ah; Refleksi Akuntansi Berorientasi Sosial dan Pertanggungjawaban*, Tesis MSI UII Yogyakarta.

Hayati⁹ ”Pemahaman Praktisi BMT Di Yogyakarta Terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK NO. 59) Akuntansi Perbankan Syariah Produk Funding”. Pada penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa para praktisi BMT anggota Puskopsyah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari manajer dan staf akuntansinya, pada umumnya mempunyai tingkat pemahaman tinggi terhadap pengakuan dan pengukuran produk *funding* PSAK No.59. Ini berdasarkan hasil angket yang disebar.

Karsudin¹⁰ berkesimpulan dalam skripsinya bahwa, ada pengaruh yang cukup signifikan antara variabel pelatihan dan pemahaman konsep-konsep syariah. Hal tersebut juga didukung dengan skripsi Mahyudi,¹¹ tentang pemahaman santri terhadap *fiqh mu'amalah*, ternyata tingkat pemahaman mereka pada tingkat sedang, yang mempengaruhi sikap respon santri kepada Bank Syariah.

Mengacu dari jurnal dan tesis tersebut diatas yang menjelaskan tentang konsep akuntansi Islam dan pemahaman seorang karyawan, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa, meskipun banyak tesis dan skripsi yang membahas tentang akuntansi syariah dan pemahaman

⁹ Eni Iroh Hayati, *Pemahaman Praktisi BMT Di Yogyakarta Terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK NO. 59) Akuntansi Perbankan Syariah Produk Funding*, Tesis MSI UII Yogyakarta

¹⁰ Mohammad Karsudin, *Pengaruh Pelatihan Perbankan Syariah Terhadap Pemahaman Konsep-konsep Syariah Pada Para Pegawai Bank Syariah di Yogyakarta*, (Yogyakarta; STIS, 2008)

¹¹ Mahyudi Al Rasyid, *Pengaruh Pemahaman fiqh Mu'amalah dan Religiusitas Santri Terhadap Sikapnya Pada Bank Syariah; Studi Kasus Pada Santri Pondok Pesantren Sunan Pandan Arang*, (Yogyakarta; STIS, 2003)

sesorang tentang akuntansi, akan tetapi secara spesifikasi penelitian tentang pemahaman praktisi BMT tentang akuntansi *musyarakah* yang acuannya pada PSAK No. 106, belum ada. Walaupun secara garis besar jika dikaitkan dengan penelitian yang terdahulu terlihat seolah-olah terdapat banyak persamaan. Dalam penelitian ini peneliti berusaha lebih fokus pada akuntansi *musyarakahnya* saja dan obyek penelitiannya berada di daerah Provinsi Lampung. Oleh karena itu secara spesifik penelitian tentang pemahaman praktisi BMT-BMT di Lampung terhadap PSAK No.106 Akuntansi *Musyarakah* sangatlah menarik untuk diteliti. Apalagi jika untuk mengukur pemahaman seseorang itu dilihat dari sisi usia, latar belakang pendidikan, lama bekerja, dan frekuensi mengikuti berbagai macam pelatihan. Sehingga penulis berkesimpulan bahwa permasalahan ini penting untuk dijadikan bahan penelitian, agar dari hasil penelitian ini nanti kita dapat mengetahui gambaran yang utuh tentang pemahaman praktisi BMT-BMT di Lampung terhadap PSAK No.106 Akuntansi *Musyarakah*, sehingga dari penelitian tersebut mendapatkan banyak manfaat bagi pihak-pihak yang terkait.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memuat argumen-argumen logis yang mengemukakan pentingnya bab-bab dan subbab-subbab dari tesis dan hubungannya antara satu dengan yang lain. Sistematika ini mencerminkan bahwa tesis adalah satu kesatuan yang integral dan urgen.

Bab I. Merupakan pendahuluan, pada bagian ini disajikan :

- a. Latar belakang masalah, yaitu mendeskripsikan berbagai fenomena yang berkaitan langsung maupun tak langsung dengan judul atau tema penelitian. Dengan demikian antara judul dan latar belakang masalah saling berkaitan.
- b. Rumusan masalah. Rumusan masalah atau pertanyaan penelitian pada hakikatnya adalah butir-butir yang lebih jelas dan sistematis atas permasalahan yang diungkapkan di dalam latar belakang masalah.
- c. Pembatasan masalah. Penelitian ini dibatasi agar penelitian lebih terfokus dan tidak melebar kemana-mana, sehingga tujuan penelitian tercapai dengan baik.
- d. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian pada hakikatnya adalah suatu informasi yang diperoleh untuk menjawab rumusan masalah.
- e. Manfaat penelitian, adalah hasil yang diperoleh setelah penelitian usai.
- f. Telaah putaka, adalah menegaskan bahwa penelitian ini penelitian yang baru dan sebelumnya belum ada yang meneliti. Jadi meletakkan penelitian ini pada posisi penelitian yang penting dan menarik untuk diteliti.
- g. Sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan memuat argumen-argumen logis yang mengemukakan pentingnya bab-bab dan subbab-subbab dari tesis dan hubungannya antara satu dengan yang lain.

Bab II. Merupakan landasan teori, kerangka berpikir dan hipotesis. Tinjauan pustaka perlu disajikan sebagai pisau analisis dalam mengolah

data-data yang ada dilapangan. Dalam landasan teori ini memuat tentang akuntansi syari'ah, BMT, PSAK No.106 dan pemahaman.

Bab III. Merupakan metodologi penelitian. Pada bab ini diuraikan mengenai metodologi yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV. Merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan dan diolah, kemudian dilakukan pembahasan (analisa data). Selain itu berbekal pada kerangka teori seputar akuntansi bagi lembaga keuangan Islam, dilakukan pencermatan dan pengolahan antar data yang disajikan secara kualitatif dan kuantitatif.

Bab V. Bagian akhir yang ditutup dengan kesimpulan dan saran terhadap objek penelitian.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS

A. LANDASAN TEORI

1. Akuntansi Syari'ah

Pengembangan Standar Akuntansi Keuangan Bank Syari'ah telah dimulai sejak tahun 1987. Dalam hal ini, beberapa penelitian berkaitan dengan upaya pengembangan Standar Akuntansi Keuangan tersebut telah diselesaikan. Hasilnya telah dikompilasikan dalam lima jilid dan disimpan di Perpustakaan IRTI-IDB (*Islamic Research and Training Institute of The Islamic Development Bank*). Hasil dari penelitian-penelitian dan diskusi-diskusi mengenai hal tersebut adalah pembentukan *the Financial Accounting Organization for Islamic Banks and Financial Institutions (the Organization)* pada tanggal 1 Safar 1410 H/26 Februari 1990. Organisasi ini terdaftar sebagai organisasi nirlaba yang berdomisili di Manama, ibukota Negara Bahrain pada tanggal 11 Ramadan 1411 H/ 27 Maret 1991.¹

Sejak pendirian organisasi tersebut kemudian dengan upaya penyusunan standar-standar Akuntansi Keuangan Bank dan lembaga Keuangan Syari'ah. Pertemuan rutin panitia perencanaan dan *Follow Up* telah diselenggarakan dengan tujuan untuk merealisasikan rencana yang telah disetujui oleh Dewan pengawas dan Dewan Standar

¹ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta; P3EI, 2008), hal. 3

Akuntansi Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah. Berkaitan dengan hal ini, organisasi ini juga mengakomodasi peran serta beberapa Konsultan Syari'ah, pakar-pakar dan praktisi Akuntansi, serta para Bankir Syari'ah.²

1. Pengertian Umum Akuntansi

Makna atau rumusan definisi akuntansi mengalami variasi dan berkembang, sesuai zamannya. Rumusan definisi akuntansi yang bisa dijadikan rujukan cukup mewakili antaranya :

- a. Menurut AICPA (*American Institute of Certified Public Accountants*)

Akuntansi adalah seni pencatatan, pengelompokan dan pengikhtisaran dengan cara yang berarti, atas semua transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan, serta penafsiran hasil-hasilnya.³

- b. Menurut ASOBAT (*A Statement Of Basic Accounting Theori*)

Akuntansi adalah proses mengidentifikasikan, mengukur, dan menyampaikan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya.⁴

- c. Menurut IAI (*Ikatan Akuntan Indonesia*)

² *Ibid*, hal. 4

³ Rosidi, *Teori Akuntansi ; Tujuan, Konsep, dan Struktur*, (Jakarta; FEUI, 1999), hal. 7

⁴ Sofyan Syafri Harahab., *Teori Akuntansi*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 1

Akuntansi adalah aktivitas jasa yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomik yang diperkirakan bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomik dan membuat pilihan di antara alternatif tindakan yang ada.⁵

Sedangkan merujuk pada akuntansi syari'ah menurut Muhammad, akuntansi syariah adalah akuntansi yang berhubungan dengan aspek-aspek lingkungannya. Karena syariah adalah mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia, baik ekonomi, politik, sosial dan filsafat moral. Dengan kata lain, syariah berhubungan dengan seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk didalamnya dalam hal akuntansi.⁶

Akuntansi syariah juga merupakan proses pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan transaksi keuangan yang diukur dalam satuan uang serta pelaporan hasil-hasilnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.⁷

Akuntansi syariah tidak akan terlepas dari perspektif (pandangan dunia atau paradigma) yang dimiliki oleh manusia. Ketika seseorang memahami dirinya sebagai *homo economicus*,

⁵ Ivan Rahmawan, *Kamus Istilah Akuntansi Syariah*, (Yogyakarta; Pilar Media, 2005), hal.

⁶ Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta; UPP AMP YKPN, 2002), hal. 274

⁷ Ivan Rahmawan., *Kamus Istilah Akuntansi Syariah*, (Yogyakarta; Pilar Media, 2005), hal. 14

maka segala sesuatu yang ada dilingkungannya (termasuk praktik ekonomi dan akuntansi maupun teori yang dibangun sebagai dasar dari praktik tadi) akan dilihat dan dibangun dari perspektif manusia sebagai "binatang ekonomi". Konstruksi teori dan bentuk praktik tidak akan menyimpang dari perspektif yang digunakan. Teori dan bentuk praktik tetap dinyatakan benar sepanjang ia konsisten dengan nilai-nilai yang terkandung dalam perspektif yang digunakan.⁸

2. Prinsip Akuntansi Syari'ah

Sebelum membahas tentang prinsip akuntansi syari'ah, ada baiknya kita mengetahui perbedaan antara akuntansi konvensional dengan akuntansi syari'ah. Perbedaan antara akuntansi konvensional dengan akuntansi syari'ah tidak hanya pada batasan tujuannya saja namun juga pada prinsip-prinsip dasarnya. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah :

a. Postulat Entitas

- Akuntansi konvensional : pemisahan antara bisnis dan pemilik
- Akuntansi syari'ah : entitas didasarkan pada bagi hasil

⁸ Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 7

b. Postulat *Going Concern*

- Akuntansi konvensional : kelangsungan bisnis secara terus menerus, yaitu didasarkan pada realisasi keberadaan aset.
- Akuntansi syariah : kelangsungan usaha tergantung pada persetujuan kontrak antara kelompok yang terlibat dalam aktivitas bagi hasil.

c. Postulat Periode Pengukuran

- Akuntansi konvensional : tidak dapat menunggu sampai akhir kehidupan perusahaan dengan mengukur keberhasilan aktivitas perusahaan.
- Akuntansi syariah : setiap tahun dikenai zakat, kecuali untuk produk pertanian yang dihitung setiap panen.

d. Postulat Unit Pengukuran

- Akuntansi konvensional : nilai uang
- Akuntansi syariah : kuantitas nilai pasar digunakan untuk menentukan zakat binatang, hasil pertanian dan emas.

e. Prinsip Penyingkapan Penuh

- Akuntansi konvensional : bertujuan untuk pengambilan keputusan
- Akuntansi syariah : menunjukkan pemenuhan hak dan kewajiban kepada Allah, masyarakat dan individu.

f. Prinsip Obyektivitas

- Akuntansi konvensional : reliabilitas pengukuran digunakan dengan dasar bias personal.
- Akuntansi syariah : berhubungan erat dengan konsep ketaqwaan, yaitu pengeluaran materi maupun non materi untuk memenuhi kewajiban.

g. Prinsip materi

- Akuntansi konvensional : dihubungkan dengan kepentingan relatif mengenai informasi pembuatan keputusan.
- Akuntansi syariah : berhubungan dengan pengukuran dan pemenuhan tugas/kewajiban kepada Allah, masyarakat dan individu.

h. Prinsip Konsistensi

- Akuntansi konvensional : dicatat dan dilaporkan menurut pola GAAP
- Akuntansi syariah : dicatat dan dilaporkan secara konsisten sesuai dengan prinsip yang dijabarkan oleh syariah

i. Prinsip Konservatisme

- Akuntansi konvensional : pemilihan teknik akuntansi yang sedikit pengaruhnya terhadap pemilik

- Akuntansi syariah : pemilihan teknik akuntansi dengan memperhatikan dampak baiknya terhadap masyarakat.⁹

Harahap berpendapat bahwa konsep dasar akuntansi syariah tidak banyak berbeda dengan akuntansi konvensional, kecuali dua hal, yaitu :

- a. Sumber hukumnya adalah Allah melalui instrumen Al Qur'an dan Sunnah. Sumber hukum ini harus menjadi dasar pengaman dari setiap postulat, konsep, prinsip dan teknik akuntansi.
- b. Penekanan pada *accountability*, kejujuran, kebenaran dan keadilan. Permasalahan di luar itu diserahkan kepada akal pikiran manusia, termasuk untuk kepentingan *decision usefulness*.

Berikut adalah uraian prinsip umum akuntansi syari'ah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282.¹⁰

1. Prinsip Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang Khaliq mulai dari dalam kandungan. Manusia sebagai khalifah dimuka bumi. Inti kekhalifahan adalah menjalankan atau menunaikan

⁹ Akhyar Adnan, *Akuntansi Syari'ah, Arah, Prospek, dan Tantangannya*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 73

¹⁰ Muhamad, *Prinsip-Prinsip Akuntansi Dalam Alqur'an*, (Yogyakarta: UII-Press, 2000), hal. 42

amanah. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terikat. Wujud pertanggungjawaban biasanya dalam bentuk laporan akuntansi.

2. Prinsip Keadilan

Kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu: *pertama*, berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran, yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. *Kedua*, kata adil bersifat lebih fundamental (dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syari'ah dan moral).

3. Prinsip Kebenaran

Aktifitas akuntansi akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.

3. Perlunya Akuntansi Syari'ah

Sehubungan dengan kegunaan akuntansi syari'ah yang sangat penting, maka disini akan diuraikan sebagai berikut:¹¹

1. Pengguna informasi akuntansi, antara lain:

- a. Pemegang saham
- b. Deposan
- c. *Shahibul maal*
- d. Pengusaha, perusahaan, atau agensi yang berhubungan dengan bank
- e. Dewan Pengawas Syari'ah
- f. Lembaga pemerintah, bank sentral, menteri keuangan, badan administrasi/pengelola zakat
- g. Masyarakat luas
- h. Pengamat non muslim
- i. Peneliti
- j. Pegawai lembaga yang bersangkutan.

2. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna, meliputi:¹²

- a. Informasi yang dapat membantu dalam menilai pelaksanaan operasional bank dengan aturan tertulis dan jiwa syari'ah
- b. Informasi yang dapat membantu dalam menilai kemampuan lembaga dalam menjaga aset, mempertahankan likuiditas, dan meningkatkan laba

¹¹ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syari'ah edisi II*, (Jakarta; Salemba Empat, 2005), hal. 191

¹² *Ibid*, hal. 191

- c. Informasi tentang inisiatif lembaga atas tanggung jawabnya terhadap pekerja, pelanggan, masyarakat, dan lingkungan, dan
- d. Informasi yang dapat membantu dalam pertanggungjawaban manajemen.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) disebutkan, bahwa tujuan akuntansi keuangan bank syari'ah adalah:

1. Menentukan hak dan kewajiban pihak terikat, termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lain, sesuai dengan prinsip syari'ah yang berlandaskan pada konsep kejujuran, keadilan, kebajikan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis Islami.
2. Menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai laporan untuk pengambilan keputusan, dan
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syari'ah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.¹³

Al Qur'an menegaskan tentang pentingnya pencatatan transaksi ekonomi. Pada QS. Al Baqarah 282 memperlihatkan bahwa tekanan Islam dalam kewajiban melakukan pencatatan adalah :

- a. Menjadi bukti dilakukannya transaksi *muamalah* yang menjadi dasar nantinya dalam menyelesaikan persoalan selanjutnya.

¹³ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syari'ah*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2002. hal. 4

- b. Menjaga agar tidak terjadi manipulasi atau penipuan baik dalam transaksi maupun hasil dari transaksi itu (laba)¹⁴

Penekanan ini didukung pula oleh ratusan ayat yang dapat dijadikan sumber moral akuntansi seperti kewajiban bertaqwa, berlaku adil, jujur, menyatakan kebenaran, memilih yang terbaik, berguna, menghindari yang haram, jangan boros, jangan merusak, dan lain sebagainya. Instrumen ini sebenarnya sudah cukup sebagai landasan teoritis dari akuntansi syari'ah. Sedangkan yang bersifat teknis diserahkan sepenuhnya kepada umat untuk merumuskannya sesuai kebutuhannya.

2. BMT (Baitul Mal wat-Tamwil)

a. Pengertian

Secara terminologi, istilah BMT merupakan gabungan dari dua kalimat seperti tersebut diatas. Dua kalimat tersebut digabung menjadi satu kalimat yaitu Baitul Maal Wat Tamwil. Istilah tersebut kemudian digunakan sebagai nama untuk sebuah nama lembaga keuangan Islam yang disebut BMT.¹⁵ BMT mempunyai ciri utama sebagai lembaga bisnis, mencari laba bersama untuk anggota dan masyarakat. Bukan lembaga sosial, tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dan penyaluran dana bagi kesejahteraan orang banyak. BMT juga bukan milik perseorangan,

¹⁴ Sofyan Syafri Harahab., *Akuntansi Islam*, (Jakarta; Bumi Aksara, 1997), hal. 142

¹⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta; UII Press, 2004), hal. 126.

atau orang dari luar masyarakat, atas dasar ini BMT tidak dapat berbadan hukum perseorangan.

Sudarsono menyimpulkan bahwa BMT mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi *non profit department* sebagai landasan histories bahwa *baitul maal* pada masa Islam klasik adalah berfungsi sebagai dana umat dan penyeimbang perekonomian, sedangkan fungsi kedua yaitu fungsi *profit department* karena sebagai panjang tangan dari bank syariah yang di atas sudah dijelaskan bahwa kemampuan perbankan sangat terbatas untuk menjangkau sektor usaha mikro dan kecil sehingga dibutuhkan lembaga keuangan yang komersial seperti bank sehingga dapat menjangkau sektor tersebut, dan alternatif pemikir ekonomi Islam untuk lembaga itu adalah BMT tersebut.

Didirikannya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta meningkatkan kekuatan dan posisi pengusaha kelas bawah dengan pelaku ekonomi yang lain.¹⁶ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan supaya dapat mandiri. Dengan sendirinya, tidak dapat dibenarkan jika anggota dan masyarakat menjadi sangat tergantung pada BMT. Dengan menjadi anggota

¹⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII, 2004)

BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syaria'ah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan, ataupun materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam pengemban misi keIslaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, BMT diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini.

Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi *pertama*; untuk mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota *muamalat* dan daerah kerjanya. *Kedua*; meningkatkan kualitas SDM anggota lebih profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global. *Ketiga*; menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. *Empat*; menjadikan perantara keuangan (*financial intermediary*), antara pemilik dana (*shohibul māāl*), baik

sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dan (*mudhārib*) untuk pengembangan usaha produktif.¹⁷

b. Struktur organisasi

Untuk memperlancar tugas BMT, maka diperlukan struktur yang mendeskripsikan alur kerja yang harus dilakukan oleh personil yang ada di dalam BMT tersebut. Struktur organisasi BMT meliputi, musyawarah anggota pemegang simpanan pokok, dewan syari'ah, pembina manajemen, manajer, pemasaran, kasir dan pembukuan.

Adapun tugas dari masing-masing struktur di atas adalah sebagai berikut

- 1) Musyawarah anggota pemegang simpanan pokok memegang kekuasaan tertinggi di dalam memutuskan kebijakan-kebijakan makro BMT.
- 2) Dewan Syari'ah, bertugas mengawasi dan menilai operasionalisasi BMT.
- 3) Pembinaan Manajemen, bertugas untuk membina jalannya BMT dalam merealisasikan programnya.
- 4) Manajer bertugas untuk menjalankan amanat musyawarah anggota BMT dan memimpin BMT dalam merealisasikan programnya.

¹⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 131.

- 5) Pemasaran bertugas untuk mensosialisasikan dan mengelola produk-produk BMT.
- 6) Kasir bertugas melayani nasabah.
- 7) Pembukuan bertugas untuk melakukan pembukuan atas aset dan omzet BMT.¹⁸

c. Badan Hukum Koperasi Untuk BMT

Dilihat dari kesesuaian prinsip koperasi dalam Islam dan hukum kebolehan koperasi dalam Islam, maka koperasi adalah sebuah lembaga yang dapat diterapkan untuk BMT. Kebolehan ini juga didasarkan pada relevansi konsep antara koperasi dan BMT yang dapat dilihat dari; *pertama*, latar belakang dan sejarah kelahiran kedua lembaga ini adalah sama-sama dalam rangka memperjuangkan kepentingan rakyat golongan bawah sebagai reaksi terhadap sistem ekonomi yang berlaku pada waktu itu.

Koperasi lahir sebagai sarana dan protes atas sistem ekonomi kapitalis yang menindas dan mengakibatkan penderitaan pada rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka. Begitu juga BMT yang lahir karena keberadaan BMI dan BPR (S) yang belum dapat menjangkau masyarakat golongan ekonomi bawah. Hal ini disebabkan karena berbagai kendala, diantaranya peraturan perundang-undangan,

¹⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 140.

perizinan yang rumit dan lama serta mobilisasi dana yang sulit. BMT lahir sebagai alternatif untuk mengatasi keadaan ini¹⁹.

Kedua, dengan mengacu pada pengertian yang dikandung keduanya dapat disimpulkan bahwa kedua lembaga ini sama-sama mengandung dua unsur. Unsur tersebut adalah unsur ekonomi dan unsur sosial yang saling berkaitan. Ini merupakan bukti bahwa kedua lembaga ini tidak hanya bergerak di bidang bisnis namun aspek sosialnya juga tidak dilupakan.

Ketiga, relevansi ini juga dilihat melalui prinsip-prinsip dasar yang dikandung oleh kedua konsep ini. Dalam prinsip-prinsip dasar keduanya ditemukan bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak bertentangan. Pada intinya kedua lembaga ini berusaha untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui pengelolaan yang sarat dengan nilai-nilai etik dan moral yang tinggi. Yang ini juga akan membedakan kedua lembaga ini dengan bentuk-bentuk usaha ekonomi lainnya.

Keempat, adanya kesamaan tujuan pada kedua lembaga tersebut. Tujuan yang terkandung adalah sama-sama berusaha untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada

¹⁹ 20 M. Akhyar Adnan, *Beberapa Issue Di Sekitar Pengembangan Lembaga Keuangan Berdasarkan Syariah*, Makalah disajikan dalam Seminar dan Talk Show Peran Ulama Dalam Sosialisasi dan Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah, (diselenggarakan oleh ASBISINDO Wilayah Jateng-DIY), 1999. Sejarah Koperasi dapat dilihat pada Nindyo Pramono, *Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya dan Koperasi Indonesia di dalam Perkembangan*, (Yogyakarta : Taman Pustaka Kristen, 1986), hal. 43

umumnya terutama bagi golongan masyarakat kecil dalam rangka mengentaskan kemiskinan bagi perbaikan ekonomi rakyat.

Kelima, berdasarkan pada fungsi dan peranan dari koperasi dan BMT terlihat bahwa keduanya mempunyai dua fungsi. Fungsi tersebut adalah fungsi sosial dan fungsi ekonomi yang saling berkaitan. Sedangkan peranan kedua lembaga tersebut adalah sebagai motor penggerak perekonomian dengan mengembangkan dan membangun potensi serta kemampuan masyarakat lapisan bawah untuk mencapai perekonomian yang lebih baik. Bahkan koperasi dijadikan soko guru bagi perekonomian nasional.

Keenam, jika mengacu pada konsep mekanisme kerja antara koperasi dan BMT, akan ditemukan bahwa kedua lembaga ini diusahakan untuk bergerak pada tiga sektor, yaitu sektor jasa keuangan melalui simpan pinjam, sektor sosial dan sektor riil²⁰. Selain itu dalam alat kelengkapan organisasi koperasi dan BMT ditemukan adanya Dewan Pengawas. Dewan pengawas itu bertugas untuk mengendalikan dan mengawasi kedua lembaga itu. Tujuan pengendalian dan pengawasan ini adalah agar dalam kegiatannya sesuai dengan tujuan yang diharapkan serta dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan dan penyelewengan oleh pengurus di dalam pengelolaannya. Berdasarkan analisis ini, maka terdapat kesamaan

²⁰ Hertanto Widodo dkk, *PAS (Pedoman Akuntansi Syariah), Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil*, (Jakarta : Mizan, 1999), h. 84. Lihat juga Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, (Yogyakarta : BPFE, 1997), hal. 79-81

konsep antara koperasi dan BMT sehingga hal ini mendukung diadakannya koperasi sebagai badan hukum untuk BMT.

d. Tujuan Berdirinya BMT

- 1) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota *muamalat* dan daerah kerjanya.
- 2) Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- 3) Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Setelah itu BMT dapat melakukan penggalangan dan mobilisasi atas potensi tersebut sehingga mampu melahirkan nilai tambah kepada anggota dan masyarakat sekitar.
- 4) Menjadi perantara keuangan antara *aghiya* sebagai *shohibul maal* dengan *dhu'afa* sebagai *mudharib*, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, *shadaqah*, wakaf, hibah dan lain-lain. BMT dalam fungsi ini bertindak sebagai amil yang bertugas untuk menerima dana zakat, infaq, *shadaqah*, dan dana sosial lainnya dan untuk selanjutnya akan disalurkan kembali kepada golongan-golongan yang membutuhkannya.

5) Menjadi perantara keuangan, antara pemilik dana, baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif.²¹

e. Produk-produk BMT

Secara fungsional, praktek BMT sama dengan bank syariah pada umumnya. BMT juga menjadi penyandang dana bagi pengusaha kecil yang datang kepadanya untuk mengajukan permohonan dana. Jenis-jenis layanan melalui produk BMT pun tidak berbeda dari jenis layanan bank syariah. Untuk layanan pembiayaan ini, BMT menyediakan bentuk perjanjian *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Bai'bitsaman ajil*, dan *Ijarah*.²² Disamping itu, ada pembiayaan lainnya yang dikenal dengan *Al-qardun-hasan*. Produk pembiayaan itu juga menjadi produk pembiayaan bank syariah di Indonesia. Sejalan dengan itu, menurut Karnaen fungsi pokok operasional BMT dalam kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat, yaitu fungsi penggerakan dana (*Funding*) dan fungsi penyaluran dana (*financing*).²³

1. *Wadi'ah*

Wadi'ah adalah akad penitipan barang atau uang oleh pemilik kepada BMT untuk dipelihara dan dijaga dengan semestinya dan

²¹ www.bmtalfath.com, Kamis, 03 Juli 2008 17:38

²² Baihaqi Abdul Majid, *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistim Syari'ah: Perjalanan Gagasan dan Gerakan BMT* (Jakarta: PINBUK, 2000), hal.185. keterangan itu disampaikan oleh Amin Azi dalam buku tersebut dengan judul *Prospek BMT Berhadan Hukum Koperasi*.

²³ Karnaen A. Perwataadmaja, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, PT. Tiara Wacana, bekerja sama dengan P3EI UII Yogyakarta, 1992, hal. 129, baca juga Istar Abadi, et.al., *Pedoman Pengelolaan BMT*, Pustaka PKSP, Jakarta,.tt., hal. 25

mengembalikannya sewaktu-waktu oleh pemilik atau anggota dengan cara mengeluarkan surat berharga pemindahan atau transfer dan perintah pembayaran lainnya.²⁴

Berdasarkan pertanggungjawaban atas barang yang dititipkan, wadi'ah dibagi dua, yakni :

- a) *Wadi'ah Yad Amanah*, didasarkan pada akadnya saling percaya mempercayai, dengan demikian penerima amanah tidak mengganti jika tidak terjadi kerusakan barang yang dititipkan tersebut rusak atau hilang, kecuali ada unsur kelalaian di pihak amanah.
- b) *Wadi'ah Yad Dhamanah*, adakalanya barang yang dititipkan itu mendatangkan hasil dan tiadanya keharusan penerima amanah mengembalikan jika barang yang ditipkan rusak atau hilang.²⁵

BMT menggunakan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* dalam produk simpanannya, sehingga ia dapat menggunakan dana yang disimpan oleh nasabah untuk kegiatan produktif. Hal demikian juga mendatangkan keuntungan bagi nasabah, yakni bahwa nasabah dimungkinkan mendapatkan bonus yang besarnya tergantung pada kebijakan BMT dan tidak boleh diperjanjikan di muka. Melalui

²⁴ Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta, UII Press. 2000, hal. 18

²⁵ Imam Malik, al-Laits, Abu Yusuf dan sebagian *fuqaha'* menetapkan apabila penerima titipan menerima barang, maka keuntungan barang itu halal baginya, bila penerima titipan itu memakainya dan dikembalikan dalam keadaan seperti semula, maka ia perlu memberi imbalan. Tetapi jika ia mengembalikan barang lain, meskipun nilainya sama, ia harus mengembalikan sehubungan dengan pemakainya. Karena penerima amanah mempergunakan barang tersebut untuk mengambil manfaatnya, pihak penanggunglah yang harus bertanggungjawab atas kerusakannya. Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid, (terjemahan)*, jilid 4, (Jakarta; Pustaka Amani, 1995), hal. 469

simpanan *wadiah* nasabah BMT terhindar dari risiko kerugian, akan tetapi potensi penghasilan atau keuntungan yang akan diperoleh juga kecil karena sangat tergantung pada kebijakan dari BMT yang bersangkutan.

2. *Mudharabah*

Dalam pembiayaan bank syariah dan BMT, *mudharabah* merupakan suatu bentuk kerjasama usaha yang terjadi dengan satu pihak sebagai penyedia modal sepenuhnya dan pihak lainnya sebagai pengelola agar keduanya berbagi keuntungan menurut kesepakatan bersama dengan kesanggupan untuk menanggung resiko.²⁶ Bagian keuntungan yang disepakati itu harus berbentuk persentase (*nisbah*) dan yang berasal dari kesepakatan dari kedua belah pihak. Akan tetapi jika terjadi kerugian yang ditimbulkan dari resiko bisnis dan bukan gara-gara kelalaian pengusaha, maka pemilik modal akan menanggung kerugian modal itu seluruhnya (100%) dan pengusaha terkena kerugian dari kehilangan seluruh tenaga dan waktunya atau 0% modal.²⁷

Jenis *mudharabah* ada dua yang biasa di praktekkan di BMT, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah mutlaqah* ialah mudharabah yang tidak membatasi ruang lingkup, penempatan, atau dengan kata lain pengelola (*mudharib*) mendapatkan hak keleluasaan untuk mengelola dana. Sedangkan

²⁶ Tim pengembangan perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah (Jakarta: Djambatan, 2001, hal. 164-167.

²⁷ *Ibid*, hal. 168

mudharabah muqayyadah ialah *mudharabah* dengan pembatasan baik dalam hal jenis usaha yang akan dibiayai, jenis instrumen, resiko maupun pembatasan lain yang serupa.

3. *Musyarakah*

Musyarakah adalah kerja sama pemilik modal (bank) dengan pengelola yang masing-masing memberikan modalnya untuk mendapatkan keuntungan bersama melalui pembagian resiko. Jelas sekali bahwa perbedaan antara *mudharabah* dan *musyarakah* hanya terlihat pada keikutsertaan modal pengusaha yang kemudian memunculkan tuntutan menanggung kerugian sesuai dengan besaran permodalan masing-masing.

Musyarakah dikenali dalam 4 jenis, *syirkah 'inan*, *syirkah muwafadah*, *syirkah wujuh*, dan *syirkah abdan (a'mal)*. *Syirkah inan* terjadi bila mana masing-masing pihak yang bekerja sama, sama-sama menyertakan modalnya dan sama-sama bekerja akan tetapi ukuran keikutsertaannya tidak harus sama.

Syirkah muwafadah menghendaki persamaan dalam jumlah permodalan dan besarnya kerja semua pihak. *Syirkah wujuh* merupakan suatu kerja sama tanpa permodalan dari para mitra usaha melainkan berdasarkan pada nama baik atau reputasi seperti kejujuran dan kepribadiannya dalam berusaha dengan pembagian keuntungan menurut kesepakatan. *Syirkah abdan* adalah kerjasama dengan modal

profesi dan keahlian masing-masing. Dari semua jenis *syirkah*, hanya *syirkah inan* yang paling tepat dipakai dalam perbankan.²⁸

Ketentuan umum dalam akad *musyarakah* adalah sebagai berikut:²⁹

- a) Semua modal disatukan untuk menjadi modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama.
- b) Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana usaha.
- c) Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *musyarakah* dengan tidak boleh melakukan tindakan seperti; menggabungkan dana proyek dengan dana pribadi, menjalankan proyek dengan pihak lain tanpa seizin pemilik modal lainnya, memberi pinjaman kepada pihak lain.
- d) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.
- e) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama bila; menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia, menjadi tidak cakap hukum. Biaya yang timbul dari pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama dan proyek yang dijalankan harus disebutkan dalam akad.

²⁸ Tim pengembangan, hal. 184

²⁹ Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, (Yogyakarta; Ises Pulishing, 2008), hal. 152

4. *Murabahah*

Murabahah adalah jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.³⁰

5. *Bai'as salam*

Bai'as salam adalah akad jual beli *muslam fiih* (barang pesanan) dengan pengiriman di kemudian hari oleh *muslam illaihi* (penjual) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.³¹

Ketentuan umum dalam *bai'as salam* adalah :³²

- a) Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti, jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya.
- b) Apabila hasil produksi diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, anggota harus bertanggung jawab.
- c) Mengingat BMT tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan, maka BMT dimungkinkan melakukan akad *salam* dengan pihak ketiga.

6. *Bai' al istishna*

Bai' al istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan

³⁰ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: IIIT, 2003), hal. 180-185

³¹ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007)

³² Ahmad Sumiyanto, *Ibid.*, hal. 156

persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni*') dan penjual (pembuat, *shani*').³³ Pada dasarnya, pembiayaan *istishna* merupakan transaksi jual beli cicilan pula seperti transaksi *murabahah muajjal*. Namun, berbeda dengan jual beli *murabahah* di mana barang diserahkan di muka sedangkan uangnya dibayar cicilan, dalam jual beli *istishna* barang diserahkan di belakang, walaupun uangnya juga sama-sama dibayar secara cicilan.³⁴

7. *Ijarah*

Ijarah adalah perjanjian pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa ataupun upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.³⁵ Secara teknis mengenai penerapan akad *ijarah* di BMT dapat mengacu pada Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.

Terdapat pula istilah *Ijarah Muntahia Bit Tamlik* (IMBT), yang berarti transaksi sewa-menyewa yang memberikan hak opsi di akhir masa sewa bagi pihak penyewa untuk memiliki barang yang menjadi obyek sewa melalui mekanisme hibah ataupun melalui mekanisme beli.³⁶

³³ Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan syari'ah, Edisi Pertama, 2001, Fatwa No. 06/DSN – MUI/IV/2000 tentang jual beli *Istishna*.

³⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi ketiga, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 126

³⁵ *Ibid*, hal. 106

³⁶ Yanti Windyarti, Skripsi; *Persepsi Pedagang Kecil Di Pasar Kanjengan Terhadap Pembiayaan Mudharabah Bmt Bina Umat Sejahtera Semarang*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, 2007.

8. *Rahn*

Rahn adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya.³⁷ Dalam prakteknya, *rahn* dapat terjadi dua kemungkinan, *pertama* sebagai produk pelengkap dan *kedua* sebagai produk tersendiri. Sebagai produk pelengkap *rahn* hanya dijadikan alternatif pengikatan jaminan pada akad pembiayaan lain, misalnya pada kasus *murabahah*.

9. *Qordul Hasan*

Qordul hasan adalah peminjaman dana kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.

Qordul hasan biasanya diterapkan di BMT sebagai berikut :

- a) Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti *loyalitas* dan *bonafiditasnya* yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamkannya itu.
- b) Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya tersimpan dalam bentuk deposito.
- c) Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil, atau membantu sektor social.³⁸

³⁷ Ahmad Sumiyanto, hal. 159

³⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hal. 187

3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 106

Perkembangan perangkat hukum dan instrumen keuangan dalam lembaga perbankan syariah di Indonesia telah berkembang lebih cepat daripada lembaga keuangan syariah bukan bank, seperti asuransi, pegadaian dan lembaga keuangan syariah mikro. Beberapa lembaga inti yang terlihat dalam pengembangan lembaga keuangan ini sudah menyambut dengan baik, seperti dengan diterbitkannya berbagai Peraturan Bank Indonesia (PBI) oleh BI, berbagai fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Pernyataan Standar akuntansi keuangan (PSAK) Syariah oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Dikeluarkannya PSAK Syariah tahun 2007 merupakan suatu tuntutan yang tidak bisa dihindari karena PSAK sebelumnya (PSAK No.59) baru mengatur standar Akuntansi untuk perbankan syariah saja. PSAK yang terbaru ini (Nomor 101- 106) dimaksudkan untuk memberikan standar akuntansi keuangan yang bisa diterapkan pada semua *entitas* syariah, baik bank maupun lembaga keuangan komersial bukan bank (LKBB), seperti asuransi, reksadana dan pegadaian syariah. Dalam tahap ini, standar akuntansi yang diakomodir oleh PSAK Syariah adalah standard akuntansi terhadap transaksi-transaksi yang sudah banyak diterapkan di lembaga keuangan syariah, seperti *murabahah, salam, istisna, muddharabah, dan musyarakah*. Dengan diterapkannya pelaporan yang standar, maka akuntabilitas dan

kredibilitas lembaga keuangan syariah di Indonesia akan semakin terjaga dan meningkat.³⁹

Komite Akuntansi Syariah Dewan Standar Akuntansi Keuangan (KAS DSAK) menerbitkan enam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) bagi seluruh lembaga keuangan syariah (LKS).⁴⁰ Keenam PSAK itu adalah PSAK No 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, PSAK No 102 tentang Akuntansi *Murabahah* (Jual beli), PSAK No 103 tentang Akuntansi *Salam*, PSAK No 104 tentang Akuntansi *Isthisna*, PSAK No 105 tentang Akuntansi *Mudarabah* (Bagi hasil), dan PSAK No 106 tentang Akuntansi *Musyarakah* (Kemitraan).

Menurut Yusuf, keenam PSAK merupakan standar akuntansi yang mengatur seluruh transaksi keuangan syariah dari berbagai LKS. Dalam penyusunan keenam PSAK, KAS DSAK mendasarkan pada Pernyataan Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) Bank Indonesia. Selain itu, penyusunan keenam PSAK juga mendasarkan pada sejumlah fatwa akad keuangan syariah yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).⁴¹

³⁹ <http://accounting.uui.ac.id/index.php?option=com>, 10 November 2006, 10:12:54

⁴⁰ www.republika.com, 25 Maret 2009

⁴¹ <http://www.scribd.com/doc/4685462>, Kamis, 25 Juni 2009

Laporan keuangan dikatakan memiliki kualitas tinggi apabila memenuhi persyaratan kualitatif laporan keuangan yaitu mudah dipahami, andal, relevan, dan dapat diperbandingkan. Apabila suatu usaha yang berkepentingan dengan orang banyak mencatat dan melaporkan data keuangan seperti keinginannya sendiri, maka perbandingan diantara usaha sejenis akan sulit, bahkan tidak mungkin. Oleh karena itu, akuntan keuangan seharusnya mengikuti prinsip-prinsip yang berlaku umum (*generally accepted accounting principles* – *GAAP*) dalam membuat laporan. Laporan-laporan tersebut memungkinkan investor dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya untuk membandingkan usaha yang satu dengan yang lainnya.⁴²

Oleh karena itu, dalam dunia perbankan diperlukan praktik akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum,⁴³ sementara diluar itu bisa saja tanpa standar. Di Indonesia, hukum yang mengatur bagaimana mengukur/menilai mengolah dan mengkomunikasikan informasi akuntansi terdapat didalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan), yang berisi tentang prinsip akuntansi yang berlaku umum.⁴⁴ Prinsip akuntansi yang berlaku umum tidak hanya berisi tentang peinsip tetapi juga tentang konsep dan metode yang menunjukkan bagaimana cara yang tepat untuk menghasilkan informasi akuntansi. SAK dibuat berdasarkan kerangka pemikiran

⁴² Aria Farahmita dkk, *Akuntansi*, hal. 16

⁴³ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung; Remaja Rosda Karya, 2003), hal.

⁴⁴ Thomas H. Secokusumo, *Akuntansi*, hal. 7

konseptual oleh Komite Prinsip Akuntansi Indonesia dari IAI, sedangkan untuk hal-hal yang bersifat khusus digunakan Pernyataan Standar Akuntansi keuangan (PSAK).

Kinerja suatu perusahaan dan lembaga keuangan merupakan hasil dari serangkaian proses dengan mengorbankan berbagai sumber daya, dan laporan keuangan (*financial statement*) merupakan sarana untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh manajemen atas sumber daya pemilik. Untuk bisa mencapai kepada laporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan harus melewati proses yang bertanggungjawab pula. Proses itu harus mengacu pada standar akuntansi keuangan yang sesuai dengan jenis operasinya masing-masing.

Berkaitan dengan standar, Edey seperti yang dikutip Muhammad menyatakan bahwa ketentuan yang terdapat dalam standar bertujuan untuk :⁴⁵

- 1) Mengharuskan akuntan untuk menginformasikan apa yang dilakukan dengan mengungkapkan metode dan kebijakan akuntansi yang digunakan.
- 2) Mendorong tercapainya keseragaman (*uniformity*) penyajian laporan keuangan.
- 3) Mendorong diungkapkannya hal-hal spesifik yang pengguna informasi mungkin memerlukannya untuk pengambilan keputusan.

⁴⁵ Edey dalam Muhamad, *Penagntar Akuntansi Syari'ah*, Edisi 2, (Jakarta; Salemba Empat, 2005), hal. 201

- 4) Mensyaratkan diungkapkannya keputusan *eksplisit* dan *implisit* tentang penilaian *asset* yang disetujui dan tentang penentuan pendapatan.
- b. Definisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106 Akuntansi *Musyarakah*

Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini;⁴⁶ *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah. *Musyarakah* permanen adalah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. *Musyarakah* menurun (*musyarakah mutanaqisha*) adalah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut. Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha *musyarakah*, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut. Mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha *musyarakah*.

⁴⁶ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, (Jakarta; Salemba Empat, 2007), PSAK No. 106, paragraf 4

c. Pengakuan dan Pengukuran

Untuk pertanggung jawaban pengelolaan usaha *musyarakah* dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha *musyarakah* harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha *musyarakah* tersebut.⁴⁷

Pengakuan dan pengukuran untuk akuntansi mitra aktif adalah sebagai berikut :

- 1) Investasi *musyarakah* diakui pada saat penyerahan kas atau aset nonkas untuk usaha *musyarakah*.
- 2) Pengukuran investasi *musyarakah*;
 - Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan
 - Dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset *musyarakah* dalam ekuitas. Selisih penilaian aset *musyarakah* tersebut diamortisasi selama masa akad *musyarakah*.
- 3) Aset non kas *musyarakah* yang telah dinilai wajar disesuaikan dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan;
 - Penyusutan yang dihitung dengan model biaya historis, ditambah dengan
 - Penyusutan atas kenaikan nilai aset nonkas untuk usaha *musyarakah*.

⁴⁷ *Ibid*, paragraf 13

- 4) Jika proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan penurunan nilai aset, maka penurunan nilai ini langsung diakui sebagai kerugian. Aset nonkas musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan berdasarkan nilai wajar yang baru.
- 5) Biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra *musyarakah*.
- 6) Penerimaan dana *musyarakah* dari mitra pasif (misalnya, bank syariah diakui sebagai investasi *musyarakah* dan disisi lain sebagai dana *syirkah* temporer sebesar;
- Dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima
 - Dana dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis jika aset tersebut tidak akan dikembalikan kepada mitra pasif.

Pada selama masa akad bagian mitra aktif atas investasi *musyarakah* dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar jumlah kas yang diserahkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada). Bagian mitra aktif atas investasi *musyarakah* menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diserahkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad ditambah dengan jumlah dana

syirkah temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif, dan dikurangi kerugian (jika ada).

Pada akhir akad akuntansi mitra aktif adalah pada saat akad diakhiri, investasi *musyarakah* yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban.⁴⁸

Untuk pengakuan hasil usaha pendapatan usaha *musyarakah* yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha *musyarakah*. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban. Kerugian investasi *musyarakah* diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset *musyarakah*. Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha *musyarakah*.

Pengakuan dan pengukuran akuntansi untuk mitra pasif pada saat akad adalah sebagai berikut;

- 1) Investasi *musyarakah* diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif
- 2) Pengukuran investasi *musyarakah*;

⁴⁸ *Ibid*, paragraf 22

- Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan
 - Dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan tengguhan dan diamortisasi selama masa akad atau kerugian pada saat terjadinya.
- 3) Infestasi *musyarakah* nonkas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan, dikurangi dengan amortisasi keuntungan tengguhan (jika ada)
- 4) Biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra.

Pada saat selama akad berlangsung pengakuan akuntansinya adalah sebagai berikut;

- 1) Bagian mitra aktif atas investasi *musyarakah* dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar:
- Jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada) atau,

- Nilai wajar aset *musyarakah* nonkas pada saat penyerahan untuk usaha *musyarakah* setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).
- 2) Bagian mitra pasif atas investasi *musyarakah* menurun dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (jika ada).

Pada saat akhir akad investasi *musyarakah* yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang. Dan akuntansi pengakuan hasil usaha pada mitra pasif yaitu pendapatan usaha investasi *musyarakah* diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi *musyarakah* diakui sesuai dengan porsi dana.⁴⁹

d. Penyajian

Mitra aktif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha *musyarakah* dalam laporan keuangan;⁵⁰

- 1) Kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi *musyarakah*,
- 2) Aset *musyarakah* yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana *syirkah* temporer,

⁴⁹ *Ibid*, paragraf 34

⁵⁰ *Ibid*, paragraf 35

- 3) Untuk selisih penilaian aset *musyarakah*, bila ada, disajikan sebagai unsur ekuitas.

Mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha *musyarakah* dalam laporan keuangan;⁵¹

1. Kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi *musyarakah*,
2. Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan dari investasi *musyarakah*.

c. Pengungkapan

Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi *musyarakah*, tetapi tidak terbatas, pada;

1. Isi kesepakatan utama usaha *musyarakah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *musyarakah*, dan lain-lain.
2. Mengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif, dan
3. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

⁵¹ *Ibid*, paragraf 36

4. Pemahaman

a. Pengertian Pemahaman

Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya mengerti benar dalam suatu hal.⁵² Pemahaman diartikan suatu titik temu antara dua pola yang terdapat didalam diri manusia yaitu pola akal dan pola rasa.⁵³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia⁵⁴, paham berarti pengertian, pendapat/pikiran, aliran, haluan, pandangan, mengerti benar (akan); tahu benar (akan); pandai dan mengerti benar (tentang suatu hal). Memahami berarti mengerti benar (akan); mengetahui benar; memaklumi/mengetahui. Sedangkan pemahaman berarti proses pembuatan; cara memahami atau memahamkan.

Cara belajar yang berdasarkan suatu pemahaman dapat dikategorikan atau dikatakan sebagai cara belajar yang tidak mengingat akan tetapi mengingat tapi dengan suatu aplikasi . seperti contoh : didalam tubuh manusia terdapat berbagai macam unsur ataupun elemen yang bersifat *komprehensif*, *kompleks* dan mutlak sebagai suatu kesatuan dan tak dapat dipisah – pisahkan , akan tetapi seorang itu tadi terkadang juga lupa akan apa yang ia miliki didalam dirinya sendiri sedangkan suatu ketika

⁵² WJS. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, tt, hal. 694

⁵³ <http://mr-perspektif.blog.friendster.com/2007/07/pemahaman>, 26 Mei 2004

⁵⁴ Tim Penyusun Kamus pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 2 cet 9, (Jakarta; Balai Pustaka, 1997)

terjadi sesuatu permasalahan baik itu yang berasal / disebabkan oleh faktor dari dalam maupun dari luar pada si orang itu sendiri maka dengan segeralah ia mencari jalan keluarnya baik itu dengan usaha pemikirannya maupun lewat perasaannya.

b. Proses Menuju Pemahaman

Untuk mencapai suatu pemahaman, pada saat berproses mencari jalan keluar dari suatu permasalahan pada saat itu juga ada suatu proses pembelajaran dengan jalan berdasarkan memahami hingga akhirnya akan menjadi suatu pemahaman, dan kelak dari proses tersebut akan ditemukan suatu persoalan yang lainnya lagi pada akhirnya suatu proses pembelajaran dengan pemahaman sudah mendarah daging, dan akan muncul tanpa perlu dihapal dan diingat setiap saat .

Dari gambaran singkat tentang pemahaman tersebut, perlu adanya aspek psikologi yang mendasari terjadinya proses suatu pemahaman. Aspek psikologi yang terpenting adalah aspek *kognitif* (kejiwaan). Istilah "*cognitive*" berasal dari kata *cognition* yang berarti mengetahui. Menurut Neisser (1976) seperti dikutip Syah, dalam arti yang luas, *kognisi* adalah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah kognitif menjadi populer sebagai satu domain atau/ranah psikologi manusia yang meliputi setiap perilaku mental yang

berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesengajaan, dan keyakinan.⁵⁵

Aspek *kognitif* yang berkedudukan di otak ini adalah sumber sekaligus pengendali aspek-aspek kejiwaan lainnya, yakni aspek efektif (rasa) dan aspek *psikomotor* (karsa). Tanpa aspek kognitif yang memadai, maka seorang siswa akan kesulitan untuk berfikir yang mendalam. Selanjutnya, tanpa kemampuan berfikir mustahil ia dapat memahami dan meyakini faidah materi-materi pelajaran yang disajikan kepadanya.⁵⁶

Menurut Jarolimek dan Foster (1981,148) yang dikutip Dimiyati dan Mujiono, menyatakan bahwa tujuan ranah kognitif berhubungan dengan ingatan atau pengenalan terhadap pengetahuan dan informasi, serta pengembangan keterampilan intelektual.⁵⁷ Sedangkan *taksonomi* atau penggolongan tujuan ranah *kognitif* oleh Bloom, mengemukakan adanya 6 (enam) kelas/tingkat yaitu;

- 1) Pengetahuan, merupakan tingkat terendah ranah kognitif berupa pengenalan dan pengingatan kembali berupa pengetahuan tentang fakta, istilah dan prinsip-prinsip.⁵⁸ Dalam

⁵⁵ Muhibbin syah, *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*, ad. Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), hal.66

⁵⁶ *Ibid*, hal. 83

⁵⁷ Dimiyati dan Mudjiono, *Belajar dan Pembelajaran*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 202

⁵⁸ Ivor K. Davies, *Pengelolaan Belajar*, dalam Dimiyati dan Mudjiono, hal. 202

pengenalan, siswa diminta untuk memilih salah satu dari dua atau lebih pilihan jawaban. Sedangkan untuk pengingatan kembali siswa diminta untuk mengingat kembali satu atau lebih fakta yang sederhana.⁵⁹

- 2) Pemahaman, merupakan tingkat berikutnya dari tujuan ranah *kognitif* berupa kemampuan memahami/mengerti tentang isi pelajaran lainnya.⁶⁰ Dalam pemahaman, siswa diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami hubungan yang sederhana diantara fakta-fakta atau konsep.⁶¹
- 3) Penggunaan/Penerapan, merupakan kemampuan menggunakan generalisasi atau abstraksi lainnya yang sesuai dalam situasi konkrit dan/atau situasi baru.⁶² Untuk penggunaan/penerapan siswa dituntut untuk memiliki kemampuan untuk menyeleksi atau memilih generalisasi/abstraksi tertentu (konsep, hukum, dalil, aturan, gagasan, cara) secara tepat untuk diterapkan dalam suatu situasi baru dan menerapkannya secara benar.⁶³
- 4) Analisis, merupakan kemampuan menjabarkan isi pelajaran ke bagian-bagian yang menjadi unsur pokok. Untuk analisis ini,

⁵⁹ Suharsismi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluas Pendidikan*, (Jakarta : Bumi Akasara, 1990), hal. 113

⁶⁰ Ivor K. Davies, *Pengelolaan*, hal.203

⁶¹ Suharsimi, *Dasar-dasar*, hal. 113

⁶² Ivor K. Davies *Pengelolaan*, hal. 202

⁶³ Suharsimi, *Dasar-dasar*, hal. 114

siswa diminta untuk menganalisis hubungan atau situasi yang kompleks atau konsep-konsep dasar.⁶⁴

- 5) Sintesis, merupakan penggabungan unsur-unsur pokok kedalam struktur yang baru.⁶⁵ Dalam sintesis ini siswa diminta untuk melakukan generalisasi.⁶⁶
- 6) Evaluasi, merupakan kemampuan menilai isi pelajaran untuk suatu maksud atau tujuan tertentu.⁶⁷ Dalam evaluasi, siswa diminta untuk menerapkan pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki untuk menilai suatu kasus.⁶⁸

Menurut Makmun, sesuai dengan penggolongan perilaku menurut Bloom, pemahaman merupakan salah satu jenis hasil belajar dalam *term* kawasan *kognitif*.⁶⁹ Indikator dari pemahaman ini adalah dapat menjelaskan atau mendefinisikan dengan kata-kata sendiri, dan kemungkinan alat/instrumen pengukurannya adalah menggunakan pertanyaan/soal/tes/tugas. Untuk

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ Ivor K. Davies *Pengelolaan*, hal. 202

⁶⁶ Suharsimi, *Dasar-dasar*, hal. 115

⁶⁷ Ivor K. Davies *Pengelolaan*, hal. 202

⁶⁸ Suharsimi, *Dasar-dasar*, hal. 115

⁶⁹ Abin Syamsuddin Makmun, *Psikologi pendidikan Perangkat Sistem Pengajaran Modal*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 167

mengungkapkan aspek *kognitif* untuk meningkatkan pemahaman sampai aplikasinya, tes objektif akan lebih ampuh.⁷⁰

Dari definisi diatas dapat dimaklumi bahwa untuk menuju kepada suatu pemahaman, seseorang membutuhkan adanya proses yang berawal dari informasi – informasi yang diterima dan kemudian diolah sehingga diperoleh hasil. Proses tersebut adalah proses belajar, dan pemahaman merupakan hasil belajar.

Dalam psikologi belajar, proses berarti cara-cara atau langkah khusus yang dengannya perubahan ditimbulkan hingga tercapainya hasil-hasil tertentu. Jadi, proses belajar dapat diartikan sebagai tahapan perilaku kognitif, efektif dan psikomotor yang terjadi dalam diri siswa. Perubahan tersebut bersifat positif dalam arti berorientasi kearah yang lebih maju dari pada keadaan sebelumnya.

Pemahaman merupakan hasil dari aktifitas yang diproses. Jadi didalamnya terjadi perubahan-perubahan yang bertahap. Perubahan-perubahan tersebut timbul melalui fase-fase yang antara satu dengan lainnya bertalian secara berurutan dan fungsional.

Menurut Jerome S. Bruner seperti yang dikutip Nasution menyatakan bahwa dalam proses untuk memperoleh pemahaman dapat dibedakan menjadi tiga fase atau episode, yaitu;⁷¹

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ S. Nasution, *Berbagi Pendekatan dalam Proses Belajar dan Mengajar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hal. 9

- 1) Informasi. Setiap informasi yang diperoleh seseorang, ada yang menambah pengetahuan yang dimiliki, ada yang memperhalus dan memperdalamnya, ada pula informasi yang bertentangan dengan apa yang telah diketahui.
- 2) Transformasi. Informasi-informasi yang sampai kepada seseorang tersebut harus dianalisis, diubah atau ditransformasi kedalam bentuk yang lebih abstrak atau konseptual agar dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih luas.
- 3) Evaluasi. Kemudian dinilai sampai manakah pengetahuan yang diperoleh dan transformasi itu dapat dimanfaatkan untuk memahami gejala lain atau memecahkan masalah yang dihadapi.

Sedangkan menurut Halim, setidaknya ada lima prosedur yang dapat digunakan untuk memperoleh pemahaman, yaitu: ⁷²

- 1) Menelaah pengalaman sebelumnya
- 2) Mengajukan pertanyaan kepada praktisi
- 3) Menginspeksi dokumen dan catatan
- 4) Mengamati kegiatan dan operasi entitas
- 5) Mempelajari buku manual prosedur dan kebijakan akuntansinya.

Jika dikaitkan dengan penelitian ini maka, yang dimaksud dengan pemahaman tentang PSAK 106 adalah mengetahui dan

⁷² Abdul Halim, *Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*, ed. 3, (Yogyakarta ; UPP AMP YKPN , 2003), hal. 215

mengerti benar akan PSAK 106. Paham dalam arti mengetahui tentang definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan akuntansi *musyarakah*. Pemahaman tersebut meliputi pemahaman secara teori dan praktek. Dan itu semua dapat dibuktikan dengan praktisi mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang akuntan dalam mencatat suatu akad transaksi *musyarakah* secara baik dan benar sesuai PSAK No. 106.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

1. Usia

Umur atau usia adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu benda atau makhluk, baik yang hidup maupun yang mati. Semisal, umur manusia dikatakan lima belas tahun diukur sejak dia lahir hingga waktu umur itu dihitung.⁷³

Usia seseorang yang tergolong lanjut ataupun yang terlalu dini untuk mengikuti suatu materi pembelajaran dapat mengurangi kualitas ranah cipta (kognitif) sehingga materi yang dipelajarinya pun kurang atau tidak berbekas.

Selain itu semakin meningkatnya usia seseorang, kemampuan mendengarkannya semakin berkurang. Pada usia sekitar 20an tahun seseorang dapat mendengarkan dari sumber

⁷³ <http://id.wikipedia.org/wiki/Umur>, Tanggal 14 Nov 2009

suara antara 8 sampai 10 meter. Setelah menginjak usia 40-an ia hanya dapat mendengarkan dari jarak sekitar 5 meter.⁸⁹

Sebagaimana kemampuan mendengarkan, semakin meningkat usia seseorang kemampuan melihatnya semakin berkurang. Bila diukur dengan kemampuan cahaya, maka untuk usia sekitar 20-an tahun ruangan memerlukan cahaya hanya sekitar 40 watt, dan untuk usia sekitar 40-an tahun membutuhkan sekitar 60 sampai 100 watt. Apabila kurang dari kapasitas tersebut, maka penglihatannya hanya terganggu.⁷⁴

Akan tetapi, disisi lain dengan bertambahnya usia seseorang maka semakin banyak pula pengalaman yang diterimanya, termasuk kegagalan-kegagalan dan keberhasilan-keberhasilan, juga berbagai macam tantangan dapat lebih bijaksana dan hati-hati dalam mengambil suatu keputusan.

Dari paparan diatas usia seseorang akan mempengaruhi kemampuannya memahami sesuatu.

2. Latar belakang pendidikan

Latar belakang pendidikan seseorang juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman. Seseorang yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi akan lebih cepat menguasai bidangnya. Strauss dan Sayless menyatakan bahwa pekerjaan yang mudah dan sederhana dapat terselesaikan secara

⁷⁴ Rosjidan, dkk, *Belajar dan Pembelajaran*, (Malang: FIP Universitas Negeri Malang, 2001), hal. 10

otomatis tanpa berpikir lagi yang berarti untuk berhasil menyelesaikan tanpa membutuhkan perencanaan, analisis maupun penguasaan teori sehingga karyawan yang berpendidikan tinggi biasanya lebih banyak menuntut pada diri sendiri maupun pada pihak perusahaan.⁷⁵

Dengan pendidikan yang lebih tinggi, ilmu pengetahuan dan pengalaman yang di serap semakin luas, ilmu teori dan praktek-praktek lebih banyak di kuasai dan kecerdasan atau intelegensi akan lebih berkembang dengan lebih baik, sehingga pencapaian kedewasaan lebih matang dan sempurna serta mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi, sehingga bagi BMT lebih mudah dalam memberikan bimbingan dan pelatihan atau training.

3. Lama bekerja

Selain usia, dan latar belakang pendidikan, lama seseorang bekerja juga mempengaruhi pemahaman suatu masalah. Orang yang sudah lama bekerja dalam bidang tertentu, tentunya akan mempunyai pemikiran dan pemahaman yang lebih baik.⁷⁶

Semakin lama masa kerja seseorang akan semakin tinggi komitmen dalam bekerja. Karyawan yang sudah lama

⁷⁵ <http://www.masbow.com/2009/11/komitmen-karyawan-pada-perusahaan.html>, Tanggal 15 Nov 2009

⁷⁶ Eni Iroh Hayati, *Pemahaman Praktisi BMT Di Yogyakarta Terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK NO. 59) Akuntansi Perbankan Syari'ah Produk Funding*, Tesis MSI UII Yogyakarta

bekerja, sudah terbiasa dengan kondisi dan iklim tempat ia bekerja, ia akan merasa menjadi bagian dari perusahaan tersebut setelah melalui bertahun-tahun bekerja di perusahaannya. Apabila mengalami hambatan atau tekanan-tekanan, maka karyawan dengan masa kerja yang lebih lama akan lebih kuat bertahan dibandingkan karyawan baru yang belum banyak terlibat dalam organisasinya.

4. Frekuensi mengikuti pelatihan

Pelatihan merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja karyawan.⁷⁷ Berkaitan dengan itu dijelaskan juga dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang No. 13 tahun 2003.⁷⁸ Pelatihan terdiri atas serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian, pengetahuan, pengalaman, ataupun perubahan sikap seseorang.

Tujuan pelatihan pada intinya adalah untuk :⁷⁹

- a. Memperbaiki kinerja
- b. Memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi.

⁷⁷ Henri Simamora, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta; STIE YKPN, 2006), hal. 273

⁷⁸ Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk member, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang kualifikasi jabatan dan pekerjaan. Lihat, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (berlaku efektif 25 Maret 2003)

⁷⁹ Simamora, *Ibid*, hal. 277

- c. Mengurangi waktu pembelajaran bagi karyawan baru agar kompeten dalam pekerjaan.
- d. Membantu memecahkan masalah operasional.
- e. Mempersiapkan karyawan untuk promosi.
- f. Mengorientasikan karyawan terhadap organisasi.
- g. Memenuhi kebutuhan pertumbuhan pribadi.

Untuk mencapai tujuan tersebut jenis-jenis pelatihan yang biasanya digunakan adalah sebagai berikut:⁸⁰

- a. Pelatihan keahlian, program pelatihan yang kebutuhan atau kekurangan diidentifikasi melalui penilaian yang jeli.
- b. Pelatihan ulang adalah subyek pelatihan keahlian. Pelatihan ulang berupaya memberikan kepada para karyawan keahlian-keahlian yang mereka butuhkan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah.
- c. Pelatihan lintas fungsional, pelatihan ini melibatkan pelatihan karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain pekerjaan yang ditugaskan.
- d. Pelatihan tim, pelatihan sekelompok individu yang bekerja sama demi mencapai tujuan bersama.
- e. Pelatihan kreativitas, pelatihan ini berlandaskan pada asumsi bahwa kreativitas dapat dipelajari.

Dapat dipahami bahwa, pelatihan merupakan penciptaan suatu lingkungan dimana kalangan karyawan dapat memperoleh dan mempelajari sikap, kemampuan, keahlian,

⁸⁰ *Ibid.*, hal. 279

pengetahuan, dan perilaku spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan. Pelatihan merupakan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian, pengetahuan, pengalaman ataupun perubahan sikap seorang individu.

B. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini kerangka berpikirnya beranjak dari fenomena menjamurnya lembaga keuangan syari'ah yaitu BMT. Selanjutnya, dalam BMT tersebut terdapat banyak produk yang ditawarkan, salah satunya adalah produk *musyarakah*. Berkaitan dengan itu pemahaman praktisi BMT sangat diperlukan, karena secara tidak langsung ini akan berpengaruh dengan kebijakan dan juga teknik akuntansinya.⁸¹

Berhubungan dengan penelitian ini tentang pemahaman, Karsudin⁸² berkesimpulan dalam skripsinya bahwa, ada pengaruh yang cukup signifikan antara variabel pelatihan dan pemahaman konsep-konsep syari'ah. Hal tersebut juga didukung dengan skripsi Mahyudi,⁸³ tentang pemahaman santri terhadap *fiqh mua'amalah*, ternyata tingkat

⁸¹ Kebijakan akuntansi berkaitan dengan dasar yang dipakai oleh BMT dalam melakukan penyusunan laporan keuangan. Didalamnya meliputi definisi, penyajian, pengakuan dan pengukuran, serta pengungkapan.

⁸² Mohammad Karsudin, *Pengaruh Pelatihan Perbankan Syari'ah Terhadap Pemahaman Konsep-konsep Syari'ah Pada Para Pegawai Bank Syari'ah di Yogyakarta*, (Yogyakarta; STIS, 2008)

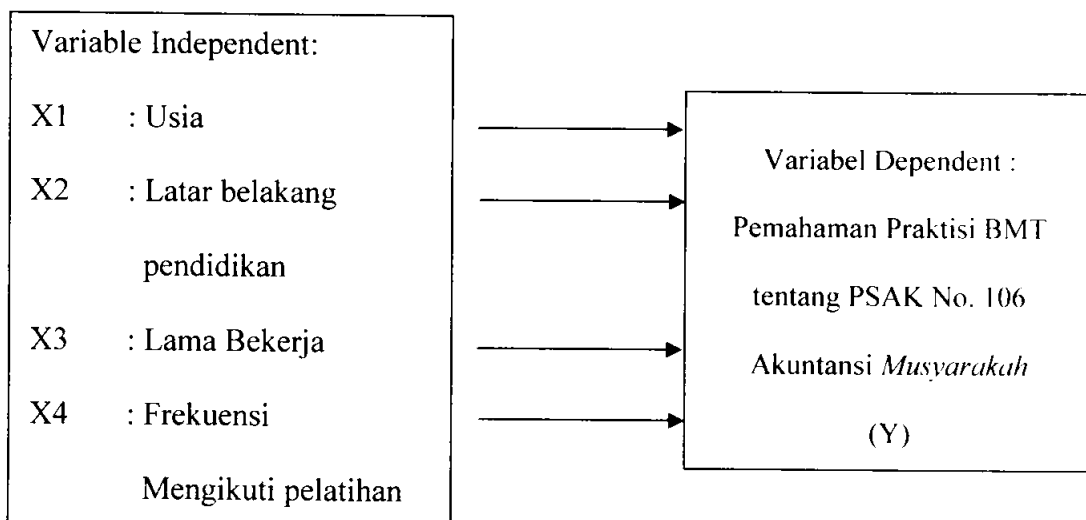
⁸³ Mahyudi Al Rasyid, *Pengaruh Pemahaman fiqh Mu'amalah dan Religiusitas Santri Terhadap Sikapnya Pada Bank Syari'ah; Studi Kasus Pada Santri Pondok Pesantren Sunan Pandan Arang*, (Yogyakarta; STIS, 2003)

pemahaman mereka pada tingkat sedang, yang mempengaruhi sikap respon santri kepada Bank Syari'ah yang juga dalam taraf cukup baik.

Merujuk pada konsep pemahaman praktisi BMT, yang akan diangkat dalam penelitian ini, pemahaman praktisi BMT biasanya dipengaruhi oleh usia, lamanya bekerja, latar belakang pendidikan, dan frekuensi mengikuti pelatihan. Pada penelitian sebelumnya tentang pemahaman praktisi terhadap PSAK 59 produk *funding* menyimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara usia, lamanya bekerja, latar belakang pendidikan, dan frekuensi mengikuti pelatihan dengan pemahaman praktisi BMT.⁸⁴ Meski demikian, untuk mengetahui apakah usia, lamanya bekerja, latar belakang pendidikan, dan frekuensi mengikuti pelatihan dengan pemahaman praktisi BMT terhadap PSAK No. 106 Akuntansi Musyarakah, perlu dilakukan suatu penelitian.

Berhubungan dengan hal tersebut diatas, secara konseptual, ada dua variabel yang akan dihubungkan dalam penelitian ini, yaitu *variable dependen* (Pemahaman praktisi tentang PSAK No. 106 akuntansi *musyarakah*) dan variabel *independen* (diukur menggunakan; usia, latar belakang pendidikan, lama bekerja, dan frekuensi mengikuti pelatihan).

⁸⁴ Eni Iroh Hayati, *Pemahaman Praktisi BMT Di Yogyakarta Terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK NO. 59) Akuntansi Perbankan Syari'ah Produk Funding*, Tesis MSI UII Yogyakarta



C. Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan asumsi sementara penyusun yang bersifat teori, kebenarannya perlu diuji dan dibuktikan melalui riset yang berkenaan dengan topik permasalahan yang akan dikembangkan dalam penelitian ini sehingga tujuan penelitian ini dapat tercapai. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah “ada perbedaan pemahaman praktisi BMT tentang PSAK No. 106 Akuntansi *Musyarakah* dilihat dari usia, latar belakang pendidikan, lama bekerja di BMT dan frekuensi mengikuti pelatihan terhadap pemahaman”.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif,¹ yaitu suatu penelitian yang di maksudkan untuk pengukuran suatu fenomena sosial tertentu. Untuk mendapatkan data opini individu, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data survey. Sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survey. Adapun pengertian survey adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.²

Jika dilihat dari satu tempat atau latar belakang dimana seorang peneliti melakukan penelitian maka penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian lapangan, yaitu penelitian yang lokasi penelitiannya berada di tengah masyarakat atau kelompok manusia tertentu sebagai latar dimana peneliti melakukan penelitian.³ Selain itu penelitian ini juga berusaha menggambarkan atau menunjukkan adanya perhubungan (korelasi) antara

¹ Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena social tertentu. Lebih lanjut lihat Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta : LP3ES, 1989) hal. 4

² *Ibid*, hal. 3

³ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, cet. 1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hal. 18

variabel-variabel atau memberi gambaran sejauh mana dua atau lebih variabel kuantitatif berhubungan yang ditunjukkan dengan angka *koefisien korelasi*.⁴

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *sosiologis empiris*. Pendekatan *sosiologis empiris* yaitu suatu pendekatan yang berupaya melihat dan menjelaskan sikap dan tingkah laku suatu masyarakat, dengan menggunakan data yang bersifat empiris.

Dalam hal ini yang akan dijelaskan adalah pemahaman praktisi BMT terhadap PSAK 106 Akuntansi *Musyarakah*, dalam hal ini dikaitkan dengan usia, latar belakang pendidikan, lama bekerja, dan frekuensi mengikuti pelatihan. Sehingga tercapailah suatu kesimpulan bahwa ada perbedaan pemahaman tingkat pemahaman seorang karyawan BMT tentang PSAK 106 Akuntansi *Musyarakah* jika dilihat dari usia, latar belakang pendidikan, lama bekerja dan frekuensi mengikuti pelatihan.

C. Jenis Analisis Penelitian

Untuk memperoleh gambaran yang sesuai mengenai pemahaman praktisi BMT terhadap PSAK No. 106 Akuntansi Musyarakah iu sendiri, penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Analisis kuantitatif merupakan analisis yang menggunakan pendekatan angka atau bilangan. *Quantity* berarti banyaknya jumlah benda. Untuk mengetahui jumlah harus menggunakan angka-angka sebagai simbol bilangan. Alat yang lazim

⁴ Soehardi Sigit, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial Bisnis Manajemen*, (Yogyakarta, Lukman Offset, 1999), hal 99

digunakan adalah statistika. Statistika digunakan untuk menguji apakah hipotesis yang dirumuskan dapat diterima atau ditolak.

Berkaitan dengan analisa kuantitatif, format yang digunakan dalam penelitian kuantitatif ini menggunakan format *eksplanasi*. Dimaksudkan untuk menjelaskan suatu genarisasi sampel terhadap populasinya atau menjelaskan hubungan, perbedaan atau pengaruh satu variabel dengan variabel yang lain.⁵ Oleh karena itu penelitian *eksplanasi* menggunakan sampel dan hipotesis. Sehingga, format *eksplanasi* memiliki kredibilitas untuk mengukur, menguji hubungan sebab-akibat dari dua atau beberapa variabel dengan menggunakan analisis statistik. Semua itu dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan dari hipotesis bahwa ada hubungan antara usia, lama bekerja, tingkat pendidikan, dan frekuensi mengikuti pelatihan dengan pemahaman praktisi BMT di Lampung terhadap PSAK No. 106 Akuntansi *Musyarakah*.

D. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah Provinsi Lampung. Dipilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan Lampung sebagai Provinsi yang sedang berkembang dan mempunyai sumber daya manusia yang cukup baik serta ditunjang dengan sumber daya alam yang melimpah, sehingga untuk lahan investasi masih sangat memadai. Oleh karena itu diharapkan praktisi BMT mempunyai pemahaman yang luas tentang akuntansi *muyarakah* yang itu akan menjadi salah satu daya tarik investor untuk melakukan akad *musyarakah* di BMT.

⁵ *Ibid*, hal. 38

E. Subyek Penelitian

Sumber data dalam penelitian merupakan subyek dari mana data dapat diteliti.⁶ Karena dalam penelitian ini digunakan kuesioner dalam pengumpulan datanya, maka sumber datanya disebut responden, yaitu orang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, berupa pertanyaan tertulis. Selanjutnya, yang dimaksud responden dalam penelitian ini adalah praktisi BMT yang terdiri dari manajer BMT dan staf pelaksana akuntansinya (*accounting*). Jadi untuk satu BMT yang terpilih menjadi sampel akan disebarakan dua kuesioner yang akan diisi oleh manajer dan staf pelaksana akuntansinya.

F. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek maupun subjek yang berkuantitas dan bekarakteristik tertentu yang diambil oleh peneliti untuk diambil kesimpulannya.⁷ Menurut Saifuddin Azwar, populasi adalah kelompok subyek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian.⁸

Dengan demikian maka yang dimaksud dengan populasi mencakup keseluruhan subyek yang diteliti dengan ciri-ciri, sifat atau karakteristik tertentu. Dan dalam penelitian ini, populasi adalah meliputi seluruh praktisi BMT di Provinsi Lampung.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Cet.III, (Jakarta:Bina Aksara,1986), hal.102.

⁷ Sugiono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung : Alfabeta, 2005), hlm. 79

⁸ Saifuddin Azwar, *Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 77. Lihat juga Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998)

Dalam penelitian ini populasinya adalah BMT yang berada di Provinsi Lampung. Akan tetapi karena banyaknya jumlah BMT yang tersebar di 12 Kabupaten dan 2 Kota Madya di Provinsi Lampung yaitu sekitar 200 BMT, maka dibatasi populasinya hanya pada BMT yang menjadi anggota Puskopsyah (Pusat Koperasi Syariah) saja. Data dalam penelitian ini adalah BMT yang menjadi anggota Puskopsyah yang juga tersebar di daerah-daerah di Provinsi Lampung yang berjumlah 42 BMT. Seperti pada tabel dibawah ini:

Table.3.1. Jumlah BMT Anggota Puskopsyah Lampung

No.	Populasi	Jumlah BMT
1.	Kota Madya Bandar Lampung	1
2.	Kota Madya Metro	6
3.	Kabupaten Lampung Selatan	4
4.	Kabupaten Lampung Utara	1
5.	Kabupaten Lampung Tengah	8
6.	Kabupaten Lampung Timur	13
7.	Kabupaten Lampung Barat	0
8.	Kabupaten Pringsewu	1
9.	Kabupaten Pesawaran	0
10.	Kabupaten Tulang Bawang	4
11.	Kabupaten Tulang Bawang Barat	3
12.	Kabupaten Way Kanan	0
13.	Kabupaten Tanggamus	1
14.	Kabupaten Mesuji	0
	Jumlah	42

Sumber : Puskopsyah BMT Sejahtera Lampung, 5 Oktober 2009

Adapun daftar nama dan alamat BMT yang menjadi anggota Puskopsyah untuk masing-masing daerah tersebut dapat dilihat pada lampiran. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang ciri-ciri atau karakteristiknya sama, yang hendak diselidiki dan bisa dianggap mewakili populasi (sejumlah individu yang jumlahnya kurang dari populasi).⁹ Sampel

⁹ Djarwanto PS dan Pangestu Subagyo, *Statistik Induktif*, Edisi III, (Yogyakarta : BPFE, 1985), hal. 95

menggunakan gambaran dari populasi yang sesungguhnya, sehingga pengambilan sampel harus memperhatikan ciri-ciri atau sifat-sifat dari populasi. Jadi, sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil untuk penelitian. Dimana hasil dari sampel nantinya akan digeneralisirkan pada populasi, dan cara yang digunakan dalam pengambilan sampel dinamakan *sampling*.¹⁰

Menurut Suharsimi, apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semuanya, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya bila populasi besar dapat diambil yaitu antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih.¹¹ Karena jumlah populasi BMT di Lampung adalah sekitar 200 BMT, dan menurut peneliti jumlah tersebut teramat besar, maka untuk lebih fokus pada masalah yang sebenarnya ingin diteliti yaitu pemahaman praktisi BMT terhadap PSAK No. 106, maka sampel yang diambil hanya berjumlah 42 BMT yang kesemuanya itu tergabung dalam Puskopsyah (Pusat Koperasi Syariah). Dengan pertimbangan karena BMT yang menjadi anggota Puskopsyah adalah BMT yang bisa dikategorikan sebagai BMT yang maju, dengan rata-rata total *asset* diatas Rp. 1.000.000.000,-.

Selanjutnya, untuk menentukan siapa saja responden yang dipilih untuk mengisi angket/kuesioner digunakan *purposive random sampling*. *Purposive random sampling* adalah teknik penentuan sampel secara acak tetapi dengan pertimbangan tertentu.¹² Dalam penelitian ini responden

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1999), hal. 120

¹¹ *Ibid*, hal. 107

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hal. 96

ditetapkan secara sengaja oleh peneliti.¹³ Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa tidak semua praktisi BMT mempunyai kaitan langsung dengan pemahamannya terhadap PSAK No.106 Akuntansi *Musyarakah*. Oleh karena itu, praktisi BMT yang dipilih menjadi responden ditetapkan dengan sengaja yaitu manajer BMT dan staf pelaksana akuntansinya. Jadi karena BMT yang di ambil sebagai sampel adalah 42 BMT, dan dari masing-masing BMT tersebut yang diambil sebagai sampel adalah 2 orang, yaitu manajer dan *accounting*, maka respondennya menjadi berjumlah 84 responden.

Untuk mengetahui secara detail mengenai jumlah BMT yang akan dijadikan sampel, dapat dilihat pada tabel berikut ini

Table. 3.2. Jumlah Sampel BMT dan Responden

No.	Subpopulasi	Jumlah BMT	Jumlah BMT yang diambil sebagai sampel	Jumlah Responden (kuesioner)
1.	Kota Madya Bandar Lampung	1	1	2
2.	Kota Madya Metro	6	6	12
3.	Kabupaten Lampung Selatan	4	4	8
4.	Kabupaten Lampung Utara	1	1	2
5.	Kabupaten Lampung Tengah	8	8	16
6.	Kabupaten Lampung Timur	13	13	26
7.	Kabupaten Lampung Barat	0	0	0
8.	Kabupaten Pringsewu	1	1	2
9.	Kabupaten Pesawaran	0	0	0
10.	Kabupaten Tulang Bawang	4	4	8
11.	Kabupaten Tulang Bawang Barat	3	3	6
12.	Kabupaten Way Kanan	0	0	0
13.	Kabupaten Tanggamus	1	1	2
14.	Kabupaten Mesuji	0	0	0
	Jumlah	42	42	84

¹³ Sanafiah Faisal, *Format-format*, hal.67.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden yang diambil sebagai sampel dari masing-masing BMT adalah dua responden, maka jumlah kuesioner yang disebarakan adalah dua kali lipat dari jumlah BMT yang diambil sebagai sampel. Oleh karenanya, dari 42 BMT tersebut jumlah kuesionernya menjadi 84 buah, yang disebarakan kepada manajer dan staf akuntansinya.

G. Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini terdapat dua variable, yaitu variable *Independent* dan variable *Dependent*.

1. Variabel-Variabel Bebas (*Independent Variable*) yang diberi simbol X, terdiri dari:

- a. Usia (X_1)

Usia seseorang akan mempengaruhi kemampuannya memahami sesuatu. Definisi Umur atau usia itu sendiri adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu benda atau makhluk, baik yang hidup maupun yang mati. Oleh sebab itu usia adalah salah satu faktor yang menentukan tingkat pemahaman seorang praktisi BMT terhadap PSAK No. 106 Akuntansi *Musyarakah*.

- b. Latar belakang pendidikan (X_2)

Latar belakang pendidikan seseorang juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman. Seseorang yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi dan latar belakang jurusan pendidikan yang sesuai biasanya akan lebih cepat memahami bidang pekerjaannya.



c. Lama bekerja di BMT (X_3)

Lama bekerja juga menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman seorang karyawan. Banyak terjadi karyawan yang sudah lama bekerja, akan mempunyai pemikiran dan pemahaman yang lebih baik dibandingkan dengan karyawan yang belum lama bekerja.

d. Frekuensi mengikuti pelatihan, atau kegiatan yang semacamnya (X_4)

Pelatihan merupakan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian, pengetahuan, pengalaman ataupun perubahan sikap seorang individu. Oleh karena itu frekuensi mengikuti pelatihan berpengaruh pada pemahaman seorang karyawan.

2. Variabel terikat (*Dependent Variable*) yang diberi simbol Y, yaitu pemahaman praktisi BMT pada PSAK No.106 Akuntansi *Musyarakah*.

H. Teknik Pengumpulan Data

1. Angket

Angket/kuesioner merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui.¹⁴ Jadi alasan digunakannya angket dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai karakteristik responden dan tingkat pemahaman responden. Karakteristik responden terdiri dari umur, lama bekerja di BMT, latar belakang pendidikan dan frekuensinya mengikuti pelatihan. Sedangkan kemampuan responden dalam menjawab pertanyaan-

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur*. Edisi Revisi II, hal.124.

pertanyaan dalam angket akan memberikan informasi tentang tingkat pemahamannya tentang PSAK No.106 akuntansi *musyarakah*.

2. Dokumentasi.

Dengan menggunakan teknik pengumpulan data ini, dimaksudkan untuk pengumpulan data yang sudah tersedia, baik berupa majalah, buku, kertas kerja yang berkaitan dengan struktur organisasi, letak demografis, visi dan misi, sarana-prasarana dan sejarah berdirinya serta data-data lain yang berhubungan dengan penelitian.¹⁵

I. Pengembangan Instrumen Penelitian

Data yang dikumpulkan dengan kuesioner, dikembangkan atas landasan teoritik, kuesioner disebarakan kepada responden pada masing-masing BMT yang terpilih sebagai sampel. Dalam hal ini responden adalah praktisi akuntansi dan manajer BMT.

Dalam kuesioner ini digunakan pertanyaan untuk variabel bebas (usia, lamanya bekerja, latar belakang pendidikan, frekuensi mengikuti latihan) dan variable terikat (variabel pemahaman). Setiap jawaban akan diberi skor menurut skala *interval*. Pada kuesioner untuk skala usia, lamanya bekerja, latar belakang pendidikan dan frekuensi mengikuti pelatihan, bagi responden yang menjawab/memilih jawaban A diberi skor satu, yang memilih jawaban B diberi skor dua, dan bagi yang memilih jawaban C akan diberi skor tiga, dan yang memilih jawaban D diberi skor empat. Sedangkan untuk variabel

¹⁵ Suhardi Sigit, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial Bisnis Manajemen* (Bandung: Lukman Offset, 1999), hal. 206

pemahaman , menggunakan *skala guttman*¹⁶, sehingga bagi responden yang menjawab/memilih jawaban benar (A) diberi skor satu, yang memilih jawaban salah (B dan C) akan diberi skor 0. Karena angket ini bukan merupakan skala sikap, maka dari setiap butir pertanyaan yang diajukan pada skala pemahaman dapat diketahui jawaban-jawaban yang sesuai (benar) atau tidak benar.

Penyebaran butir pertanyaan dari angket pemahaman praktisi BMT terhadap PSAK No. 106 akuntansi *musyarakah* ini dapat dilihat dalam table di bawah ini:

Table. 3.3. Penyebaran Nomor Butir Angket Skala Pemahaman

No.	Kisi-kisi	No. Pertanyaan	Jumlah Butir
1.	Definisi PSAK No. 106	1, 2	2
2.	Pengakuan dan pengukuran	3,4,5,6,7,8,9	7
3.	Penyajian	10,11	2
4.	Pengungkapan	12	1
5.	Contoh kasus-kasus musyarakah	13,14,15,16	4
	Jumlah		16

J. Uji Validitas dan Reliabilitas

Suatu skala dikatakan representatif, fungsional dan akurat bila skala tersebut memiliki unsur validitas dan reliabilitas yang tinggi, oleh karena itu sebelum skala tersebut dikenakan pada subyek penelitian yang

¹⁶ Skala pengukuran dengan tipe ini, akan didapat jawaban yang tegas, yaitu “benar-salah”. Penelitian ini digunakan bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan. Jawaban pertanyaan dengan menggunakan skala Guttman dapat dibuat skor tertinggi adalah satu dan skor terendah nol. Misal untuk jawaban benar diberi skor 1 dan yang salah diberi skor 0. Lihat, Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alabeta. 2004), hal. 90

sesungguhnya, dilakukan uji coba untuk memperoleh validitas dan reliabilitas.¹⁷

1. Validitas

Suharsimi menyatakan bahwa validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan dan atau kesahihan suatu instrument.¹⁸ Chaplin mengartikan validitas sebagai suatu alat pengukur bahwa alat-alat tersebut biasa mengukur menurut kenyataannya seperti yang dikehendaki untuk diukur.¹⁹ Untuk menghitung validitas angket ini perhitungan selanjutnya menggunakan teknik korelasi *Product moment*²⁰. Hasil teknik statistik tersebut dikenal sebagai koefisiensi korelasi (*correlation coefficients*) atau angka korelasi yang disimbolkan dengan *r*, yang menunjukkan suatu kesan umum tentang kedekatan hubungan-hubungan antar variabel.²¹ Rumus penghitungan *r product moment* yaitu:

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[(N \sum x^2 - (X)^2)(N \sum Y^2 - (Y)^2)]}}$$

Dimana:

r_{xy} = Koefisien korelasi *r*

X = Skor dalam distribusi variabel *X*

¹⁷ Syaifuddin Azwar, *Penyusun Skala Psikologi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hal. 67

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Edisi baru, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), hal. 219

¹⁹ Chaplin, C.P., *Kamus Lengkap Psikologi*, Alih bahasa Kartini Kartono, (Jakarta : Rajawali Press, 1995), hal. 95

²⁰ Syaifuddin Azwar, *Reabilitas dan Validitas*, (Yogyakarta : Liberti, 1992), hal. 17

²¹ Sanafiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 224

Y = Skor dalam distribusi variabel Y

N = Banyaknya pasangan skor X dan skor Y (banyaknya subjek)

Dasar pengukuran valid tidaknya kuesioner adalah dengan melihat nilai dari *corrected* Butir-Total *Correlation* (r_{hitung}) dan nilai dari *Correlation r product moment* (r_{tabel}). Jika nilai dari $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Sedangkan jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka butir tersebut tidak valid dan tidak bisa digunakan lagi untuk analisa data selanjutnya.

Bila data diuji dengan menggunakan computer program SPSS versi 17 (lihat lampiran), maka r_{hitung} dapat dilihat pada kolom *corrected item-total correlation*. Sedangkan untuk menentukan r_{tabel} , dengan signifikasi 5% dan tingkat kebebasan (df) untuk *r pearson* adalah $N-2 = 30-2 = 28$. Dan diperoleh nilai $r = 0,374$. (lihat lampiran)

Untuk kuesioner yang koefisien korelasinya dibawah koefisien penerimaan, maka akan dilakukan revisi sebelum digunakan untuk penelitian yang sesungguhnya.

Untuk memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan tersebut besar atau kecil, dan menilai korelasi murni dari masing-masing variabel yang terlepas dari pengaruh variabel-variabel lainnya, maka dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel.3.4. Pedoman interpretasi terhadap koefisien korelasi²²

Interval Koefisien	Tingkat hubungan
0.00-0.199	Sangat rendah
0.20-0.399	Rendah
0.40-0.599	Sedang
0.60-0.799	Tinggi
0.80-1.000	Sangat tinggi

2. Reliabilitas

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrument cukup dapat dipercaya atau digunakan sebagai pengumpulan data karena instrument tersebut sudah baik.²³ Menurut Azwar, reliabilitas alat ukur menunjukkan sejauh mana hasil suatu pengukuran biasa di percaya.²⁴ Hasil pengukuran biasa dipercaya apabila beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap sekelompok subyek yang sama memperoleh hasil yang sama pula selama aspek dalam diri subyek yang diukur belum berubah. Dalam kasus skala yang itemnya tidak dapat dibagi dua maupun dibagi tiga sama banyak, pengujian reliabilitasnya dapat dilakukan melalui teknik analisis varians, salah satu teknik *anova* yang sangat populer untuk keperluan ini adalah yang dikemukakan oleh Hoyt.²⁵ dengan menggunakan rumus :

²² Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 231

²³ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, hal. 220

²⁴ Syaifuddin Azwar, *Reabilitas dan Validitas*, (Yogyakarta : Liberti, 1992), hal. 17

²⁵ Saifuddin Azwar, *Penyusunan Skala Psikologi*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2008).

$$r_{xx^2} = 1 - MK_{ixs}/MK_s$$

MK_{ixs} = Mean kuadrat interaksi jumlah skor subyek pada seluruh item

MK_s = Mean kuadrat antar subyek

Dengan demikian, koefisien reliabilitas yang dihitung dengan rumus *anova hoyn* adalah sebagai berikut; jika $n = 30$ dan $k = 16$, dari data (lihat lampiran) maka diperoleh hasil:

$$\begin{aligned} r_{xx^2} &= 1 - 3451,25273 / 0,23163 \\ &= 0,99993 \end{aligned}$$

Untuk menentukan r_{tabel} dengan taraf signifikansi 5% dan tingkat kebebasan (df) adalah $N = 30$, maka diperoleh $r_{tabel} = 0,374$ sedangkan $r_{hitung} = 0,99993$. Jadi $r_{hitung} > r_{tabel}$, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa semua butir pertanyaan reliabel.

K. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data pada dasarnya menunjuk pada bagaimana data yang akan dikumpulkan akan diolah, dianalisis dan diinterpretasikan untuk menjawab masing-masing masalah dan hipotesis. Jadi setelah data terkumpul akan dilakukan analisa data yang meliputi beberapa tahap.

Tahap pertama, pengolahan data. Pengolahan data mencakup kegiatan mengedit (*editing*) data dan mengkode (*coding*) data.²⁶ Mengedit data yaitu kegiatan memeriksa data yang terkumpul yang meliputi

²⁶ Sanapiah Faisal, *Format-format.*, hal.33.

kelengkapannya, kesempurnaan pengisiannya dan perlu tidaknya data dianalisis. Sedangkan mengkode data berarti memberikan kode-kode tertentu kepada masing-masing kategori atau nilai dari setiap variabel yang dikumpulkan datanya. Setelah semua data dikodekan, selanjutnya dipindahkan kedalam “*beberan*” rekapitulasi data.

Tahap Kedua, analisa data. Analisa data menunjuk pada mengorganisasikan data kedalam susunan-susunan tertentu dalam rangka menginterpretasikan data. Dalam penelitian ini analisa data meliputi analisis statistik *deskriptif* dan analisis statistik *inferensial*.²⁷ Analisis statistik *deskriptif* digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data dari angket yang telah terkumpul dengan cara membuat tabel-tabel (tabulasi) serta perhitungan prosentase. Analisis ini digunakan untuk menjawab permasalahan pertama.

Sedangkan analisis statistik *inferensial* dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian yang diajukan dengan mengukur tingkat hubungan antara variabel-variabel. Studi korelasional dilakukan karena penelitian ini dengan sengaja mengusahakan timbulnya variabel-variabel dan selanjutnya dikontrol untuk dilihat pengaruhnya terhadap pemahamannya. Pada tahap ini, data yang diperoleh dari jawaban responden kemudian dilakukan uji statistik. Uji statistik dalam analisis hubungan dimaksudkan untuk mengetahui signifikan atau tidaknya hubungan antar variabel.²⁸

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Edisi 13 (bandung: Alfabeta, 2005), hal.169.

²⁸ Iqbal Hasan, *Analisa Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005).
hal.79.

Uji statistik yang digunakan untuk menguji signifikan atau tidaknya hubungan adalah dengan menggunakan rumus *Chi Square*²⁹, yang dihitung melalui SPSS 17. Rumusnya adalah sebagai berikut;

$$\chi^2 = \sum \frac{(F_o - F_h)^2}{F_h}$$

Dimana :

χ^2 = Chi Square

F_o = Frekuensi yang diobservasi

F_h = frekuensi yang diharapkan

Tahap Ketiga yaitu interpretasi data, yang meliputi masing-masing masalah atau hipotesis penelitian maupun untuk keseluruhan masalah yang diteliti. Jadi hasil jawaban yang diperoleh dari responden tersebut ditambah dengan data yang diperoleh dari dokumentasi akan diinterpretasi dan dicermati dengan sudut pandang yang terkandung didalamnya sendiri dan menghubungkannya dengan fokus penelitian untuk mendapatkan kesimpulan.

²⁹ Uji *chi square* untuk satu sampel bisa dipakai untuk menguji apakah data sebuah sampel yang diambil menunjang hipotesis yang menyatakan bahwa populasi asal sampel mengikuti suatu distribusi yang telah ditetapkan. Lihat, Singgih Santoso, *Menggunakan SPSS Untuk Statistik Parametrik*, (Jakarta; Elex Media Komputindo, 2005), hal. 130

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Daerah Penelitian¹

a. Sejarah Berdirinya PUSKOPSYAH BMT Sejahtera

Kehadiran BMT Sejahtera memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian khususnya bagi BMT- BMT yang menjadi anggotanya. Kehadirannya telah memberikan warna tersendiri bagi dunia perbankan, khususnya BMT, dengan tujuan untuk menyatukan potensi perkembangan BMT di Lampung, menyediakan kebutuhan *liquiditas* BMT, menyediakan dana untuk pembiayaan bagi BMT anggota melalui mekanisme kerjasama yang saling menguntungkan, serta memudahkan dalam pembinaan dan penyaluran dana ZIS.

Pendirian BMT Sejahtera diinisiasi oleh 7 BMT yaitu: BMT Fajar, BMT Assyafi'iyah, BMT Al Ihsan, BMT Kopontren Al Muhsin, BMT Al Hasanah, BMT At-Taufiq, dan BMT Al Hikmah. Pada saat rapat LEPMM (Lembaga Ekonomi Produktif Masyarakat Mandiri) di BMT Al Ihsan pada tahun 1999, bertempat di BMT Al-Ihsan Kota Metro. Dari 7 BMT yang tergabung kedalam BMT Sejahtera sepakat untuk membentuk lembaga sekunder yaitu Pusat Koperasi Syari'ah

¹ Sumber; Puskopsyah BMT Sejahtera Lampung, Tanggal 05 Oktober 2009 .

Baitul Maal Wat Tamwil Sejahtera yang selanjutnya disingkat menjadi Puskopsyah BMT Sejahtera. Mereka bersama-sama mengumpulkan dana sebesar Rp. 5.000.000,- sebagai simpanan pokok dan simpanan wajib sebesar Rp. 500.000,- per bulan. Jadi modal awal yang terkumpul adalah Rp. 35.000.000,-. Bersamaan dengan hal tersebut BMT Sejahtera mendapatkan bantuan dana dari pemerintah, yaitu program LEPMM (Lembaga Ekonomi Produktif Masyarakat Mandiri) sebesar Rp. 59.000.000,-. Pada saat awal pendiriannya, dari 7 BMT tersebut sepakat mempercayakan Puskopsyah ini dikelola oleh Bapak. Samidjo Jarot sebagai Ketua dan dibantu oleh Asep sebagai sekretarisnya, serta Bapak Mudhofir sebagai Bendaharanya. Namun seiring perjalanan Puskopsyah mengalami pergantian kepemimpinan yaitu Bapak. Ir. Kusnoto, M.TA sebagai Ketuanya, Bapak. Sunaryo, Amd sebagai sekretarisnya, dan Bapak. Ir. Wajirnuri, sebagai bendaharanya, mulai Tahun 2007 sampai dengan sekarang.

Puskopsyah BMT Sejahtera pernah mendirikan atau membuat lembaga pelatihan kepada BMT- BMT yang bernama Metro Muamalat Center (MMC). Pernah juga membuat BMT di daerah Bandar jaya dengan permodalan Rp. 35.000.000,-, dana dari pengumpulan modal Puskopsyah. Akan tetapi dana tersebut tidak tepat sasaran, dana tersebut di salurkan kepada masyarakat langsung bukan melalui BMT. Oleh karena itu, terjadilah kesalahan manajemen, yang membuat Puskopsyah menjadi sedikit limbung.

Berkaca dari pengalaman maka pada saat RAT (Rapat Anggota Tahunan), di buatlah kesepakatan baru yaitu perubahan simpanan pokok yang awalnya Rp. 5.000.000,- menjadi Rp. 10.000.000,- dan wajibnya Rp. 5.000.000,- kebijakan itu mulai dilaksanakan pada pertengahan tahun 2009.

b. Lokasi Puskopsyah BMT Sejahtera

Sejak terbentuknya hingga saat ini Puskopsyah BMT Sejahtera berkantor di Jl. Cut Nyak Dien, No. 108, 15 B Metro Barat, Kota Metro, Lampung. Telpon/fax (0725) 45441.

c. Visi, dan Misi Puskopsyah BMT Sejahtera

Visi Puskopsyah BMT Sejahtera menjadi lembaga *financial* bagi BMT dan memperkuat jaringan kerja antar BMT sekaligus fokus terhadap pengembangan SDM BMT.

Sedangkan Misi Puskopsyah BMT Sejahtera adalah menjadikan BMT sebagai lembaga keuangan yang maju dan mandiri, bersama-sama dengan lembaga keuangan syari'ah lain dalam menerapkan konsep-konsep syari'ah dalam bidang ekonomi, serta menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq dan Shadaqah dengan pola pembentukan jaringan sebagai sistem pengembangan ekonomi yang berlandaskan syari'at Islam.

d. Wilayah kerja dan keanggotaan

Wilayah kerja Puskopsyah BMT Sejahtera adalah Provinsi Lampung yang meliputi 12 Kabupaten, yaitu: Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Lampung Barat, Lampung Selatan, Tanggamus, Way Kanan, Mesuji, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Pesawaran, Pringsewu. Dan 2 Kota Madya, yaitu : Kota Madya Bandar Lampung, dan Kota Madya Metro.

Dalam paparan sebelumnya telah disebutkan bahwa, menurut data Puskopsyah BMT Sejahtera, jumlah anggota Puskopsyah BMT Sejahtera tercatat sebanyak 42 BMT yang tersebar diseluruh Provinsi Lampung, yaitu:

- Kota Madya Bandar Lampung
- Kota Madya Metro
- Kabupaten Lampung Selatan
- Kabupaten Lampung Utara
- Kabupaten Lampung Tengah
- Kabupaten Lampung Timur
- Kabupaten Lampung Barat
- Kabupaten Pringsewu
- Kabupaten Pesawaran
- Kabupaten Tulang Bawang
- Kabupaten Tulang Bawang Barat
- Kabupaten Way Kanan
- Kabupaten Tanggamus
- Kabupaten Mesuji

e. Tingkat Pengembalian Kuesioner

Untuk tingkat pengembalian kuesioner, dalam penelitian ini, dari 42 BMT yang menjadi anggota Puskopsyah, jumlah kuesioner yang disebar yaitu sebanyak 84 bendel. Kuesioner tersebut dibagikan kepada 2 orang praktisi di masing-masing BMT tersebut, yaitu Manajer BMT dan *Accounting* BMT. Kuesioner tersebut di bagikan dan dapat diambil kembali sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Dari tabel berikut, jumlah BMT dan tingkat pengembalian kuesioner dapat tergambarkan.

Tabel.4.1 Jumlah BMT yang dijadikan sampel dan tingkat pengembalian kuesioner

No.	Subpopulasi	Jumlah BMT Sampel	Jumlah Kuesioner	Tingkat Pengembalian Kuesioner	Persentase
1.	Kota Madya Bandar Lampung	1	2	2	2,3 %
2.	Kota Madya Metro	6	12	10	12 %
3.	Kabupaten Lampung Selatan	4	8	8	9,5 %
4.	Kabupaten Lampung Utara	1	2	2	2,3 %
5.	Kabupaten Lampung Tengah	8	16	14	17 %
6.	Kabupaten Lampung Timur	13	26	22	26 %
7.	Kabupaten Lampung Barat	0	0	0	0
8.	Kabupaten Pringsewu	1	2	2	2,3 %
9.	Kabupaten Pesawaran	0	0	0	0
10.	Kabupaten Tulang Bawang	4	8	6	7,1 %
11.	Kabupaten Tulang Bawang Barat	3	6	6	7,1 %
12.	Kabupaten Way Kanan	0	0	0	0
13.	Kabupaten Tanggamus	1	2	2	2,3 %
14.	Kabupaten Mesuji	0	0	0	0
	Jumlah	42	84	74	88 %

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 84 bendel angket yang telah disebar, dan jumlah angket yang kembali adalah sejumlah 74 bendel, jadi tingkat pengembalian angket mencapai prosentase 88%. Itu dikarenakan akses BMT yang teramat jauh sehingga petugas lapangan² penyebar angket tidak sampai kesana. Selanjutnya, berdasarkan data-data yang telah diperoleh melalui penyebaran angket tersebut, maka dapat penulis jabarkan seperti berikut ini.

2. Gambaran Praktek akuntansi di BMT anggota Puskopsyah dan pandangan praktisi BMT terhadap PSAK No. 106 Akuntansi Musyarakah.

Berdasarkan hasil angket bagian III (lihat lampiran angket) yang dibuat secara esai, maka sebenarnya secara konseptual, para praktisi BMT sepakat dengan adanya Standar Akuntansi Keuangan. Dengan begitu ada standar yang baku tentang praktek- praktek akuntansi yang terjadi di BMT selama ini. Selain itu pula agar ada suatu kejelasan arah dari akuntansi Islam itu sendiri.

Menurut mereka pula, pada dasarnya akuntansi konvensional dan akuntansi Islam tidak jauh berbeda. Letak perbedaan tersebut pada nilai- nilai keislaman yang di tanamkan dalam akuntansi Islam. Sekali lagi, tentang PSAK No. 106 masih perlu adanya sosialisasi yang berkesinambungan. Hal itu berdasarkan hasil penelitian yang masih cukup banyak BMT yang belum menerapkan secara benar karna memang masih banyak praktisi BMT yang

² Suatu penelitian sangat memerlukan dukungan administrasi yang memadai, antara lain petugas lapangan atau pengumpul data perlu dipersiapkan dengan baik, pengumpul data perlu dilatih terlebih dahulu, sehingga tujuan pengumpulan data akan tercapai, misalnya pemahaman terhadap pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan terhadap responden, cara pengecekan, dan laian-lain. Lihat Nugroho Budiyuwono, *Pengantar Statistik Ekonomi dan Perusahaan*. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1996), hal. 134

belum memahami tentang isi PSAK, khususnya PSAK No. 106. Berikut ini adalah hasil penyebaran angket bagian pertanyaan pendukung yang berbentuk esai dengan para praktisi BMT yang menjadi sampel penelitian mengenai tingkat penerapan PSAK No. 106 di BMT Anggota Puskopsyah Lampung.

Tabel. 4.2. Tingkat Penerapan PSAK No. 106 di BMT anggota Puskopsyah Lampung.

Penerapan PSAK 106	Frekuensi	Prosentase
Sudah	20	27,03 %
Belum	39	52,70 %
Dalam Proses	15	20,27 %
Jumlah	74	100 %

Sumber : Data Primer

Dari tabel tersebut diketahui bahwa BMT yang belum menerapkan PSAK 106 mencapai 52,70%, sedangkan yang masih dalam proses mencapai 20,27%, dan yang sudah menerapkan PSAK 106 mencapai 27,03%.

Selanjutnya berdasarkan pula dari hasil jawaban atas pertanyaan pendukung yang berupa esai (lihat lampiran angket) mengenai pertanyaan sumber informasi dari mana mereka mengetahui PSAK 106, ternyata sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka mengetahui akan PSAK 106 dari berbagai pelatihan dan kegiatan-kegiatan semacamnya. Sedangkan lainnya mengetahui akan PSAK 106 dari berbagai sumber, misalnya media masa, buku-buku, dosen, teman seprofesi, dan lain-lain.

Tabel. 4.3. Sumber informasi tentang PSAK No. 106 menurut responden

Penerapan PSAK 106	Frekuensi	Prosentase
Pelatihan/seminar	53	71,62 %
Lain-lain	21	28,38 %
Jumlah	74	100 %

Sumber : Data Primer

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa 71,62% responden mengetahui akan PSAK 106 dari berbagai pelatihan dan kegiatan-kegiatan semacamnya. Sedangkan 28,38% mengetahui tentang PSAK 106 dari berbagai macam sumber. Merujuk dari hasil tersebut, kiranya pelatihan/seminar/kegiatan lain yang serupa merupakan media yang efektif untuk mensosialisasikan PSAK 106 kepada para praktisi BMT.

Kemudian mengenai pertanyaan bagaimana pendapat mereka setelah tau tentang PSAK 106. Pada dasarnya mereka menyambut baik hadirnya PSAK 106 untuk lembaga mereka, karena hal ini akan mendukung ketertiban administrasi keuangan BMT yang sesuai dengan syari'ah. Namun demikian mereka membutuhkan adanya lebih banyak sosialisasi untuk penerapan PSAK tersebut. Karena bagi mereka yang berlatar belakang non ekonomi butuh pemahaman lebih banyak mengenai istilah-istilah dalam PSAK 106 tersebut. Disamping itu, dari sekian banyak BMT yang belum menerapkannya, alasan mereka adalah keterbatasan SDM (sumber daya manusia) yang betul-betul belum menguasai PSAK 106 serta keterbatasan program computer yang mendukung pengoperasian system tersebut.

Selain itu mengenai pertanyaan apakah mereka merasa kesulitan terhadap penerapan atau praktek PSAK 106 tersebut, yang menyatakan sulit hampir separuh dari banyaknya responden, dan yang lainnya menyatakan tidak sulit mempraktekannya. Berikut ini adalah tabel yang menyajikan data mengenai kesulitan penerapan PSAK 106.

Tabel. 4.4 Tingkat kesulitan dalam mempraktekan PSAK 106 menurut responden

Penerapan PSAK 106	Frekuensi	Prosentase
Sulit	31	42 %
Tidak sulit	43	58 %
Jumlah	74	100 %

Sumber : Data Primer

Dari tabel tersebut terlihat bahwa responden yang menyatakan sulit menerapkan PSAK 106 sebanyak 42%, dan responden yang menyatakan tidak sulit menerapkan PSAK 106 sebanyak 58%. Mereka yang menyatakan kesulitan menerapkan PSAK 106, secara garis besar disebabkan karena latar belakang pendidikannya yang non ekonomi sehingga merasa kesulitan dalam mempelajari dan memahami istilah-istilah baru yang dipakai dalam PSAK 106. Sedangkan responden yang menyatakan tidak sulit, karena mereka sudah menggunakan *software* yang disesuaikan dengan PSAK 106 yang dirasakan lebih mudah dan lengkap.

Secara lebih terinci, berdasarkan angket yang disebar, distribusi frekuensi mengenai latar belakang pendidikan untuk masing-masing responden tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel.4.5 Latar belakang pendidikan responden

No.	Pendidikan	Jurusan	Jumlah	%
1.	SMU/MA/SMK	SMU IPS	1	1,35%
		SMU IPA	3	4,05%
		SMK Akuntansi	3	4,05%
2.	Diploma III (DIII)	Akuntansi	2	2,70%
		Manajemen	1	1,35%
		Perbankan	1	1,35%
3.	Sarjana (S1)	Akuntansi	21	28,38%
		Ekonomi manajemen	6	8,11%
		Manajemen perusahaan	1	1,35%
		Ekonomi Islam	5	6,76%
		Keuangan Islam	2	2,70%
		Teknik Informatika	2	2,70%
		Pendidikan agama Islam\	1	1,35%
		Psikologi	1	1,35%
		Hukum syari'ah	2	2,70%
		Hukum	1	1,35%
		Ilmu pemerintahan	1	1,35%
		Sosial politik	1	1,35%
		Teknik sipil	1	1,35%
		Komunikasi	1	1,35%
		Matematika	1	1,35%
4.	Pasca Sarjana (S2)	Manajemen	2	2,70%
		Pertanian	1	1,35%
	Jumlah		74	100%

Sumber : Data Primer

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa responden yang mempunyai latar belakang ekonomi (konvensional maupun syari'ah) dari seluruh kelompok jenjang pendidikan, mencapai 59,45%. Selebihnya berasal dari latar belakang disiplin ilmu non ekonomi. Sedangkan dari responden yang berlatar belakang ekonomi tersebut, khusus yang berlatar belakang akuntansi baik itu konvensional ataupun syari'ah hanya 33,78%.

Kemudian mengenai pertanyaan apakah kegiatan semacam seminar, pelatihan, atau kegiatan lain tentang akuntansi syari'ah apakah memberikan pengaruh bagi penerapan PSAK 106 di BMT, maka atas pertanyaan ini mayoritas pengelola BMT sangat menyetujuinya. Mereka mendukung adanya kegiatan semacam seminar, pelatihan atau kegiatan lain tentang akuntansi syari'ah. Karena minimnya pelatihan tentang akuntansi syariah akan sangat mempengaruhi sosialisasi PSAK 106 kepada pengelola BMT. Selain itu mereka berpandangan bahwa kalau hanya membaca dari buku panduannya saja belum cukup jelas, oleh karena itu kegiatan semacam seminar, pelatihan, atau kegiatan lain tentang akuntansi syari'ah umumnya dan PSAK 06 pada khususnya terasa lebih efektif sebagai media untuk menambah ilmu dan wawasan serta untuk lebih memahami dan memperdalaminya.

Namun demikian, ada beberapa praktisi BMT yang kurang setuju jika kegiatan semacam seminar, pelatihan atau kegiatan lain tentang akuntansi syari'ah memberikan pengaruh bagi penerapan PSAK 106 di BMT. Karena semua itu tergantung dari kebijakan masing-masing BMT. Hal ini dikarenakan banyak BMT yang bekerja sama dengan Departemen Koperasi yang mengharuskan system pencatatan seperti layaknya koperasi, sehingga mereka dituntut untuk memenuhi ketentuan tersebut. Jadi yang dibutuhkan adalah kejelasan status serta standar akuntansi BMT melalui surat keputusan, sehingga arah dan tujuan BMT menjadi lebih jelas.

3. **Gambaran Mengenai Karakteristik Responden**

Berdasarkan hasil dari angket yang telah disebarakan kepada responden, maka dapat digambarkan karakteritik responden apabila dilihat dari usia, pendidikan, lama bekerja di BMT, dan frekuensi mengikuti pelatihan, sebagaimana berikut :

a. Deskripsi Usia responden

Dalam penelitian ini, karakteristik usia responden dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu kelompok usia 20 samapai 30 tahun, kelompok usia 31 sampai 40 tahun, kelompok usia 41 sampai 50 tahun, dan kelompok usia diatas 50 tahun.

Berdasarkan hasil angket yang disebar, dapat diketahui bahwa secara umum, frekuensi terbanyak didominasi oleh responden yang berusia antara 20 sampai 30 tahun, kemudian disusul usia 31 sampai 40 tahun. Selanjutnya responden yang berusia 41 sampai 50 tahun dan terakhir responden yang berusia diatas 50 tahun. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar praktisi BMT di Lampung berada pada usia produktif. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai distribusi frekuensi responden menurut kelompok usia ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel. 4.6. Distribusi frekuensi kelompok usia responden

Kelompok umur	Frekuensi	Prosentase
20 s/d 30 Tahun	51	68,91 %
31 s/d 40 Tahun	19	25,67 %
41 s/d 50 Tahun	4	5,42 %
➤ 50 Tahun	0	0
Jumlah	74	100 %

Sumber : Data Primer

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa frekuensi terbanyak didominasi oleh responden yang berusia antara 20 sampai 30 tahun, yaitu 51 responden atau sebesar 68,91%. Kemudian disusul responden yang berusia 30 sampai 40 tahun sebanyak 19 responden atau sebesar 25,67%. Selanjutnya responden yang berusia 40 sampai 50 tahun sebanyak 4 responden atau 5,42%. Dan ternyata tidak ada responden yang usianya diatas 50 tahun. Sedangkan untuk lebih mengetahui mengenai sebaran distribusi frekuensi karakteristik responden menurut kelompok usia ini, bisa dilihat dalam histogram pada gambar dibawah ini.



Gambar. 4.1 Histogram kelompok usia responden

Dari histogram diatas jelas terlihat bahwa pada kelompok umur 20 sampai 30 tahun mempunyai frekuensi terbanyak.

b. Deskripsi Latar Belakang Pendidikan Responden

dalam penelitian ini, latar belakang pendidikan responden dikelompokkan menjadi empat, yaitu responden yang berpendidikan SMA, responden yang berlatar belakang pendidikan Diploma III,

responden yang berlatar belakang pendidikan Sarjana (S1) dan responden yang berlatar belakang pendidikan S2. Berdasarkan hasil angket yang disebar, dapat diketahui mengenai distribusi frekuensinya pada tabel dibawah ini:

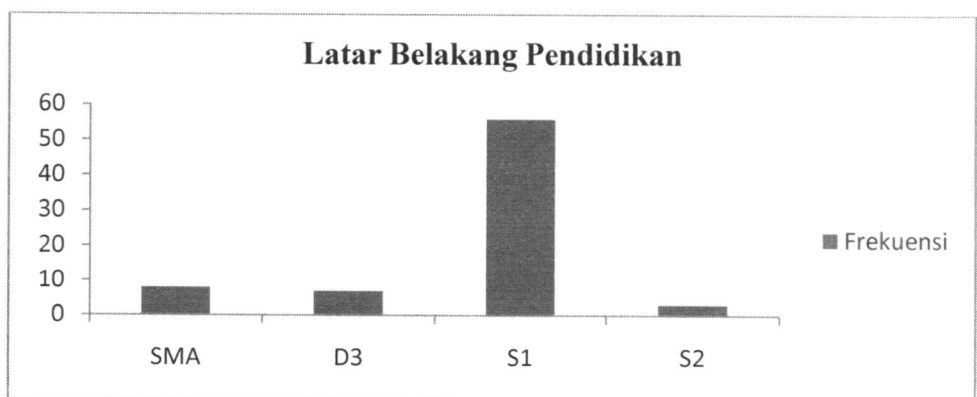
Tabel. 4.7 Distribusi Frekuensi Latar Belakang Pendidikan

Lama Belakang Pendidikan	Frekuensi	Prosentase
SMA Sederajat	7	9,46%
D3	4	5,41%
Sarjana (S1)	60	81,1%
Pasca sarjana (S2)	3	4,05
Jumlah	74	100%

Sumber : Data Primer

Pada tabel diatas terlihat bahwa sebagian besar responden berlatar belakang Sarjana (S1), yaitu 81,1%. Kemudian responden yang berlatar belakang SMA sebanyak 9,46%, responden yang berlatar belakang pendidikan Diploma 3 sebanyak 5,41% dan responden yang berlatar belakang pascasarjana sebanyak 4,05%.

Sedangkan untuk lebih mengetahui sebaran distribusi frekuensinya juga bisa dilihat dalam histogram dibawah ini:



Gambar 4.2 Histogram latar belakang pendidikan responden

Dari histogram diatas jelas terlihat bahwa pada kelompok responden yang berlatar belakang sarjana (S1) mempunyai frekuensi terbanyak.

c. Deskripsi Lama Responden Bekerja Di BMT

Pengalaman bekerja seseorang bisa dijadikan ukuran seorang praktisi dalam memahami pekerjaannya. Namun demikian keadaan ini belum tentu sama dengan realitasnya. Dalam penelitian ini lama responden bekerja di BMT dikelompokkan menjadi empat, yaitu kelompok responden yang bekerja kurang dari 3 tahun, kelompok responden yang bekerja antara 3 sampai 5 tahun, kelompok responden yang bekerja antara 5 sampai 7 tahun, dan kelompok responden yang bekerja lebih dari 7 tahun. Berdasarkan hasil dari angket yang disebar, dapat diketahui bahwa karakteristik lamanya seorang praktisi bekerja di BMT, diperoleh hasil seperti dalam tabel berikut:

Tabel. 4.8. Distribusi frekuensi lamanya bekerja di BMT

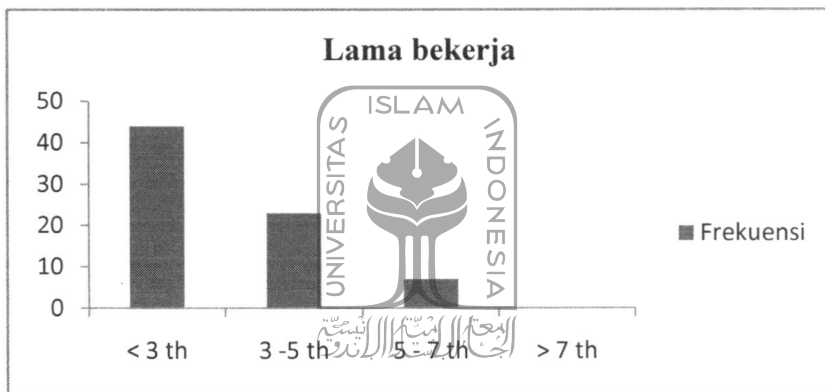
Lama bekerja di BMT	Frekuensi	Prosentase
< 3 Tahun	44	59,46 %
3 – 5 Tahun	23	31,08 %
5 – 7 Tahun	7	9,45 %
➤ 7 Tahun	0	0
Jumlah	74	100 %

Sumber : Data Primer

Dari tabel diatas terlihat bahwa frekuensi dari responden yang bekerja kurang dari 3 tahun lebih tinggi frekuensinya, yaitu 44 responden

atau 59,46 % . Kemudian frekuensi dari responden yang bekerja antara 3 sampai 5 tahun mempunyai distribusi frekuensi 23 responden atau 31,08%. Dan yang terakhir dari responden yang bekerja antara 5 sampai 7 tahun sebanyak 7 responden atau 9,45%.

Untuk mengetahui sebaran distribusi frekuensi lamanya praktisi BMT yang menjadi responden bekerja di BMT ini, bisa dilihat dalam histogram pada gambar berikut ini.



Gambar 4.2. Histogram lama responden bekerja di BMT.

d. Distribusi Mengikuti Pelatihan

Dalam penelitian ini variabel frekuensi mengikuti pelatihan dikelompokkan menjadi empat, yaitu frekuensi mengikuti pelatihan 1 sampai 3 kali, frekuensi mengikuti pelatihan 4 sampai 6 kali, frekuensi mengikuti pelatihan 7 sampai 9 kali dan lebih dari 9 kali. Berdasarkan hasil angket yang telah disebar, diperoleh informasi bahwa kebanyakan responden baru mengikuti pelatihan berkisar antara 1 sampai 3 kali, kemudian disusul responden yang mengikuti pelatihan berkisar 4 sampai 6 kali, responden yang mengikuti pelatihan 7 sampai 9 kali, dan terakhir

responden yang mengikuti pelatihan lebih dari 9 kali. Untuk mengetahui lebih jelasnya, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

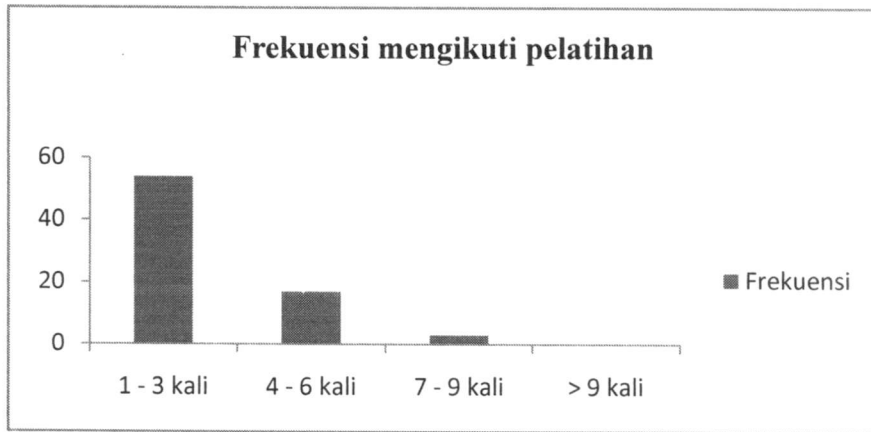
Tabel. 4.9. Distribusi frekuensi responden mengikuti Pelatihan

Frekuensi Mengikuti Pelatihan	Jumlah	Prosentase
1 s/d 3 kali	54	72,97%
4 s/d 6 kali	17	22,97%
7 s/d 9 kali	3	4,06%
Lebih dari 9 kali	0	0
Jumlah	74	100%

Sumber: Data Primer

Dari tabel tersebut diperoleh informasi bahwa frekuensi responden mengikuti pelatihan antara 1 sampai 3 kali menduduki porsi terbanyak, yaitu sebanyak 54 responden atau sekitar 72,97%. Selanjutnya responden yang sudah mengikuti pelatihan 4 sampai 6 kali sebanyak 17 responden atau 22,97%. sedangkan responden yang sudah mengikuti pelatihan 7 sampai 9 kali sebanyak 3 responden atau 4,06 % dan praktisi yang sudah mengikuti pelatihan lebih dari 9 kali adalah 0 responden.

Sedangkan untuk lebih jelas mengenai sebaran distribusi frekuensi para praktisi BMT mengikuti pelatihan bisa dilihat dalam histogram dibawah ini:



Gambar 4.4. Histogram frekuensi responden dalam mengikuti pelatihan

Dari histogram tersebut diatas terlihat bahwa pada kelompok responden yang frekuensinya mengikuti pelatihan antara 1 sampai 3 kali mempunyai frekuensi terbanyak.

4. Deskripsi Pemahaman Responden Terhadap PSAK No. 106 Akuntansi *Musyarakah*

Dalam pembahasan ini tingkat pemahaman responden terhadap PSAK No. 106 Akuntansi *Musyarakah* akan dibagi menjadi 3 kategori. Selanjutnya untuk mengetahui lebih mendalam tentang tingkat pemahaman responden terhadap PSAK No. 106, maka akan dilihat dari berbagai karakteristik usia, lamanya bekerja, latar belakang pendidikan, dan frekuensi mengikuti pelatihan.

Dalam mengelompokkan kedalam ketiga kategori tersebut digunakan statistik deskriptif³. Bila diinginkan penggolongan subjek ke dalam 3 kategori

³ Statistik deskriptif adalah cabang ilmu pengetahuan yang membahas mengenai teknik-teknik pengumpulan, pengolahan/analisis, dan penyajian terhadap sekelompok data. Akan tetapi jika data itu juga dibahas tentang penarikan kesimpulan/interpretasi bagi populasi data yang sedang diselidiki, maka disebut statistik inferensial. Lihat, Zaenal Mustafa, *Pengantar Statistik Deskriptif*, (Yogyakarta; EKONOSIA, 1998), hal. 1

diagnosis tingkat Harga diri, maka dibagi menjadi tiga bagian.⁴ Dari 16 item pertanyaan dengan skor bergerak antara 0 sampai 1, maka nilai maksimal adalah 16 dan nilai minimal adalah 0. Langkah penghitungannya adalah sebagai berikut;

Rendah = 0 s/d M – 1 SD

Sedang = M – 1 SD s/d M + 1 SD

Tinggi = M + 1 SD s/d 16

Dalam memudahkan peneliti digunakan analisis menggunakan SPSS 17, maka hasil yang didapat adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.10. Analisis standar deviasi

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman PSAK	74	8	16	904	12,22	1,925
Valid N (listwise)	74					

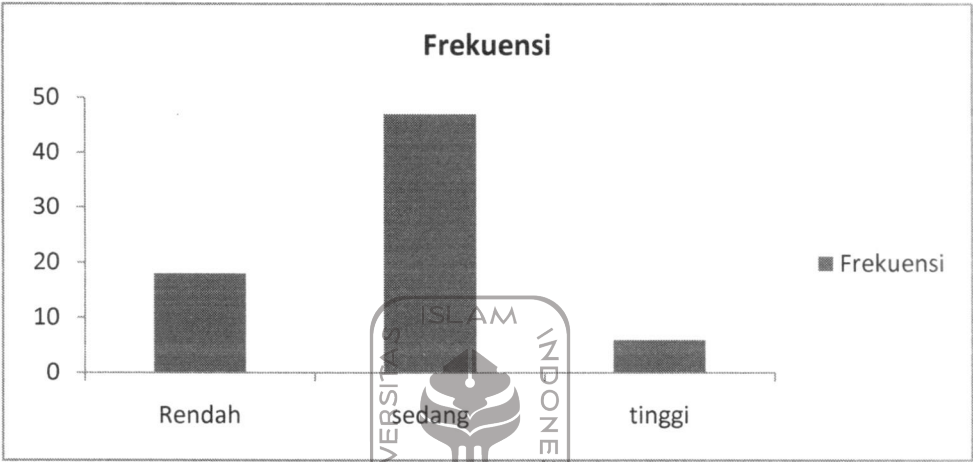
Berdasarkan pada hasil perhitungan ini dan juga berdasarkan pada angket yang disebar, dapat diketahui tingkat pemahaman responden terhadap PSAK 106 Akuntansi *Musyarakah*, seperti tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel. 4.11 Distribusi Tingkat Pemahaman Responden terhadap PSAK No. 106 Akuntansi *Musyarakah*

Tingkat pemahaman	Interval	Frekuensi	Prosentase
Rendah	0 - 10,29	19	25,7%
Sedang	10,30 – 14,14	47	63,5%
Tinggi	14,15 -16	8	10,8%
Jumlah	-	74	100%

⁴ Saifuddin Azwar, *Penyusunan Skala Psikologi*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2008), hal. 109

Sedangkan sebaran distribusi frekuensi tingkat pemahaman responden terhadap PSAK 106 akuntansi *musyarakah* , bisa dilihat pada histogram pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.5. Histogram tingkat pemahaman responden terhadap PSAK 106 akuntansi *musyarakah*

Pada tabel dan histogram diatas menunjukkan bahwa responden yang mempunyai tingkat pemahaman yang tinggi terhadap PSAK 106 akuntansi *musyarakah* hanya mencapai mencapai 8 responden atau 10,8% pada level sedang sebanyak 47 responden atau 63,5%, dan ternyata masih ada responden yang mempunyai pemahaman rendah sebanyak 19 responden atau 25,7%.

Jika di analisis secara lebih mendalam dari masing-masing BMT anggota Puskopsyah BMT Sejahtera, dilihat dari tingkat pemahamannya adalah seperti dalam tabel berikut;

Tabel 4.12 Tingkat pemahaman dari masing-masing BMT yang menjadi anggota Puskopsyah BMT Sejahtera.

No.	Nama BMT	Responden	Hasil Kuesioner	Tingkat Pemahaman
1	BMT Sidoluhur	1	10	rendah
		2	13	sedang
2	BMT Assyafi'iyah	3	10	rendah
		4	14	sedang
3	BMT Wahana Abadi	5	14	sedang
		6	12	sedang
4	BMT Al Hikmah	7	16	tinggi
		8	11	sedang
5	BMT Baskara	9	12	sedang
		10	10	rendah
6	BMT Aswaja	11	12	sedang
		12	8	rendah
7	BMT Adi Sarana	13	13	sedang
		14	9	rendah
8	BMT El Ikhlas	15	12	sedang
		16	10	rendah
9	BMT Baskara	17	10	rendah
		18	12	sedang
10	BMT Duta Jaya	19	15	sedang
		20	10	rendah
11	BMT Mitra Dana Sakti	21	15	tinggi
		22	12	sedang
12	BMT Al Hasanah	23	12	sedang
		24	12	sedang
13	BMT Mulia	25	14	sedang
		26	14	sedang
14	BMT El Hidayah	27	13	sedang
		28	13	sedang
15	BMT Al Fath	29	12	sedang
		30	14	sedang
16	BMT Sukses	31	15	tinggi
		32	14	sedang
17	BMT Assyafi'iyah	33	11	sedang
		34	14	sedang
18	BMT Al Ihsan	35	12	sedang
		36	15	tinggi

19	BMT Mitra Umat	37	14	sedang
		38	14	sedang
20	BMT Mentari	39	14	sedang
		40	15	tinggi
21	BMT Mawaddah	41	8	rendah
		42	15	tinggi
22	BMT Mentari	43	15	tinggi
		44	10	rendah
23	BMT Pringsewu	45	14	sedang
		46	13	sedang
24	BMT Sabilil Mutaqien	47	10	rendah
		48	12	sedang
26	BMT El Darussalam	49	12	sedang
		50	10	rendah
27	BMT Syar'i	51	11	sedang
		52	10	rendah
28	BMT Baskara	53	13	sedang
		54	10	rendah
29	BMT Duta Jaya	55	13	sedang
		56	12	sedang
30	BMT Al Ihsan	57	12	sedang
		58	10	rendah
31	BMT Al Muhsin	59	14	sedang
		60	13	sedang
32	BMT Al Mutaqien	61	10	rendah
		62	14	sedang
33	BMT Fajar	63	14	sedang
		64	11	sedang
34	BMT Al Furqon	65	11	sedang
		66	9	rendah
35	BMT Amanah Surya Prakarsa	67	12	sedang
		68	13	sedang
36	BMT Nahdlatul Ulama	69	13	sedang
		70	9	rendah
37	BMT Roudlotul Qur'an	71	13	sedang
		72	13	sedang
38	BMT Assafi'iyah	73	12	sedang
		74	9	rendah

Sumber : Data Primer

Dari tabel tersebut dapat dilihat tingkat pemahaman dari masing-masing BMT anggota Puskopsyah. Sehingga bisa disimpulkan bahwa dari 74 responden yang mewakili dari 37 BMT yang menjadi anggota Puskopsyah, ternyata sangat beragam.

a. Deskripsi Pemahaman Responden Menurut Kelompok Usia, Lama Bekerja, Latar Belakang Pendidikan, dan Mengikuti Pelatihan

Pada bagian ini, akan dilakukan tabulasi silang antara hasil jawaban responden terhadap butir pertanyaan skala pemahaman dengan variabel usia, latar belakang pendidikan, lama bekerja, dan frekuensi mengikuti pelatihan.

1) Tingkat Pemahaman Responden Menurut Kelompok Usia

Usia seseorang akan mempengaruhi kemampuannya dalam memahami sesuatu. Dalam penelitian ini tingkat pemahaman responden ditentukan dari kemampuan responden menjawab kuesioner. Apabila tingkat pemahaman responden terhadap PSAK No. 106 Akuntansi *Musyarakah* dicross-kan dengan kelompok usia, maka akan diperoleh hasil seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 4.13 Tingkat Pemahaman Responden Menurut Kelompok Usia

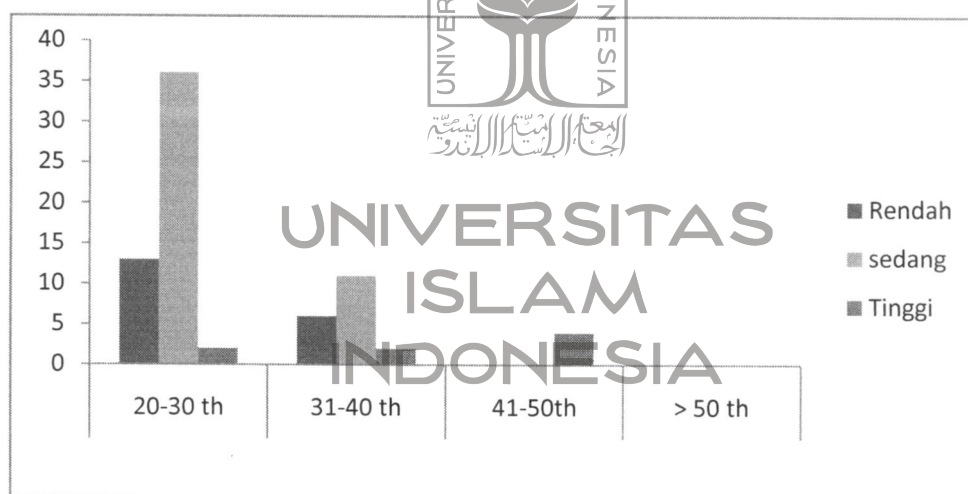
Crosstab

Count

		Y Pemahaman PSAK			Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	
X1 Usia	20 s.d. 30 tahun	13	36	2	51
	31 s.d. 40 tahun	6	11	2	19
	41 s.d. 50 tahun	0	0	4	4
Total		19	47	8	74

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada kelompok usia 20-30 tahun, responden yang mempunyai tingkat pemahaman tinggi sebanyak 2 responden dan yang mempunyai tingkat pemahaman sedang 36 responden, dan yang mempunyai pemahaman rendah sebesar 13 responden. Pada kelompok usia 31 sampai 40 tahun, responden yang memiliki tingkat pemahaman tinggi sebanyak 2 responden, dan pada kelompok usia 41 sampai 50 tahun responden yang memiliki tingkat pemahaman tinggi sebanyak 4 responden.

Untuk lebih jelasnya sebaran distribusi frekuensi tingkat pemahaman responden menurut kelompok usia ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.6 Histogram tingkat pemahaman responden menurut kelompok usia.

Dari hasil analisis data yang diperoleh, ini membenarkan pendapat Rosidan tentang kemampuan mendengarkan seseorang berdasarkan tingkat usia seseorang. Kemampuan mendengarkan, semakin meningkat usia seseorang kemampuan melihatnya semakin berkurang. Bila diukur dengan kemampuan

cahaya, maka untuk usia sekitar 20-an tahun ruangan memerlukan cahaya hanya sekitar 40 watt, dan untuk usia sekitr 40-an tahun membutuhkan sekitar 60 saampai 100 watt. Apabila kurang dari kapasitas tersebut, maka penglihatannya hanya terganggu.⁵

2) Tingkat Pemahaman Responden Menurut Latar Belakang Pendidikan

Latar belakang pendidikan mempunyai potensi besar terhadap pemahaman dan penyerapan materi-materi yang berbasis kepadanya. Dalam penelitian ini, apabila dilakukan *crosstabs* antara tingkat pemahaman responden terhadap PSAK 106 akuntansi *musyarakah* dengan kelompok latar belakang pendidikan, maka akan diperoleh hasil yang terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 4.14 Distribusi Frekuensi Tingkat Pemahaman Responden Menurut Latar Belakang pendidikan

Crosstab

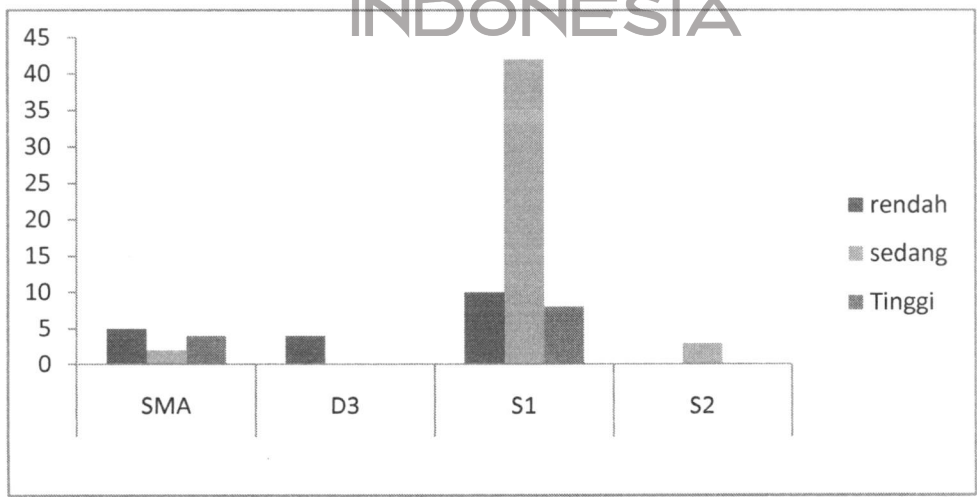
Count		X2 Latar Belakang Pendidikan				Total
		SMA sederajat	D3	S1	S2	
Y Pemahaman PSAK	Rendah	5	4	10	0	19
	Sedang	2	0	42	3	47
	Tinggi	0	0	8	0	8
Total		7	4	60	3	74

Sumber : Data Primer

⁵ Rosidan, dkk, *Belajar dan Pembelajaran*, (Malang: FIP Universitas Negeri Malang, 2001), hal. 10

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada kelompok latar belakang pendidikan SMA dan sederajat, responden yang mempunyai tingkat pemahaman rendah sebanyak 5 responden dan yang mempunyai tingkat pemahaman sedang sebanyak 2 responden. Pada kelompok latar belakang D3 responden yang memiliki tingkat pemahaman tinggi sebanyak 4 responden, dan tidak ditemukan responden yang mempunyai tingkat pemahaman rendah dan sedang. Pada kelompok latar belakang pendidikan S1, responden yang memiliki tingkat pemahaman tinggi sebanyak 8 responden, dan tidak ditemukan responden yang mempunyai tingkat pemahaman rendah. Pada kelompok latar belakang pendidikan S2, responden yang memiliki tingkat pemahaman sedang sebanyak 3 responden.

Untuk mengetahui sebaran distribusi frekuensi tingkat pemahaman praktisi BMT terhadap PSAK 106 akuntansi *musyarakah* menurut kelompok latar belakang pendidikan ini, dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 4.7 Histogram tingkat pemahaman praktisi BMT terhadap PSAK 106 akuntansi *musyarakah* menurut latar belakang pendidikan

Dari histogram diatas nampak sekali bahwa responden yang mempunyai tingkat pemahaman tinggi, frekuensi yang terbanyak pada responden yang mempunyai latar belakang pendidikan S1 yaitu sebanyak 60 responden. Kemudian yang berpendidikan SMA sebanyak 7 responden, D3 sebanyak 4 responden, dan S2 sebanyak 3 responden.

Hasil analisis data yang didapat bisa disimpulkan bahwa latar belakang pendidikan mempengaruhi pemahaman seseorang. Sebagaimana yang ada dalam teori, Seseorang yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi akan lebih cepat menguasai bidangnya. Strauss dan Sayless menyatakan bahwa pekerjaan yang mudah dan sederhana dapat terselesaikan secara otomatis tanpa berpikir lagi yang berarti untuk berhasil menyelesaikan tanpa membutuhkan perencanaan, analisis maupun penguasaan teori sehingga karyawan yang berpendidikan tinggi biasanya lebih banyak menuntut pada diri sendiri maupun pada pihak perusahaan.⁶

3) Tingkat Pemahaman Responden Menurut Lamanya Bekerja

Lamanya seorang praktisi BMT menggeluti bidang tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap pemahamannya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaannya. Dalam penelitian ini tingkat pemahaman responden menurut lamanya bekerja dapat diketahui berdasarkan penguasaan responden menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner, dimana apabila tingkat pemahaman responden terhadap PSAK No. 106 Akuntansi *Musyarakah*, dengan kelompok lama bekerja, maka akan diperoleh hasil seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini.

⁶ <http://www.masbow.com/2009/11/komitmen-karyawan-pada-perusahaan.html>, Tanggal 15 Nov 2009

Tabel. 4.15 Tingkat Pemahaman Responden Menurut Lama Bekerjanya

Crosstab					
Count					
		Y Pemahaman PSAK			Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	
X3 Lama Bekerja	Kurang dari 3 tahun	18	26	0	44
	antara 3 - 5 tahun	1	17	5	23
	antara 5 - 7 tahun	0	4	3	7
Total		19	47	8	74

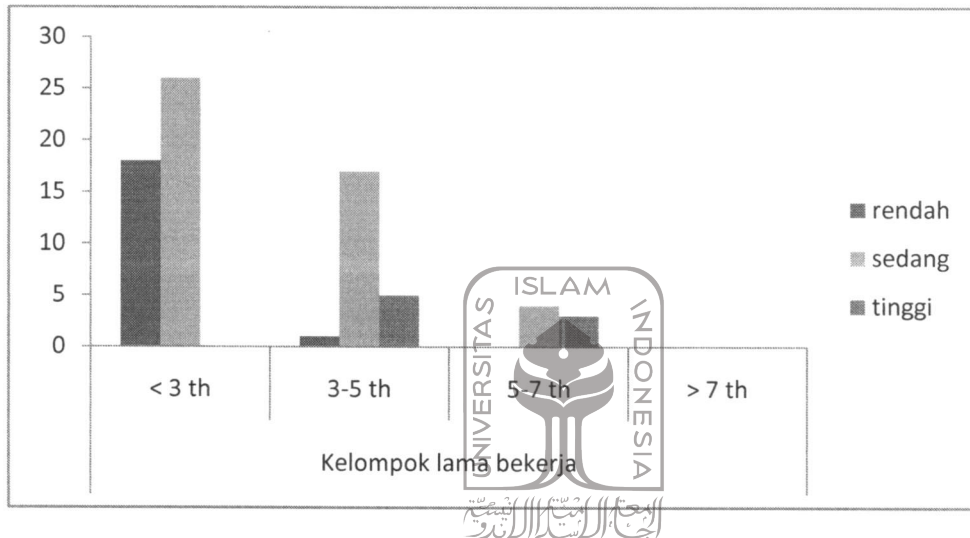
Sumber : Data Primer

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada kelompok kurang dari 3 tahun lama bekerja, ada 44 responden. Jadi berdasarkan penelitian ini banyak responden mempunyai penguasaan materi yang cukup tinggi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner. Secara lebih detail, prosentase tingkat pemahaman pada masing-masing kelompok adalah sebagai berikut pada kelompok lama bekerja kurang dari 3 tahun, responden yang mempunyai tingkat pemahaman sedang sebanyak 26 responden dan yang mempunyai tingkat pemahaman rendah sebanyak 18 responden. Akan tetapi tidak ada yang mempunyai pemahaman tinggi.

Kemudian, pada kelompok lama bekerja 3 sampai 5 tahun. Responden yang memiliki tingkat pemahaman tinggi sebanyak 5 responden, dan 17 responden yang mempunyai tingkat pemahaman sedang, serta yang rendah ada 1 responden. Pada kelompok lama bekerja 5 sampai 7 tahun, responden yang memiliki tingkat pemahaman tinggi sebanyak 3 responden, 4

responden yang mempunyai tingkat pemahaman sedang, dan tidak ada yang mempunyai pemahaman rendah

Untuk lebih jelasnya mengenai sebaran distribusi frekuensi untuk tingkat pemahaman menurut kelompok lama bekerja, dapat dilihat pada histogram berikut:



Gambar 4.8 Histogram tingkat pemahaman responden menurut lama bekerja

Dari histogram diatas tampak sekali bahwa frekuensi responden yang mempunyai tingkat pemahaman sedang, cukup merata pada tiap kelompoknya. Dalam penelitian ini kelompok responden yang lamanya bekerja kurang dari 3 tahun mempunyai frekuensi tertinggi dengan *range* yang cukup besar.

Salah satu teori yang membenarkan bahwa lama bekerja juga mempengaruhi pemahaman adalah Strauss dan Sayless yang menyatakan bahwa Seseorang yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi akan lebih cepat menguasai bidangnya, pekerjaan yang mudah dan sederhana dapat terselesaikan secara otomatis tanpa berpikir lagi yang berarti untuk berhasil menyelesaikan tanpa

membutuhkan perencanaan, analisis maupun penguasaan teori sehingga karyawan yang berpendidikan tinggi biasanya lebih banyak menuntut pada diri sendiri maupun pada pihak perusahaan.⁷

4) Tingkat Pemahaman Responden Menurut Frekuensi Mengikuti Pelatihan

Seseorang yang sering mengikuti pelatihan terhadap bidang tertentu diharapkan akan mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik. Dalam penelitian ini, apabila dilakukan *crosstabs* antara tingkat pemahaman responden terhadap PSAK 106 akuntansi *musyarakah* dengan kelompok frekuensi mengikuti pelatihan, maka akan diperoleh hasil seperti yang terlihat pada label dibawah ini.

Tabel. 4.16 Tingkat Pemahaman Responden Menurut Frekuensi Mengikuti Pelatihan



Count		Y Pemahaman PSAK			Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	
X4 Frekuensi Training	1 - 3 kali	17	35	1	53
	4 - 6 kali	2	11	5	18
	7 - 9 kali	0	1	2	3
Total		19	47	8	74

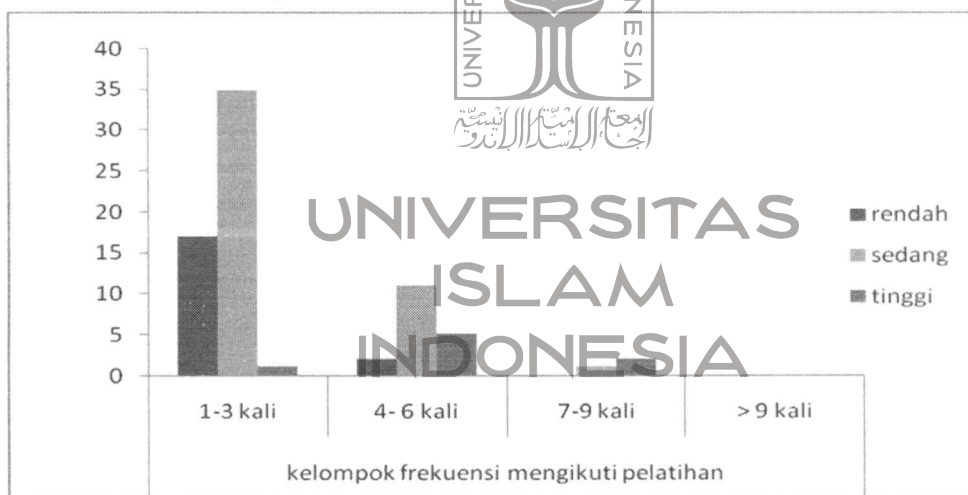
Sumber : Data Primer

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada kelompok responden yang frekuensi mengikuti pelatihan antara 1 sampai 3 kali, 1 responden berada pada kategori tinggi tingkat pemahamannya dan 35 responden pada kategori sedang, serta ada 17 responden yang pemahamannya rendah. Pada kelompok frekuensi

⁷ <http://www.masbow.com/2009/11/komitmen-karyawan-pada-perusahaan.html>, Tanggal 15 Nov 2009

mengikuti pelatihan antara 4 sampai 6 kali, responden yang memiliki tingkat pemahaman tinggi sebanyak 5 responden, sedang 11 responden, dan 2 responden yang mempunyai tingkat pemahaman rendah. Pada kelompok frekuensi mengikuti pelatihan antara 7 sampai 9 kali, responden yang memiliki tingkat pemahaman tinggi sebanyak 2 responden, pemahaman pada tingkat sedang yaitu 1 responden, dan tidak ditemukan responden yang mempunyai tingkat pemahaman rendah.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai sebaran distribusi frekuensi tingkat pemahaman responden menurut frekuensinya mengikuti pelatihan, bisa dilihat pada histogram di bawah ini.



Gambar 4.9 Histogram tingkat pemahaman responden menurut frekuensi mengikuti pelatihan

Dari histogram diatas tampak bahwa responden yang mempunyai tingkat pemahaman sedang cukup merata pada setiap kelompoknya. Frekuensi responden yang mempunyai tingkat pemahaman tinggi yang terbanyak terletak pada responden yang mempunyai frekuensi mengikui pelatihan antara 1 sampai

3 kali. Kemudian disusul frekuensi mengikuti pelatihan antara 4 sampai 6 kali. Selanjutnya responden yang mempunyai frekuensi mengikuti pelatihan antara 7 sampai 9 kali. Terakhir, tidak ada responden yang mempunyai frekuensi mengikuti pelatihan lebih dari 9 kali.

Dari hasil analisis data diatas dan dikaitkan dengan teori tentang definisi pelatihan, bahwa pelatihan merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja karyawan⁸, dapat diketahui bahwa praktisi yang hanya mengikuti pelatihan 1 sampai tiga kali tidak kalah tingkat pemahamannya dengan praktisi yang mengikuti pelatihan lebih dari tiga kali.

b. Deskripsi Mengenai Jawaban Responden terhadap Butir Angket Skala Pemahaman

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir-butir angket skala pemahaman, secara umum responden sudah tepat dalam menjawab butir-butir pertanyaan dalam angket. Namun, terdapat beberapa nomor butir angket dimana masih cukup banyak responden yang menjawab tidak tepat.

Dalam butir pertanyaan nomor 1 misalnya (lihat lampiran, butir pertanyaan skala pemahaman nomor urut 1), mengenai pertanyaan definisi musyarakah, menurut hasil angket ada 94,24% responden yang menjawab benar. Kemudian yang menjawab salah (B dan C) sebanyak 6,74% responden. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

⁸ Henri Simamora, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta; STIE YKPN, 2006), hal. 273

Tabel. 4.17 Tingkat Jawaban responden terhadap butir pertanyaan definisi *Musyarakah* menurut PSAK No. 106

Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase
Benar (A)	69	93,24%
Salah (B dan C)	5	6,74%
Jumlah	74	100%

Sumber : Data Primer

Berdasarkan hasil penelitian ini, meskipun tingkat pemahaman praktisi BMT pada PSAK 106 tersebut pada kategori tinggi yaitu 93,24% (lihat tabel pemahaman), namun masih ada 6,74% yang menjawab salah, tentang definisi *musyarakah* secara benar menurut PSAK. Hal ini tentunya bisa dijadikan acuan kepada para praktisi BMT yang seyogyanya mereka paham dengan konsep dasar akuntansi tentang akad-akad pembiayaan di lembaga mereka, mulai dari definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan.

Pada dasarnya BMT sebagai sebuah lembaga keuangan idealnya memiliki praktisi yang memiliki pengetahuan dan pemahaman memadai tentang hal-hal yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam bidang keuangan dan perbankan, tentunya dalam hal akuntansi. Hal-hal yang terkait dengan akuntansi adalah definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan. Dalam hal ini pemahaman praktisi BMT tentang definisi tentang akad *musyarakah* juga dapat dilihat dari jawaban mereka atas pertanyaan nomor 2 (lihat lampiran, butir pertanyaan skala pemahaman nomor urut 2), yaitu mengenai definisi mitra aktif dalam akad *musyarakah*. Pada pertanyaan ini 93,24% responden menjawab dengan

tepat, yaitu jawaban A. sedangkan sisanya, yaitu sebanyak 6,74% responden tidak menjawab dengan tepat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 4.18 Tingkat jawaban responden terhadap butir pertanyaan No. 2

Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase
Benar (A)	69	93,24%
Salah (B dan C)	5	6,74%
Jumlah	74	100%

Sumber : Data Primer

Selanjutnya, hal yang juga patut untuk dijadikan perhatian adalah jawaban responden pada pertanyaan nomor 4 (lihat lampiran, butir pertanyaan skala pemahaman nomor urut 4). Pada butir pertanyaan ini (mengenai pengakuan hasil usaha *musyarakah*), sebagian besar responden tidak menjawab sesuai dengan PSAK 106. Untuk mengetahui lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 4.19 Tingkat jawaban responden terhadap butir pertanyaan tentang pengakuan hasil usaha *musyarakah*

Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase
Benar (A)	58	78,38%
Salah (B dan C)	16	21,62%
Jumlah	74	100%

Sumber : Data Primer

Pada butir pertanyaan ini 78,38% responden yang menjawab A. sedangkan 21,62% yang menjawab B dan C.

Untuk mengukur pemahaman praktisi BMT terhadap akuntansi *musyarakah* maka dapat dilihat dari jawaban mereka atas pertanyaan nomor 6 (lihat lampiran pertanyaan skala pemahaman butir pertanyaan nomor 6). Dapat di ambil kesimpulan bahwa banyak dari mereka yang menjawab A, yaitu 83,78%. dan yang lainnya menjawabnya dengan memilih alternative jawaban yang lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel. 4.20 Tingkat jawaban responden terhadap butir pertanyaan tentang pengukuran akuntansi *musyarakah*

Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase
Benar (A)	62	83,78%
Salah (B dan C)	12	16,22%
Jumlah	74	100%

Sumber : Data Primer

Dalam hal penyajian sebaiknya praktisi BMT paham akan bentuk-bentuk penyajian pembiayaan *musyarakah*, baik itu BMT sebagai mitra aktif maupun mitra pasif. Oleh karena itu dapat kita lihat bersama sejauh mana mereka paham tentang hal tersebut. Ternyata pada pertanyaan nomor 10 (lihat lampiran skala pemahaman butir pertanyaan nomor 10), dapat diketahui bahwa ada 72,97% responden yang menjawab dengan tepat yaitu alternative jawaban A. dan sisanya menjawab B atau C yaitu 27,03%. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 4.21 Tingkat jawaban responden terhadap butir pertanyaan tentang penyajian akuntansi *musyarakah*

Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase
Benar (A)	54	72,97%
Salah (B dan C)	20	27,03%
Jumlah	74	100%

Sumber : Data Primer

Terkait masalah pengungkapan, alangkah baiknya seorang praktisi BMT paham tentang cara mengungkapkan transaksi yang terjadi pada akad *musyarakah* dari awal akad sampai berakhirnya masa akad. Oleh karena itu perlu kita lihat dari seberapa banyak pertanyaan pada soal nomor 12 (lihat lampiran skala pemahaman butir pertanyaan nomor 12) yang berhasil dijawab dengan tepat oleh praktisi BMT. Maka hasilnya dari jawaban A, ternyata yang menjawab sebanyak 75,67%, yang lain menjawab B atau C yaitu sebanyak 24,33%. Itu semua dikarenakan keterbatasan sosialisasi tentang hal tersebut, jadi praktisi kurang mengerti tentang pengungkapan suatu transaksi keuangan. Untuk lebih jelasnya. lihat tabel dibawah ini.

Tabel. 4. 22 Tingkat jawaban responden terhadap butir pertanyaan tentang pengungkapan akuntansi *musyarakah*

Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase
Banar (A)	56	75,67%
Salah (B dan C)	18	24,33%
Jumlah	74	100%

Sumber : Data Primer

Jika ilmu hanya berupa teori, maka itu akan semakin lengkap jika juga dipraktekan, oleh karena itu dalam mempraktekan akuntansi

musyarakah ini harus dipelajari dengan seksama. Dalam soal nomor 13 (lihat lampiran pada skala pemahaman yaitu butir ke 13) maka dapat kita lihat dan kita simpulkan hasil dari pengaplikasian teori yang berhubungan dengan akuntansi syariah. Disini disajikan contoh kasus tentang transaksi-transaksi yang terjadi pada saat pembiayaan *musyarakah*. Pada kenyataannya responden yang menjawab benar ada 72,97% responden, sisanya menjawab B atau C. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel. 4.23 Tingkat jawaban responden terhadap butir pertanyaan tentang transaksi kasus dan proses pencatatannya menurut PSAK No. 106

Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase
Benar (A)	54	72,97%
Salah (B dan C)	20	27,03%
Jumlah	74	100%

Sumber : Data Primer

B. Hasil Uji Statistik Mengenai Perbedaan Pemahaman Praktisi BMT pada PSAK No. 106 Akuntansi *Musyarakah*) Dilihat Dari Usia, Lama Bekerja, Latar Belakang Pendidikan, dan Frekuensi Mengikuti Pelatihan

Agar hasil yang diperoleh melalui kuesioner mempunyai keandalan dan kekuatan argumentasi, maka dibutuhkan uji statistik terhadap elemen-elemen yang menjadi fokus penelitian. Berikut ini adalah hasil uji statistik mengenai hubungan antara usia, latar belakang pendidikan, lamanya bekerja dan frekuensi mengikuti pelatihan terhadap pemahaman praktisi BMT tentang PSAK 106 akuntansi *musyarakah*.

Berdasarkan uji validitas instrumen penelitian dengan *pearson product moment* (r), diperoleh hasil bahwa instrumen penelitian berupa angket yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai validitas yang cukup. Dalam arti instrumen penelitian tersebut dapat digunakan untuk proses selanjutnya, yaitu untuk menguji hubungan variabel bebas dengan variabel terikat.

Untuk mengetahui tingkat hubungan antara masing-masing variabel, yaitu usia, latar belakang pendidikan, lama bekerja dan frekuensi mengikuti pelatihan terhadap pemahaman, secara lebih jelasnya dapat dilihat dalam lampiran. Hasil dari perhitungan menggunakan SPSS 17, angka koefisien kontingensi untuk variabel usia (X1) tanpa dipengaruhi oleh variabel X2, X3, X4 terhadap Y adalah 0,666. Koefisien kontingensi variabel latar belakang pendidikan (X2) tanpa dipengaruhi oleh variabel X1, X3, X4 terhadap Y adalah 0,686. Koefisien variabel lama bekerja (X3) tanpa dipengaruhi oleh variabel X1, X2, X4 terhadap Y adalah 0,614, dan koefisien kontingensi variabel frekuensi mengikuti pelatihan (X4) tanpa dipengaruhi oleh variabel X1, X2, X3 terhadap Y adalah 0,597. Berikut ini disajikan taraf koefisien kontingensi dari uji masing-masing variabel.

Tabel. 4.24 Koefisien Kontingensi

Variabel	Koefisien Kontingensi	signifikansi	chi square	df
X1	0,666	0,000	58,922	16 (26,296)
X2	0,686	0,000	65,601	24 (35,415)
X3	0,614	0,000	44,686	16 (26,296)
X4	0,597	0,001	40,960	16 (26,296)

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa taraf koefisien kontingensi dari masing-masing variabel penelitian. Untuk usia (X1) sebesar 0,666.

latar belakang pendidikan (X2) sebesar 0,686, lama bekerja (X3) sebesar 0,614, dan frekuensi mengikuti pelatihan (X4) sebesar 0,597.

C. Pembahasan Hasil penelitian

Seperti yang sudah dikemukakan pada sub bab di atas, bahwa atas dasar angket yang telah disebarkan kepada responden para praktisi BMT di lingkungan Puskopsyah BMT Sejahtera Provinsi Lampung, diketahui bahwa para praktisi BMT yang terdiri dari manajer dan staf akuntansinya mempunyai tingkat pemahaman yang tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang berada dalam kategori tinggi tingkat pemahamannya hanya mencapai prosentase 10,8%. Selanjutnya yang berada dalam kategori sedang sebanyak 63,5% dan yang berkategori rendah sebesar 25,7%.

Selain itu, setelah diketahui tingkat pemahaman responden yang berada dalam kategori tinggi cukup besar, maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah usia, lamanya pekerjaan, latar belakang pendidikan, dan frekuensinya mengikuti pelatihan mempunyai hubungan dengan tingginya pemahaman responden terhadap PSAK 106 Akuntansi *Musyarakah*? Hasil ini tentunya sangat menarik untuk dikaji, karena berdasarkan penyebaran angket kepada responden diketahui bahwa masih cukup banyak BMT yang menjadi anggota Puskopsyah ini belum menerapkan PSAK No. 106 di institusi BMT mereka.

Berdasarkan hasil pengujian antar variabel yang telah dilakukan dengan menggunakan tabulasi silang (*crosstabs*), analisis koefisien

kontingensi, dan uji *chi square*, terdapat beberapa temuan yang cukup menarik untuk dibahas. Beberapa temuan tersebut akan diuraikan pada bagian dibawah ini.

Pertama, berdasarkan pengelompokkan tingkat pemahaman, diketahui bahwa tingkat pemahaman responden secara umum berada pada kategori sedang mencapai 63,5%, kemudian yang berada dalam kategori tinggi hanya sebesar 10,8% dan ternyata masih ditemukan responden yang mempunyai pemahaman rendah, yaitu sebesar 25,7%. Tidak banyaknya tingkat pemahaman responden yang berkategori tinggi dan adanya responden yang masih mempunyai pemahaman rendah terhadap PSAK 106 akuntansi *musyarakah* ini merupakan realita yang sebenarnya terjadi. mengingat masih cukup banyak BMT yang belum menerapkan PSAK 106.

Kedua, berdasarkan uji analisis hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, ternyata tingkat pemahaman responden ini mempunyai hubungan dengan variabel usia, latar belakang pendidikan, lama kerja dan frekuensi mengikuti pelatihan, dengan tingkat keeratan hubungan yang sedang.

Berdasarkan uji statistik, hasilnya menunjukkan bahwa dari semua variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel usia, latar belakang pendidikan, dan frekuensi mengikuti pelatihan, terhadap variabel pemahaman, secara bersama-sama mempunyai hubungan yang signifikan terhadap pemahaman praktisi BMT terhadap PSAK No. 106.

Akuntansi *Musyarakah*. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah signifikan. Yang artinya, antara usia, lamanya bekerja, latar belakang pendidikan, dan frekuensi mengikuti pelatihan mempunyai hubungan yang signifikan terhadap pemahaman responden terhadap PSAK No. 106 akuntansi *musyarakah*.

Ketiga, faktor yang nilainya sangat besar dalam mempengaruhi pemahaman adalah latar belakang pendidikan. Menurut distribusi frekuensi diketahui bahwa sebagian besar responden berlatar belakang sarjana (S1) yaitu mencapai 81,08%. Kemudian disusul responden yang berlatar belakang pendidikan SMA yaitu 9,46% dan berlatar belakang pendidikan D3 sebanyak 5,41%, serta berlatar belakang S2 pendidikan sebanyak 4,05% responden.

Faktor latar belakang pendidikan mempunyai hubungan yang besar dikarenakan, dengan perbedaan latar belakang pendidikannya, maka berbeda pula tingkat pemahamannya. Disamping itu, responden yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidangnya akan lebih mudah menyerap materi-materi yang berkaitan. Terlebih lagi, hal ini didukung oleh usia 20 sampai 30 tahun, serta lama bekerja dan frekuensi mengikuti pelatihan yang cukup.

Bila variabel latar belakang pendidikan ini dihubungkan dengan tingkat pemahaman (lihat tabel), ternyata masih ditemukan responden yang mempunyai tingkat pemahaman rendah, dan hanya ada 8 responden

yang mempunyai tingkat pemahaman tinggi. Sedangkan dari kelompok responden yang berlatar belakang sarjana (S1), ada 8 responden mempunyai tingkat pemahaman tinggi terhadap PSAK 106. Tidak demikian dari kelompok responden yang berlatar belakang Diploma 3, tidak terdapat responden yang mempunyai pemahaman tinggi, akan tetapi terdapat 4 responden yang berpemahaman sedang. Untuk latar belakang pendidikan S2 terdapat 3 responden yang berpemahaman sedang. Sedangkan untuk kelompok responden berlatar belakang SMA sebanyak 5 responden mempunyai tingkat pemahaman rendah dan 2 responden mempunyai tingkat pemahaman sedang.

Keempat, dalam penelitian ini urutan nomor dua yang mempengaruhi pemahaman adalah variabel usia. Berdasarkan distribusi frekuensi seperti terlihat pada subbab Karakteristik responden, diketahui bahwa pada variabel usia, sebagian besar responden berusia antara 20 sampai 30 tahun, yaitu sebanyak 68,91%. Kemudian disusul dengan responden yang berusia 31 sampai 40 tahun sebanyak 25,67%. bila variable usia ini dihubungkan dengan tingkat pemahaman, maka pada kelompok umur 20 sampai 30 tahun sebanyak 2 responden berada pada tingkat pemahaman yang tinggi dan 36 responden pada level sedang. Sedangkan pada kelompok usia 31 sampai 40 tahun, sebanyak 2 responden berada pada level pemahaman tinggi.

Tingginya tingkat pemahaman responden pada usia 20 sampai 30 tahun, yang pada rentang waktu ini merupakan usia produktif, merupakan

suatu fenomena yang menarik. karena, mengingat apa yang sudah disebutkan pada landasan teori, bahwa atas landasan usia, data kecerdasan seseorang akan meningkat terus dan mencapai titik optimal antara 20 sampai 30 tahun. Jadi berdasarkan penelitian ini bisa dikatakan bahwa perbedaan faktor usia mempunyai hubungan terhadap pemahaman. Berdasarkan analisis hubungan variabel usia dengan variable pemahaman, hasilnya menunjukkan bahwa variable usia mempunyai hubungan yang signifikan terhadap pemahaman praktisi BMT terhadap PSAK 106.

Kelima, faktor yang ketiga adalah lama bekerja di BMT. Menurut distribusi frekuensi diketahui bahwa perbedaan lamanya responden bekerja di institusi BMT kurang merata. Responden terbanyak bekerja di institusi BMT antara 1-3 tahun sebanyak 59,46%. Kemudian responden yang bekerja antara 3 sampai 5 tahun sebanyak 31,08%, responden yang bekerja antara 5 sampai 7 tahun sebanyak 9,45%, dan tidak ditemukan responden yang bekerja diatas 7 tahun.

Bila variabel lamanya bekerja ini dihubungkan dengan tingkat pemahaman, dapat diketahui bahwa pada kelompok lama bekerja kurang dari 3 tahun, 26 responden berada pada level sedang, sedangkan 18 responden berada pada kategori rendah, dan tidak ada yang mempunyai pemahaman pada level tinggi. Kemudian pada kelompok responden yang bekerja antara 3 sampai dengan 5 tahun, terdapat responden yang berada pada tingkat pemahaman yang tinggi, responden kebanyakan mempunyai pemahaman sedang, yaitu terdapat 17 responden. Pada kelompok

responden yang bekerja antara 5 sampai 7 tahun ada 4 responden yang berada pada tingkat pemahaman yang sedang.

Berdasarkan analisis hubungan variabel lama bekerja dengan variabel pemahaman, hasilnya menunjukkan bahwa variabel lama bekerja mempunyai hubungan yang signifikan terhadap pemahaman praktisi BMT terhadap PSAK No.106. Jadi, berdasarkan penelitian ini ternyata bisa dibuktikan melalui uji statistik mengenai hubungan faktor lama bekerja terhadap pemahaman praktisi BMT terhadap PSAK No.106 Akuntansi *Musyarakah*.



Besarnya tingkat pemahaman responden pada responden yang bekerja antara 1 sampai 3 tahun mengindikasikan bahwa responden sebenarnya sudah cukup memahami dasar-dasar teori maupun praktek Akuntansi *musyarakah* ini. Walaupun mereka bekerja kurang dari 3 tahun, ini tidak berpengaruh meskipun usianya sudah diluar masa produktif dan latar belakang pendidikannya kurang sesuai, namun bila responden sudah aktif dalam memahami segala hal yang berhubungan dengan aktivitas BMT maka bukan tidak mungkin responden akan memahami pekerjaannya.

Keenam, faktor terakhir yang juga mempengaruhi pemahaman adalah frekuensi responden mengikuti pelatihan, seminar, atau kegiatan semacam itu. Menurut distribusi frekuensi diketahui bahwa 72,97% responden mengikuti pelatihan sekitar 1 sampai 3 kali. Dari jumlah ini,

bila frekuensi pelatihan dikaitkan dengan tingkat pemahaman maka 47 responden berada pada tingkat pemahaman sedang dan 8 responden berada pada tingkat pemahaman tinggi. Kemudian disusul dengan responden yang mengikuti pelatihan sekitar 4 sampai 6 kali sebanyak 22,97% responden yang mengikuti pelatihan sekitar 7 sampai 9 kali sebanyak 4,06%. Jadi, meskipun sebanyak 72,97% responden hanya mengikuti pelatihan/seminar antara 1 sampai 3 kali, dan 22,97% responden mengikuti pelatihan/seminar antara 4 sampai 6 kali, namun tingkat pemahaman responden dalam kategori sedang.

Berdasarkan analisis hubungan variabel frekuensi mengikuti pelatihan terhadap variabel pemahaman, hasilnya menunjukkan bahwa variabel perbedaan frekuensi mengikuti pelatihan mempunyai hubungan yang signifikan terhadap pemahaman praktisi BMT terhadap PSAK No.106 meskipun hubungannya rendah. Jadi, berdasar penelitian ini ternyata bisa dibuktikan melalui uji statistik mengenai hubungan antara variabel frekuensi mengikuti pelatihan terhadap pemahaman.

Ketujuh, dari jawaban-jawaban responden terhadap butir-butir pertanyaan dalam angket, secara umum responden mempunyai tingkat pemahaman yang sedang. Hal ini dapat dimungkinkan karena pada dasarnya teori-teori tentang akad *musyarakah* sudah dikenal dengan cukup baik.

Namun demikian, berdasarkan hasil dari angket ini pula ada beberapa hal yang cukup menarik untuk dicermati. Atas jawaban

responden, seperti terlihat dari table 4.16 pada sub bab diatas, meskipun tingkat pemahaman praktisi BMT pada PSAK No.106 tersebut pada kategori sedang yaitu 63,51% (lihat table 4.11) namun masih ada, 6,74% yang menjawab dengan tidak tepat tentang definisi *musyarakah* menurut PSAK 106. Sedangkan sisanya menjawab dengan kurang tepat. Hal ini patut menjadi perhatian, karena masih ada segelintir praktisi yang disatu sisi mereka cukup paham terhadap PSAK 106 namun disisi lain mereka sendiri masih bingung untuk mendefinisikan akad *musyarakah* sesuai dengan PSAK 106. Hal ini bisa terjadi, sangat dimungkinkan belum tersosialisasikannya PSAK 106 ke pengelola BMT tersebut, sehingga meskipun mereka cukup paham namun karena belum ada kebijakan dari pengelola sehingga mereka tidak dapat mengaplikasikannya secara langsung. Dari sini tergambar bahwa keberadaan PSAK 106 tersebut masih membutuhkan proses untuk sampai ke penerapannya secara menyeluruh.

Sedangkan pada pertanyaan skala pemahaman nomor 2 seperti yang sudah disebutkan pada tabel 4.17 mengenai definisi mitra aktif ada 93,24% responden menjawab dengan tepat. Sedangkan sisanya 6,74% responden tidak menjawab dengan tepat. Dari tabel tersebut jelas terlihat bahwa ternyata masih ada responden yang belum memahami definisi *musyarakah* mitra aktif, yaitu sekitar 6,74%. Hal ini haruslah dicermati mengingat BMT merupakan sebuah lembaga keuangan sehingga praktis-praktisnya selayaknya mempunyai pemahaman yang lebih baik mengenai

hal-hal yang berkaitan dengan lembaga keuangan (terutama yang bersifat umum). Tujuannya adalah agar praktisi dapat memberikan informasi yang tidak menyesatkan kepada nasabah khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

Selanjutnya, pada butir pertanyaan nomor 4 seperti tersebut pada table 4.18 (pengakuan hasil usaha *musyarakah*), disana disebutkan bahwa 78,38% responden yang dapat menjawab dengan tepat, sedangkan 21,62% nya tidak tepat menjawab. Sepertinya para praktisi BMT belum mengetahui/memahami bahwa menurut PSAK 106, bahwa pengakuan pendapatan usaha musyarakah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah.

Dalam butir pertanyaan tentang pengukuran akuntansi musyarakah disana disebutkan pula bahwa responden yang menjawab benar adalah 83,78% dan sisanya sebanyak 16,22% yang menjawabnya dengan tidak tepat.

Berkaitan dengan pertanyaan penyajian laporan keuangan usaha *musyarakah*, pada butir pertanyaan nomor 10, ternyata ada 72,97% responden yang menjawabnya dengan tepat, sedangkan sisanya 27,03% responden menjawab dengan tidak tepat. Mungkin ini disebabkan dengan *software computer* yang digunakan pada BMT mereka yang belum disesuaikan dengan PSAK.

Pada kasus pencatatan transaksi akuntansi dalam butir pertanyaan nomor 13. Responden banyak yang menjawab A yaitu 72,97% responden, untuk responden yang menjawab alternatif jawaban B atau C, yaitu 27,03%. Dengan melihat dari hasil ini alangkah lebih baik jika selaku pemilik kebijakan dalam hal lembaga keuangan khususnya BMT, melakukan sosialisasi kepada para praktisinya untuk memahami pencatatan transaksi *musyarakah* secara baik dan benar sesuai dengan standar pencatatan akuntansi yang telah disahkan, yaitu PSAK 106.

Kedelapan, atas dasar uji statistik yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa variabel bebas yang dipakai dalam penelitian ini yaitu usia, lamanya bekerja, latar belakang pendidikan, dan frekuensi mengikuti latihan mempunyai hubungan yang signifikan terhadap pemahaman responden terhadap PSAK No. 106 akuntansi *musyarakah*. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan “ada perbedaan pemahaman praktisi BMT tentang PSAK No. 106 Akuntansi *Musyarakah* jika dilihat dari usia, lamanya bekerja, latar belakang pendidikan, dan frekuensi mengikuti pelatihan. Atas dasar hasil uji statistik tersebut, maka hipotesis tersebut diterima.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa;

1. Responden yang merupakan praktisi BMT anggota Puskopsyah di Provinsi Lampung yang terdiri dari Manajer dan staf akuntansinya, pada umumnya mempunyai tingkat pemahaman yang sedang terhadap PSAK 106 Akuntansi *Musyarakah*. Berdasarkan hasil angket yang disebarkan, responden yang berada pada kategori tinggi hanya mencapai 10,8%, sedangkan 63,5% berada pada kategori sedang, dan yang berada pada kategori rendah sebanyak 25,7%.

Dengan demikian terkait realitas ini, ternyata dari tingkat pemahaman praktisi BMT tersebut belum sepenuhnya diterapkan dalam praktek. Hal ini didasarkan pada hasil penyebaran angket untuk bagian esai, diketahui bahwa 52,70% responden masih belum menerapkannya, sedangkan 20,27% lainnya masih dalam proses.

2. Berdasarkan hasil uji analisis hubungan antara variable bebas dengan variable terikat, ternyata antara variable usia, lama bekerja, latar belakang pendidikan dan frekuensi mengikuti pelatihan mempunyai hubungan dengan tingginya tingkat pemahaman responden. Berdasarkan uji statistik

menggunakan *Chi Square* hasilnya menunjukkan bahwa dari semua variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu usia, latar belakang pendidikan, lama bekerja di BMT dan frekuensi mengikuti pelatihan terhadap variabel pemahaman, secara bersama-sama mempunyai hubungan yang signifikan terhadap pemahaman praktisi BMT terhadap PSAK No. 106 Akuntansi *Musyarakah*. Sedangkan berdasarkan analisis koefisien kontingensi ternyata ada perbedaan pemahaman praktisi BMT tentang PSAK No. 106 Akuntansi *Musyarakah* jika ditinjau dari usia, latar belakang pendidikan, lama bekerja, dan frekuensi mengikuti pelatihan. Nilai dari masing-masing variabel tersebut antara lain; untuk usia sebesar (0,666), latar belakang pendidikan (0,686), lama bekerja (0,614), dan yang terakhir adalah frekuensi mengikuti pelatihan (0,597).



B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis mengamati masih ada kekurangan yang dianggap perlu untuk dibenahi oleh pihak-pihak yang terkait dengan lembaga keuangan mikro syariah (BMT). Oleh karena itu penulis mencoba memberikan beberapa saran yang berhubungan dengan manajemen BMT dengan harapan dapat bermanfaat.

1. Pemerintah melalui departemen yang terkait perlu mengadakan sosialisasi ke BMT-BMT mengenai akuntansi syari'ah yang berpedoman pada PSAK No. 101, yang tercakup didalamnya adalah PSAK No. 106 akuntansi *musyarakah*. Tujuannya adalah untuk lebih memaksimalkan pengetahuan.

kemampuan, keahlian dan pemahaman pengelola BMT terutama praktisi akuntansinya.

2. Mengingat variabel frekuensi mengikuti pelatihan sangat dirasa penting dalam menentukan tingkat pemahaman seseorang, maka ada baiknya jika pihak- pihak terkait serta manajer BMT untuk lebih menggiatkan pelatihan-pelatihan yang bersifat menunjang kegiatan aktivitas kelembagaan. Dengan demikian sumber daya manusia yang ada di BMT semakin baik dan berwawasan luas.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar Adnan. 2005. *Akuntansi Syari'ah. Arah. Prospek. dan Tantangannya*. Yogyakarta; UII Press.
- Akhyar Adnan. 1999. *Beberapa Issue Di Sekitar Pengembangan Lembaga Keuangan Berdasarkan Syariah*. Dalam ASBISINDO Wilayah Jateng-DIY.
- Ahmad Sumiyanto. 2008. *BMT Menuju Koperasi Modern*. Yogyakarta; Ises Publishing.
- Adiwarman Karim. 2003. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta; IIIT.
- Abin Syamsuddin Makmun. 2005. *Psikologi Pendidikan Perangkat Sistem Pengajaran Modal*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Abdul Halim. 2003. *Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*. (Ed.3) Yogyakarta ; UPP AMP YKPN.
- Baihaqi Abdul Majid. 2000. *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistim Syari'ah: Perjalanan Gagasan dan Gerakan BMT*. Jakarta: PINBUK.
- Dimiyati dan Mudjiono. 2002. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Burhan Bungin. 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta; Prenada Media.
- Chaplin. C.P. 1995. *Kamus Lengkap Psikologi*. Alih bahasa Kartini Kartono. Jakarta : Rajawali Press.
- Djarwanto PS dan Pangestu Subagyo. 1985. *Statistik Induktif*. (Ed. III). Yogyakarta : BPFE.
- Eni Iroh Hayati. *Pemahaman Praktisi BMT Di Yogyakarta Terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK NO. 59) Akuntansi Perbankan Syari'ah Produk Funding*. Tesis MSI UII Yogyakarta
- Edey dalam Muhamad. 2005. *Pengantar Akuntansi Syari'ah*. (Ed.2) Jakarta: Salemba Empat.
- Hertanto Widodo dkk. 1999. *PAS (Pedoman Akuntansi Syariah). Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil*. Jakarta : Mizan.

- Henri Simamora. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta; STIE YKPN.
- Husaini Usman dan R. Purnomo Setiady Akbar. 1995. *Pengantar Statistika*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah, 2001. (Ed. 1). Fatwa No. 06/DSN – MUI/IV/2000.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2002. *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syari'ah*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Istar Abadi. et.al.. *Pedoman Pengelolaan BMT*. Jakarta ; Pustaka PKSP.
- Ivan Rahmawan. 2005. *Kamus Istilah Akuntansi Syari'ah*. Yogyakarta; Pilar Media.
- Iwan Triyuwono. 2006. *Akuntansi Syari'ah*. Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Iwan Triyuwono. 1997. *Akuntansi Syari'ah dan Koperasi Mencari Bentuk Dalam Metafora Amanah*. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia.
- Iqbal Hasan. 2005, *Analisa Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Iqbal hasan, 2005, *Pokok-pokok Materi statistic 1 (statistic Deskriptif)* (Ed.II). Jakarta: Bumi Aksara.
- Ibnu Rusd, 1995, *Bidayatul Mujtahid, (terjemahan)*, Jakarta; Pustaka Amani
- Jonathan Sarwono, 2006, *metode Penelitian Kuntitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha ilmu.
- Karnaen A. Perwataadmaja, 1992, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta; P3EI UII.
- Muhammad. *Akuntansi Syari'ah; Refleksi Akuntansi Berorientasi Sosial dan Pertanggungjawaban*. Tesis MSI UII Yogyakarta.
- Mohammad Karsudin. 2008. *Pengaruh Pelatihan Perbankan Syari'ah Terhadap Pemahaman Konsep-konsep Syari'ah Pada Para Pegawai Bank Syari'ah di Yogyakarta*. Yogyakarta; STIS.

Mahyudi Al Rasyid. 2003. *Pengaruh Pemahaman Fiqh Mu'amalah dan Religiusitas Santri Terhadap Sikapnya Pada Bank Syari'ah; Studi Kasus Pada Santri Pondok Pesantren Sunan Pandan Arang*. Yogyakarta; STIS.

Muhamad. 2002. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta; UPP AMP YKPN.

Muhamad. 2000. *Prinsip-Prinsip Akuntansi Dalam Alqur'an*. Yogyakarta; UII-Press.

Muhammad. 2005. *Pengantar Akuntansi Syari'ah* (ed.). Jakarta; Salemba Empat.

Muhammad Ridwan. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta; UII Press.

Millah Vol. IV. No. 2. Januari 2005

Muhammad. 2000. *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta; UII Press.

Muhibbin Syah. 1997. *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Masri Singarimbun. Sofyan Efendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES.

Muhammad Syafi'i Antonio. 1999. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta; Tazkia Institute.

Mursyidi. 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung; Remaja Rosda Karya.

Nindyo Pramono. 1986. *Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya dan Koperasi Indonesia di dalam Perkembangan*. Yogyakarta : Taman Pustaka Kristen.

Nugroho Budi Yuwono. 1996. *Pengantar Statistik Ekonomi dan Perusahaan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Rosjidan. Dkk. 2001. *Belajar dan Pembelajaran*. Malang: FIP Universitas Negeri Malang.

Rifqi Muhammad. 2008. *Akuntansi Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta; P3EI.

Rosidi. 1999. *Teori Akuntansi ; Tujuan, Konsep, dan Struktur*. Jakarta; FEUI.

Revrison Baswir. 1997. *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta : BPFE.

- Soehardi Sigit. 1999. *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial Bisnis Manajemen*. Yogyakarta. Lukman Offset.
- Sofyan Syafri Harahap. 1997. *Akuntansi Islam*. Jakarta; Bumi Aksara.
- Sofyan Syafri Harahab. 1999. *Teori Akuntansi*. Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Suharsimi Arikunto. 1990. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- S. Nasution. 2000. *Berbagi Pendekatan Dalam Proses Belajar dan Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suharsimi Arikunto. 1986. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sugiono. 2005. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Saifuddin Azwar. 2000. *Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Saifuddin Azwar. 1998. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardi Sigit. 1999. *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial Bisnis Manajemen*. Bandung: Lukman Offset.
- Syaifuddin Azwar. 1999. *Penyusunan Skala Psikologi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Suharsimi Arikunto. 1997. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Syaifuddin Azwar. 1992. *Reabilitas dan Validitas*. Yogyakarta : Liberty.
- Sanafiah Faisal. 2005. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tim Penyusun Kamus Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Ed.2). Jakarta; Balai Pustaka.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. 2001. *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta: Djambatan.

Yanti Windyarti. 2007. *Skripsi; Persepsi Pedagang Kecil Di Pasar Kanjengan Terhadap Pembiayaan Mudharabah BMT Bina Umat Sejahtera Semarang*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

Zainal Mustafa. 1998. *Pengantar Statistik Deskriptif*. Yogyakarta; EKONOSIA.

Zulkfli dan Sulastiningsih. 1998. *Rerangka Konseptual Pelaporan Keuangan Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia.

<http://mr-perspektif.blog.friendster.com/2007/07/pemahaman>, 26 Mei 2004

<http://accounting.uui.ac.id/index.php?option=com>, 10 November 2006, 10:12:54

www.republika.com, 25 Maret 2009

<http://www.scribd.com/doc/4685462>, Kamis, 25 Juni 2009

<http://id.wikipedia.org/wiki/Umur>, Tanggal 14 Nov 2009

www.bmtalfath.com, Kamis, 03 Juli 2008 17:38



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ANGKET

“PEMAHAMAN PRAKTISI BMT DI LAMPUNG TERHADAP PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO. 106 AKUNTANSI MUSYARAKAH”



Oleh:

**Ika Trisnawati Alawiyah, S.EI
NIM : 07913149**

**PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2009**

Kepada

Yth. Bapak/Ibu/Sdr/Sdri. Praktisi BMT.....

Di –

Lampung

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, dalam proses menyelesaikan tugas akhir (tesis) pada Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan konsentrasi Ekonomi Islam, yang berjudul **“Pemahaman Praktisi BMT di Lampung Terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106 Akuntansi Musyarakah”** Oleh karenanya, kami memohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr/Sdri untuk mengisi angket ini.

Demikian, atas bantuannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalmu’alaikum Wr. Wb.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Lampung, 02 Desember 2009

Peneliti,

Ika Trisnawati Alawiyah, S.EI
NIM. 07913149

PETUNJUK PENGISIAN ANGKET/KUESIONER

1. Angket ini terbagi atas tiga bagian, yaitu:
 - a. Bagian pertama, berisi tentang identitas responden
 - b. Bagian kedua, berisikan pertanyaan seputar tingkat pemahaman
 - c. Bagian ketiga, berisi pertanyaan-pertanyaan pendukung penelitian.
2. Mohon seluruh pertanyaan dijawab menurut pengetahuan dan pemahaman yang Bapak/Ibu/Sdr/Sdri miliki.



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

BAGIAN I

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama responden :(boleh samaran)
2. Jabatan di BMT :
3. No. Telephone :

Berilah tanda silang (X) atau lingkari pada jawapan yang anda pilih.

1. Umur responden : (pilih salah satu)
 - a. 20 s/d 30 tahun
 - b. 31 s/d 40 tahun
 - c. 41 s/d 50 tahun
 - d. Diatas 50 tahun
2. Lama bekerja di BMT : (pilih salah satu)
 - a. Kurang dari 3 tahun
 - b. Lebih dari 3 tahun dan kurang dari 5 tahun
 - c. Lebih dari 5 tahun dan kurang dari 7 tahun
 - d. Lebih dari 7 tahun
3. Latar belakang pendidikan :
 - a. SMA/SMK/MAN/.....(sebutkan)
 - b. D3 Jurusan.....(sebutkan)
 - c. S1 Jurusan.....(sebutkan)
 - d. S2.....(sebutkan)
4. Pelatihan/seminar/workshop atau kegiatan lain yang berkaitan dengan operasional BMT yang pernah diikuti:
 - a. 1 s/d 3 kali
 - b. 4 s/d 6 kali
 - c. 7 s/d 9 kali
 - d. Lebih dari 9 kali
5. Sebutkan pelatihan/seminar/workshop atau kegiatan lain yang berkaitan dengan operasional BMT yang pernah diikuti tersebut:
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.

BAGIAN II

ANGKET/KUESIONER UNTUK SKALA PEMAHAMAN

Berilah tanda silang (X) atau lingkari pada jawaban yang anda pilih.

1. Definisi musyarakah adalah?
 - a. Akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.
 - b. Akad kerja sama antara produsen dan konsumen dalam memasarkan produknya.
 - c. Akad kerja sama antara pemilik barang dengan si penyewa barang dengan kesepakatan atau syarat tertentu.
2. Yang disebut mitra aktif adalah :
 - a. Mitra yang mengelola usaha mmusyarakah, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut.
 - b. Mitra yang tidak ikut mengelola usaha masyarakah.
 - c. Mitra yang mengelola dana dimana-mana dalam bentuk akad musyarakah.
3. Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif maka kerugian tersebut ditanggung oleh?
 - a. mitra aktif
 - b. mitra pasif
 - c. kedua-duanya sesuai dengan modal yang disertakan
4. Pengakuan hasil usaha musyarakah diakui sebagai, kecuali?
 - a. Pengakuan pendapatan usaha musyarakah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah
 - b. Pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban
 - c. Kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai asset musyarakah
5. Apabila pembiayaan musyarakah melewati satu periode pelaporan, maka?
 - a. Keuntungan atau pendapatan pembiayaan musyarakah diakui pada saat terjadinya pembayaran

- b. Kerugian yang terjadi diakui setelah periode terjadinya kerugian tersebut
 - c. Menambah pembiayaan musyarakah apabila dalam pembiayaan musyarakah menggunakan metode bagi hasil
6. Akuntansi musyarakah diukur ke dalam?
- a. Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang disisihkan
 - b. Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima
 - c. Dalam bentuk asset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis apabila asset tersebut tidak akan dikembalikan kepada mitra pasif
7. Asset tetap musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan, kecuali?
- a. Penyusutan atas perawatan asset yang kurang baik
 - b. Penyusutan yang dihitung dengan *historical cost model*
 - c. Penyusutan atas kenaikan nilai asset karena penilaian kembali saat penyisihan asset nonkas untuk usaha musyarakah.
8. Perlakuan akuntansi pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut, kecuali?
- a. Pada saat akad berakhir, keuntungan yang belum diterima bank dari mitra musyarakah diakui sebagai hutang musyarakah.
 - b. Pembiayaan musyarakah dalam bentuk kas dimulai sebesar jumlah yang dibayarkan
 - c. Biaya-biaya yang timbul akibat akad musyarakah tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah.
9. Bagian entitas atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra diakhir akad dinilai sebesar?
- a. Jumlah kas yang disisihkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian
 - b. Nilai tercatat asset musyarakah non kas pada saat penyisihan untuk usaha musyarakah setelah ditambah biaya-biaya
 - c. Jumlah kas yang disisihkan dan dikurangi biaya-biaya.
10. Mitra aktif menyajikan hal-hal apa yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan?
- a. Jawaban a dan b benar
 - b. Kas atau asset non kas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi musyarakah
 - c. Asset musyarakah yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsure dana syirkah temporer

11. Mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan, kecuali?

- Selisih penilaian asset musyarakah, bila ada, disajikan sebagai unsure ekuitas.
- Kas atau asset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah
- Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian asset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan dari investasi musyarakah.

12. Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas pada,kecuali?

- pengelola usaha jika ada mitra aktif
- isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi penyertaan, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah,dan lain-lain.
- Pengungkapan yang diperlukan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 101 Tentang penyajian laporan keuangan.

13. Pencatatan pada saat mitra aktif menerima uang tunai dari transaksi akad musyarakah adalah?

- | | | |
|---------------------------|----|----|
| (Dr) Kas | Xx | |
| (Cr) Investasi Musyarakah | | Xx |
- | | | |
|---------------------------|----|----|
| (Dr) investasi musyarakah | Xx | |
| (Cr) kas | | Xx |
- | | | |
|------------------------------|----|----|
| (Dr) investasi musyarakah | Xx | |
| (Cr) hutang pada mitra pasif | | Xx |

14. Pada saat biaya dikeluarkan, maka pencatatannya adalah sebagai berikut?

- | | | |
|----------------------------|----|----|
| (Dr) beban akad musyarakah | Xx | |
| (Cr) kas | | Xx |
- | | | |
|----------------------------|----|----|
| (Dr) beban akad musyarakah | Xx | |
| (Cr) Investasi Musyarakah | | Xx |
- | | | |
|----------------------------|----|----|
| (Dr) biaya akad musyarakah | Xx | |
| (Cr) kas | | Xx |

15. Pada saat pembayaran keuntungan musyarakah, akuntansi mitra pasif adalah sebagai berikut?

- | | | |
|---------------------------------------|----|----|
| (Dr) keuntungan bagi hasil musyarakah | Xx | |
| (Cr) kas | | Xx |

b.

(Dr) kas	Xx	
(Cr) keuntungan bagi hasil musyarakah		Xx

c.

(Dr) Kas	Xx	
(Cr) investasi musyarakah		Xx

16. Akuntansi pada saat pengakuan kerugian yang di sebabkan oleh kelalaian manajemen pada mitra aktif adalah?

a.

(Dr) investasi musyarakah	Xx	
(Cr) hutang kepada mitra pasif		Xx

b.

(Dr) investasi musyarakah	Xx	
(Cr) kerugian bagi hasil musyarakah		Xx

c.

(Dr) kerugian bagi hasil musyarakah	Xx	
(Cr) pembiayaan musyarakah		Xx



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAGIAN III
PERTANYAAN PENDUKUNG

Bapak /ibu yang kami hormati, mohon pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dijawab dengan singkat dan jelas.

1. Menurut pendapat anda apakah BMT memerlukan suatu standar akuntansi?
Jelaskan pendapat anda.

Jawab:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. a. Darimana anda tahu tentang PSAK No.106?
b. Bagaimana pendapat anda setelah tahu tentang PSAK No.106?

Jawab:

a.

.....

.....

.....

b.

.....

.....

.....

.....

.....

3. a. Apakah BMT anda sudah mempraktekan PSAK No. 106 dengan baik?
b. Jika sudah mempraktekannya, apakah anda merasa kesulitan? Jelaskan kesulitan anda tersebut.
c. Jika belum, hal-hal apa saja yang membuat BMT anda belum menerapkan PSAK 106?

Jawab:

a.

.....

.....

.....

b.

.....

.....

.....

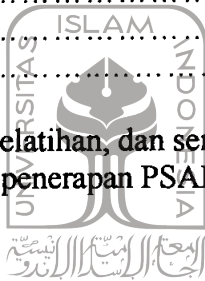
.....
.....
C.
.....
.....

4. Jika BMT anda belum mempraktekkan PSAK No.106, apakah anda merasa perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi yang terjadi pada BMT anda selama ini sudah sesuai dengan Syari'ah Islam? Jelaskan alasan anda.

Jawab:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

5. Menurut anda, apakah seminar, pelatihan, dan semacamnya memberi pengaruh terhadap kemungkinan penerapan PSAK No. 106 pada BMT? Jelaskan.

Jawab:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DATA SAMPLE BMT DI LAMPUNG

No.	Nama BMT	Alamat
1.	Bmt Sidoluhur	Psr. Unit 6, Kec. Lambu Kibang, Kab. Tulang Bawang Barat
2.	Bmt Assyafi'iyah	Psr. Sidoharjo, Kec. Penawar Tama, Kab. Tulang Bawang
3.	Bmt Assyafi'iyah	Jl. Vespa, Psr. Unit 2, Kab. Tulang Bawang
4.	Bmt Wahana Abadi	Jl. Lintas Timur, Psr. Unit 2, Kab. Tulang Bawang
5.	Bmt Al Hikmah	Psr. Unit 6, Kab. Tulang Bawang Barat
6.	Bmt Sejahtera	Jl. Jendral Sudirman, Kec. Daya Murni, Kab. Tulang Bawang Barat
7.	Bmt Baskara	Psr. Lama, Kec. Candi Rejo, Kotabumi, Kab. Lampung Utara
8.	Bmt Aswaja	Jl. Sultan Hasanudin, No. 5 Braja Sakti, Kec. Way Jepara, Kab. Lampung Timur
9.	Bmt Assyafi'iyah	Jl. Binter Raya, Labuhan Ratu Dua, Kec. Way Jepara, Kab. Lampung Timur
10.	Bmt Adi Sarana	Jl. Pramuka, No. 85 Kec. Way Jepara, Kab. Lampung Timur
11.	Bmt El Ikhlas	Jl. Muh. Hatta No. 49b, Labuhan Ratu Satu, Kec. Way Jepara, Kab. Lampung Timur
12.	Bmt Baskara	Jl. Raya Way Jepara No. 181, Kec. Way Jepara, Kab. Lampung Timur
13.	Bmt Duta Jaya	Ds. Adi Rejo, Kec. Jabung, Kab. Lampung Timur
14.	Bmt Duta Jaya	Karya Tani, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur
15.	Bmt Mitra Dana Sakti	Purworejo, Kec. Pasir Sakti, Kab. Lampung Timur
16.	Bmt Assyafiiyah	Psr. Sekampung, Kec. Sekampung, Kab. Lampung Timur
17.	Bmt Al Hasanah	Psr. Sekampung, Kec. Sekampung, Kab. Lampung Timur
18.	Bmt Mulia	Psr. Sritejo Kencono, Kec. Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur
19.	Bmt El Hidayah	Jl. Raya Sukadana, Kec. Sukadana, Kab. Lampung Timur
20.	Bmt Al Fath	Psr. Pekalongan, Kec. Pekalongan, Kab. Lampung Timur
21.	Bmt Sukses	Psr. Kali Rejo, Kec. Kali Rejo, Kab. Lampung Tengah
22.	Bmt Assyafi'iyah	Ds. 1 GB 1, Kec. Seputih Surabaya, Kab. Lampung Tengah
23.	Bmt Al Ihsan	Jl. Mataram Baru, Kab. Lampung Tengah
24.	Bmt Mitra Umat	Psr. Rumbia, Kec. Seputih Surabaya, Kab. Lampung Tengah
25.	Bmt Mentari	Komplek Psr. Punggur, Kec. Punggur, Kab.

26.	Bmt Assyafi'iyah	Lampung Tengah Psr. Kotagajah, Kec. Kotagajah, Kab. Lampung Tengah
27.	Bmt Mawaddah	Ds. Totokaton, Kec. Punggur. Kab. Lampung Tengah
28.	Bmt Mentari	Psr. Kotagajah, Kec. Kotagajah, Kab. Lampung Tengah
29.	Bmt Pringsewu	Jl.KH. Ahmad Dahlan, Psr. Pringsewu, Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu
30.	Bmt Sabilil Mutaqien	Jl. Raya Gisting, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus
31.	Bmt El Darussalam	Psr. Raja Basa, Kec. Gedong Meneng, Kota Bandar Lampung
32.	Bmt Syar'i	Jl. Panjang-Sribawono, Kec. Panjang, Kab. Lampung Selatan
33.	Bmt Baskara	Psr. Sidorejo, Simpang Sribawono, Kab. Lampung Selatan
34.	Bmt Duta Jaya	Jl. Raya Simpang Sribawono, Kab. Lampung Selatan
35.	Bmt Al Ihsan	Jl. Cut Nyak Dien, 15B Metro Barat, Kota Madya Metro
36.	Bmt Al Muhsin	Jl. Dr. Sutomo 28, Metro Timur, Kota Madya Metro
37.	Bmt Al Mutaqien	Jl. S. Parman, no. 88, Metro Pusat, Kota Madya Metro
38.	Bmt Fajar	Metro Pusat, Kota Madya Metro
39.	Bmt Al Furqon	Hadi Mulyo Barat, Metro Barat, Kota Madya Metro.
40.	Bmt Amanah Surya Prakarsa	Jl. Pramuka, pasar Way jepara. Kabupaten Lampung Timur
41.	Bmt Nahdlatul Ulama	Raja Basa, Kec. Labuhan Ratu, Kab. Lampung Timur
42.	Bmt Ponpes Roudlotul Qur'an	Jl. Ponpes Roudlotul Qur'an, 16c Ganjar Agung, Metro. Kodya Metro

Data Pemahaman Praktisi BMT

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Total
1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	10
2	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	13
3	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	10
4	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	14
6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	12
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
8	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	11
9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	12
10	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	10
11	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	12
12	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	8
13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	13
14	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	9
15	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	12
16	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	10
17	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	10
18	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	12
19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	15
20	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	10
21	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
22	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	12
23	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	12
24	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	13
25	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	14
26	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
27	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	13
28	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	13
29	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	12
30	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	14
31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	15
32	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
33	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	11
34	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	14
35	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	12
36	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
37	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	14
38	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	14

40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	15
41	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	8
42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	15
43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	15
44	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	10
45	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	14
46	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	13
47	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	10
48	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	12
49	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	13
50	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	10
51	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	11
52	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	10
53	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	13
54	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	10
55	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	13
56	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	12
57	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	12
58	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	10
59	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	14
60	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	13
61	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	10
62	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	14
63	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	14
64	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	11
65	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	11
66	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	9
67	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	12
68	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	13
69	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	13
70	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	9
71	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	13
72	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	13
73	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	12
74	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	9

DAFTAR PEMBIAYAAN BMT EL-BUMMI UNIT 375

	Bulan	Tanggal	Jenis PBY	Nama Nasabah	Besar Pembiayaan
1	Feb-09	04/02/2009	MDA	Gusman B	600.000
2			MDA	Kartinah	500.000
3			MDA	Sri Parjinah	500.000
4			MDA	Nuryatik	500.000
5			MDA	Muji Rahayu	500.000
6			MDA	Mardillah S	500.000
7			MDA	Suparti	500.000
8			MDA	EP. Tri Murtiningsih	1.000.000
9			MDA	Tipuk Widayati	1.000.000
0			MDA	Eri Tri Wulan P	1.000.000
1			MDA	Sri Wahyuni	1.000.000
2			MDA	Sumiyati	500.000
3		05/02/2009	MDA	Sugiyono	700.000
4			MDA	Isti Arbaekah	500.000
5			MDA	Sri Murniati	700.000
6			MDA	Eni Endarsih	500.000
7		06/02/2009	MDA	Anjas Sari Widodo	500.000
8		07/02/2009	MDA	Waginem	1.000.000
9			MDA	Isdiyono	2.000.000
0		09/02/2009	MDA	Jauhari Muhsin	1.500.000
1			MDA	Sumarjono	1.000.000
2			MDA	Sulistyawati	1.500.000
3			MDA	Kamilah	1.000.000
4			MDA	Eka Yulia S	1.000.000
5			MDA	Mulyaniningsih	1.000.000
6		11/02/2009	MDA	Eko Fitriyono	1.000.000
7			MDA	Suwarto	2.000.000
8			MDA	Wawan H	2.000.000
9			MDA	Widiatmoko	2.000.000
0			MDA	Waseni	2.000.000
1			MDA	Sigit prasetyo	1.000.000
2			MDA	Suparmi	500.000
3			MDA	Titik H	1.000.000
4			MDA	Suwarno	2.000.000
5			MDA	Subardiono	2.000.000
6			MDA	M. Syaiful B	1.000.000
7		12/02/2009	MDA	Iswartiningsih	500.000
8		14/02/2009	MDA	Supriyani	700.000
9		16/02/2009	MDA	Supriyati	500.000
0		18/02/2009	MDA	Tutik Wahyuningsih	3.000.000
1		19/02/2009	MDA	Sri Asminah	1.000.000
2			MDA	Hartuti	500.000
3			MDA	Slamet	1.000.000
4			MDA	Karmini	1.500.000
5			MDA	Mursinah	1.500.000
6			MDA	Fatimah	1.500.000
7			MDA	Iswandari	1.500.000

8			MDA	Heti Nurhayati	1.000.000
9			MDA	Darwati	1.500.000
0		20/02/2009	MDA	Yuni Lono C	750.000
1			MDA	M. Chairul U	2.000.000
2		21/02/2009	MDA	Supriyanto	1.000.000
3		24/02/2009	MDA	Sholekah Evie M	1.000.000
4			MDA	Sokijah	750.000
5			MDA	Rubini	750.000
6			MDA	Saenah	500.000
7			MDA	Juminten	750.000
8		25/02/2009	MDA	Dewi Fatmawati	1.000.000
9			MDA	Suprapti	500.000
0			MDA	Istinah	500.000
1			MDA	Sutiyem	500.000
2			MDA	Heni Istanti	500.000
3		27/02/2009	MDA	Eni Suwanti	2.500.000
4			MDA	Sri Purwanti	500.000
		TOTAL			66.700.000
5	Mar-09	12/03/2009	MDA	Etty S	750.000
6		16/03/2009	MDA	Wiwit S	1.000.000
7		17/03/2009	MDA	Suryanto	1.000.000
8			MDA	Siti Sumarni	2.000.000
9		24/03/2009	MBA	Sogiman	500.000
0			MBA	Sri Sarjiyati	500.000
1			MBA	Laswanti	500.000
2			MBA	Suharni	500.000
		TOTAL			6.750.000
3	Apr-09	02/04/2009	MBA	Triyono	500.000
4		04/04/2009	MDA	Sri Parjinah	500.000
5			MDA	Sumiyati	1.000.000
6			MSA	Cell Bummi	5.000.000
7		14/04/2009	MBA	Suryani	1.000.000
8			MBA	Talam	2.000.000
9		23/04/2009	MBA	Narjuno	2.000.000
0			MBA	M. Chairul U	4.000.000
1		29/04/2009	MBA	Hartini Rahayu	500.000
2			MBA	Sholekah Evie	785.000
		TOTAL			17.285.000
3	Mei-09	05/05/2009	MBA	Nuryatik	1.000.000
4		08/05/2009	MBA	Isdiyono	500.000
5			MBA	Sodikun	2.000.000
6		12/05/2009	MBA	Peter Slamet	2.000.000
7			MBA	Roy Riyanto	1.000.000
8			MBA	Hasti Imayanti	500.000
9		13/05/2009	MBA	Winarto	500.000
0		16/05/2009	MBA	Kusno Wijoyo	500.000
1		18/05/2009	MBA	Suprapti	500.000

2			MBA	Nuryana	1.000.000
3		26/05/2009	MBA	Taufik	1.000.000
4			MBA	Sigit Parjono	1.000.000
5			MBA	Nuri Marjuki	1.000.000
5			MBA	Wagiman	1.000.000
7			MBA	Tri Mardani Asih	1.000.000
		TOTAL			14.500.000
3	Jun-09	03/06/2009	MBA	Sri Asminah	1.000.000
9			MBA	Heti Nurhayati	1.000.000
0			MBA	Isdiyono	4.500.000
1		06/06/2009	MBA	Arie H	2.000.000
2			MBA	Subardiono	2.000.000
3			MBA	Sutarmi	2.500.000
4			MBA	Sunaryo	2.500.000
5		17/06/2009	MBA	Wagiyah M	750.000
5			MBA	Wasirah	1.000.000
7			MBA	Susetyaningsih	1.000.000
8		18/06/2009	MBA	Choirul Huda	2.000.000
9		23/06/2009	MBA	Yuni Lono C	725.000
0		24/06/2009	MBA	Suprapti	1.000.000
1		25/06/2009	MBA	Tri Harjo	800.000
2			MBA	Wasilah	800.000
3			MBA	Iskandar Walkinah	800.000
4			MBA	Subarmi	800.000
5			MBA	Misgiani	800.000
5			MBA	Tugiyono	800.000
7			MBA	Sri Mulyani	800.000
8			MBA	Marto Siswo	800.000
9		25/06/2009	MBA	Farida I	500.000
0			MBA	Fatimah	3.000.000
1			MBA	Lusi K	500.000
2				Sri Purwanti	500.000
		TOTAL			32.875.000
3	Jul-09	02/07/2009	MBA	Tri Andani AP	500.000
4			MBA	Wagiyanto	1.000.000
5			MBA	Dwi Yunianto	1.000.000
5			MBA	Wawan H	500.000
7			MBA	Elfi H	500.000
8			MBA	Tutik Wahyuningsih	4.000.000
9		14/07/2009	MBA	Surami	1.000.000
0			MBA	Tunem	1.000.000
1			MBA	Wakiyem	600.000
2			MBA	Tuyem	700.000
3			MBA	Yuliati	700.000
4			MBA	Muji Rahayu	1.000.000
5			MBA	Endang E	1.000.000
5			MBA	Anik W	1.000.000
7			MBA	Endang H	1.000.000

3		15/07/2009	MBA	Anjas Sari W	1.000.000
9			MBA	Winarto	800.000
0		16/07/2009	MBA	Dewi Fatmawati	1.500.000
L			MBA	Kasih Harini	4.000.000
2		27/07/2009	MBA	Istiqomah	1.000.000
3			MBA	Lusi I	800.000
4		29/07/2009	MBA	Andi Tri Gunanto	1.000.000
5			MBA	Sogiman	1.000.000
5			MBA	Sri Sarjayati	1.000.000
7			MBA	Suharni	1.000.000
8			MBA	Laswanti	1.000.000
		TOTAL			29.600.000
9	Agust-09	03/08/2009	MBA	Sigit Prasetyo	1.750.000
0			MBA	Darojah	1.000.000
L			MBA	Sri Murni	500.000
2		04/08/2009	MBA	Karmini	2.000.000
3		08/08/2009	MBA	Aria Ningsih	1.000.000
4			MBA	Wartini	4.000.000
5			MBA	Wasiyo	800.000
5		10/08/2009	MBA	Suparmi	1.000.000
7		14/08/2009	MBA	Etty S	1.000.000
8		28/08/2009	MBA	Badarudin	4.000.000
		TOTAL			17.050.000
9	Sep-09	17/09/2009	MBA	Wasilah	750.000
0	Okt-09	07/10/2009	MBA	M. Faried M	4.181.000
L		22/10/2009	IJRAH	M. Sabar	2.000.000
2		27/10/2009	MBA	Sodikun	4.000.000
3		23/10/2009	MBA	Farida	1.000.000
					11.931.000
4	Nov 09	10/11/2009	MBA	Waginem	1.000.000
5		12/11/2009	MBA	Eni Suwanti	3.000.000
5			IJRAH	Wiwit S	750.000
7		16/11/2009	MBA	Irwan NM	1.000.000
8		30/11/2009	MBA	Choirul Huda	1.500.000
					7.250.000
9	Des-09	10/12/2009	MBA	Mardilah	800.000
0		15/12/2009	MBA	Tri Jariyah	500.000
		21/12/2009	MBA	Yuyun Afnan	7.000.000
		28/12/2009	MBA	Kartinah	500.000
		TOTAL			8.800.000

TOTAL PEMBIAYAAN YANG DILEMPAR
213.491.000

Correlations

		P1	P2	P3	P4
P1	Pearson Correlation	1	.323	.318	.213
	Sig. (2-tailed)		.081	.087	.258
	N	30	30	30	30
P2	Pearson Correlation	.323	1	.010	.342
	Sig. (2-tailed)	.081		.956	.064
	N	30	30	30	30
P3	Pearson Correlation	.318	.010	1	.053
	Sig. (2-tailed)	.087	.956		.780
	N	30	30	30	30
P4	Pearson Correlation	.213	.342	.053	1
	Sig. (2-tailed)	.258	.064	.780	
	N	30	30	30	30
P5	Pearson Correlation	.202	.562**	.024	.111
	Sig. (2-tailed)	.284	.001	.901	.558
	N	30	30	30	30
P6	Pearson Correlation	.318	.010	.148	.213
	Sig. (2-tailed)	.087	.956	.436	.258
	N	30	30	30	30
P7	Pearson Correlation	.213	.489**	.053	.250
	Sig. (2-tailed)	.258	.006	.780	.183
	N	30	30	30	30
P8	Pearson Correlation	.489**	.010	.023	.373*
	Sig. (2-tailed)	.006	.956	.905	.042
	N	30	30	30	30
P9	Pearson Correlation	.123	.649**	-.031	.144
	Sig. (2-tailed)	.517	.000	.872	.447
	N	30	30	30	30
P10	Pearson Correlation	.318	.323	.148	.213
	Sig. (2-tailed)	.087	.081	.436	.258
	N	30	30	30	30
P11	Pearson Correlation	.318	.010	.148	.373*
	Sig. (2-tailed)	.087	.956	.436	.042
	N	30	30	30	30
P12	Pearson Correlation	.148	.010	.148	.213
	Sig. (2-tailed)	.436	.956	.436	.258

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		P5	P6	P7	P8
P1	Pearson Correlation	.202	.318	.213	.489**
	Sig. (2-tailed)	.284	.087	.258	.006
	N	30	30	30	30
P2	Pearson Correlation	.562**	.010	.489**	.010
	Sig. (2-tailed)	.001	.956	.006	.956
	N	30	30	30	30
P3	Pearson Correlation	.024	.148	.053	-.023
	Sig. (2-tailed)	.901	.436	.780	.905
	N	30	30	30	30
P4	Pearson Correlation	.111	.213	.250	.373*
	Sig. (2-tailed)	.558	.258	.183	.042
	N	30	30	30	30
P5	Pearson Correlation	1	.024	.446*	.024
	Sig. (2-tailed)		.901	.014	.901
	N	30	30	30	30
P6	Pearson Correlation	.024	1	.053	.148
	Sig. (2-tailed)	.901		.780	.436
	N	30	30	30	30
P7	Pearson Correlation	.446*	.053	1	.053
	Sig. (2-tailed)	.014	.780		.780
	N	30	30	30	30
P8	Pearson Correlation	.024	.148	.053	1
	Sig. (2-tailed)	.901	.436	.780	
	N	30	30	30	30
P9	Pearson Correlation	.354	.123	.144	-.185
	Sig. (2-tailed)	.055	.517	.447	.329
	N	30	30	30	30
P10	Pearson Correlation	.380*	-.023	.053	.318
	Sig. (2-tailed)	.038	.905	.780	.087
	N	30	30	30	30
P11	Pearson Correlation	.202	.318	-.107	.148
	Sig. (2-tailed)	.284	.087	.575	.436
	N	30	30	30	30
P12	Pearson Correlation	.024	-.193	.213	.318
	Sig. (2-tailed)	.901	.306	.258	.087

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		P9	P10	P11	P12
P1	Pearson Correlation	.123	.318	.318	.148
	Sig. (2-tailed)	.517	.087	.087	.436
	N	30	30	30	30
P2	Pearson Correlation	.649**	.323	.010	.010
	Sig. (2-tailed)	.000	.081	.956	.956
	N	30	30	30	30
P3	Pearson Correlation	-.031	.148	.148	.148
	Sig. (2-tailed)	.872	.436	.436	.436
	N	30	30	30	30
P4	Pearson Correlation	.144	.213	.373*	.213
	Sig. (2-tailed)	.447	.258	.042	.258
	N	30	30	30	30
P5	Pearson Correlation	.354	.380*	.202	.024
	Sig. (2-tailed)	.055	.038	.284	.901
	N	30	30	30	30
P6	Pearson Correlation	.123	-.023	.318	-.193
	Sig. (2-tailed)	.517	.905	.087	.306
	N	30	30	30	30
P7	Pearson Correlation	.144	.053	-.107	.213
	Sig. (2-tailed)	.447	.780	.575	.258
	N	30	30	30	30
P8	Pearson Correlation	-.185	.318	.148	.318
	Sig. (2-tailed)	.329	.087	.436	.087
	N	30	30	30	30
P9	Pearson Correlation	1	.123	-.185	-.031
	Sig. (2-tailed)		.517	.329	.872
	N	30	30	30	30
P10	Pearson Correlation	.123	1	.318	-.023
	Sig. (2-tailed)	.517		.087	.905
	N	30	30	30	30
P11	Pearson Correlation	-.185	.318	1	-.023
	Sig. (2-tailed)	.329	.087		.905
	N	30	30	30	30
P12	Pearson Correlation	-.031	-.023	-.023	1
	Sig. (2-tailed)	.872	.905	.905	

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		P13	P14	P15
P1	Pearson Correlation	.213	.277	.202
	Sig. (2-tailed)	.258	.138	.284
	N	30	30	30
P2	Pearson Correlation	.342	.226	.234
	Sig. (2-tailed)	.064	.230	.212
	N	30	30	30
P3	Pearson Correlation	.213	.431*	.202
	Sig. (2-tailed)	.258	.017	.284
	N	30	30	30
P4	Pearson Correlation	.250	.144	.613**
	Sig. (2-tailed)	.183	.447	.000
	N	30	30	30
P5	Pearson Correlation	.279	.193	.068
	Sig. (2-tailed)	.136	.307	.720
	N	30	30	30
P6	Pearson Correlation	.213	.123	.202
	Sig. (2-tailed)	.258	.517	.284
	N	30	30	30
P7	Pearson Correlation	-.050	.144	.279
	Sig. (2-tailed)	.793	.447	.136
	N	30	30	30
P8	Pearson Correlation	-.107	.123	.024
	Sig. (2-tailed)	.575	.517	.901
	N	30	30	30
P9	Pearson Correlation	.289	.028	.354
	Sig. (2-tailed)	.122	.884	.055
	N	30	30	30
P10	Pearson Correlation	.053	.431*	-.154
	Sig. (2-tailed)	.780	.017	.415
	N	30	30	30
P11	Pearson Correlation	.373*	.277	.202
	Sig. (2-tailed)	.042	.138	.284
	N	30	30	30
P12	Pearson Correlation	-.107	.277	.380*
	Sig. (2-tailed)	.575	.138	.038

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		P1	P2	P3	P4
P12	N	30	30	30	30
P13	Pearson Correlation	.213	.342	.213	.250
	Sig. (2-tailed)	.258	.064	.258	.183
	N	30	30	30	30
P14	Pearson Correlation	.277	.226	.431*	.144
	Sig. (2-tailed)	.138	.230	.017	.447
	N	30	30	30	30
P15	Pearson Correlation	.202	.234	.202	.613**
	Sig. (2-tailed)	.284	.212	.284	.000
	N	30	30	30	30
P16	Pearson Correlation	.263	.408*	.263	.000
	Sig. (2-tailed)	.160	.025	.160	1.000
	N	30	30	30	30
Pemahaman PSAK	Pearson Correlation	.640**	.659**	.402*	.588**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.028	.001
	N	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		P5	P6	P7	P8
P12	N	30	30	30	30
P13	Pearson Correlation	.279	.213	-.050	-.107
	Sig. (2-tailed)	.136	.258	.793	.575
	N	30	30	30	30
P14	Pearson Correlation	.193	.123	.144	.123
	Sig. (2-tailed)	.307	.517	.447	.517
	N	30	30	30	30
P15	Pearson Correlation	.068	.202	.279	.024
	Sig. (2-tailed)	.720	.284	.136	.901
	N	30	30	30	30
P16	Pearson Correlation	.327	.263	.463**	.099
	Sig. (2-tailed)	.078	.160	.010	.604
	N	30	30	30	30
Pemahaman PSAK	Pearson Correlation	.551**	.380*	.487**	.359
	Sig. (2-tailed)	.002	.038	.006	.052
	N	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		P9	P10	P11	P12
P12	N	30	30	30	30
P13	Pearson Correlation	.289	.053	.373*	-.107
	Sig. (2-tailed)	.122	.780	.042	.575
	N	30	30	30	30
P14	Pearson Correlation	.028	.431*	.277	.277
	Sig. (2-tailed)	.884	.017	.138	.138
	N	30	30	30	30
P15	Pearson Correlation	.354	-.154	.202	.380*
	Sig. (2-tailed)	.055	.415	.284	.038
	N	30	30	30	30
P16	Pearson Correlation	.059	.263	-.066	.099
	Sig. (2-tailed)	.755	.160	.730	.604
	N	30	30	30	30
Pemahaman PSAK	Pearson Correlation	.398*	.489**	.424*	.316
	Sig. (2-tailed)	.029	.006	.020	.089
	N	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		P13	P14	P15
P12	N	30	30	30
P13	Pearson Correlation	1	.000	.279
	Sig. (2-tailed)		1.000	.136
	N	30	30	30
P14	Pearson Correlation	.000	1	.193
	Sig. (2-tailed)	1.000		.307
	N	30	30	30
P15	Pearson Correlation	.279	.193	1
	Sig. (2-tailed)	.136	.307	
	N	30	30	30
P16	Pearson Correlation	-.154	.356	-.017
	Sig. (2-tailed)	.416	.053	.928
	N	30	30	30
Pemahaman PSAK	Pearson Correlation	.406*	.554**	.529**
	Sig. (2-tailed)	.026	.001	.003
	N	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		P16	Pemahaman PSAK
P12	N	30	30
P13	Pearson Correlation	-.154	.406*
	Sig. (2-tailed)	.416	.026
	N	30	30
P14	Pearson Correlation	.356	.554**
	Sig. (2-tailed)	.053	.001
	N	30	30
P15	Pearson Correlation	-.017	.529**
	Sig. (2-tailed)	.928	.003
	N	30	30
P16	Pearson Correlation	1	.476**
	Sig. (2-tailed)		.008
	N	30	30
Pemahaman PSAK	Pearson Correlation	ISL .476**	1
	Sig. (2-tailed)	.008	
	N	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

FREQUENCIES VARIABLES=X1 X2 X3 X4 Y Kategori
/ORDER=ANALYSIS.

Frequencies

[DataSet1] F:\IKa Data\Data.sav

Statistics

		X1 Usia	X2 Latar Belakang Pendidikan	X3 Lama Bekerja	X4 Frekuensi Training
N	Valid	74	74	74	74
	Missing	0	0	0	0

Statistics

		Pemahaman PSAK	Y Pemahaman PSAK
N	Valid	74	74
	Missing	0	0

Frequency Table

X1 Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20 s.d. 30 tahun	51	68.9	68.9	68.9
	31 s.d. 40 tahun	19	25.7	25.7	94.6
	41 s.d. 50 tahun	4	5.4	5.4	100.0
	Total	74	100.0	100.0	

X2 Latar Belakang Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMA sederajat	7	9.5	9.5	9.5
	D3	4	5.4	5.4	14.9
	S1	60	81.1	81.1	95.9
	S2	3	4.1	4.1	100.0
	Total	74	100.0	100.0	

X3 Lama Bekerja

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang dari 3 tahun	44	59.5	59.5	59.5
	antara 3 - 5 tahun	23	31.1	31.1	90.5
	antara 5 - 7 tahun	7	9.5	9.5	100.0
	Total	74	100.0	100.0	

X4 Frekuensi Training

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 - 3 kali	53	71.6	71.6	71.6
	4 - 6 kali	18	24.3	24.3	95.9
	7 - 9 kali	3	4.1	4.1	100.0
	Total	74	100.0	100.0	

Pemahaman PSAK

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	8	2	2.7	2.7	2.7
	9	4	5.4	5.4	8.1
	10	13	17.6	17.6	25.7
	11	5	6.8	6.8	32.4
	12	14	18.9	18.9	51.4
	13	14	18.9	18.9	70.3
	14	14	18.9	18.9	89.2
	15	7	9.5	9.5	98.6
	16	1	1.4	1.4	100.0
	Total	74	100.0	100.0	

Y Pemahaman PSAK

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rendah	19	25.7	25.7	25.7
	Sedang	47	63.5	63.5	89.2
	Tinggi	8	10.8	10.8	100.0
	Total	74	100.0	100.0	

Crosstabs

[DataSet1] F:\IKa Data\Data.sav

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
X1 Usia * Pemahaman PSAK	74	100.0%	0	.0%	74	100.0%
X1 Usia * Y Pemahaman PSAK	74	100.0%	0	.0%	74	100.0%
X2 Latar Belakang Pendidikan * Pemahaman PSAK	74	100.0%	0	.0%	74	100.0%
X2 Latar Belakang Pendidikan * Y Pemahaman PSAK	74	100.0%	0	.0%	74	100.0%
X3 Lama Bekerja * Pemahaman PSAK	74	100.0%	0	.0%	74	100.0%
X3 Lama Bekerja * Y Pemahaman PSAK	74	100.0%	0	.0%	74	100.0%

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
X4 Frekuensi Training * Pemahaman PSAK	74	100.0%	0	.0%	74	100.0%
X4 Frekuensi Training * Y Pemahaman PSAK	74	100.0%	0	.0%	74	100.0%

X1 Usia * Pemahaman PSAK

Crosstab

Count		Pemahaman PSAK					
		8	9	10	11	12	13
X1 Usia	20 s.d. 30 tahun	2	4	7	5	6	13
	31 s.d. 40 tahun	0	0	6	0	8	1
	41 s.d. 50 tahun	0	0	0	0	0	0
	Total	2	4	13	5	14	14

Crosstab

Count		Pemahaman PSAK			
		14	15	16	Total
X1 Usia	20 s.d. 30 tahun	12	2	0	51
	31 s.d. 40 tahun	2	2	0	19
	41 s.d. 50 tahun	0	3	1	4
	Total	14	7	1	74

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	58.922 ^a	16	.000
Likelihood Ratio	42.116	16	.000
Linear-by-Linear Association	3.940	1	.047
N of Valid Cases	74		

a. 23 cells (85,2%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,05.

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Phi	.892	.000
	Cramer's V	.631	.000
	Contingency Coefficient	.666	.000

Symmetric Measures

		Value	Asymp. Std. Error ^a
Interval by Interval	Pearson's R	.232	.120
Ordinal by Ordinal	Spearman Correlation	.130	.129
	N of Valid Cases	74	

a. Not assuming the null hypothesis.

Symmetric Measures

		Approx. T ^b	Approx. Sig.
Interval by Interval	Pearson's R	2.027	.046 ^c
Ordinal by Ordinal	Spearman Correlation	1.111	.270 ^c

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

c. Based on normal approximation.

X1 Usia * Y Pemahaman PSAK

Crosstab

Count		Y Pemahaman PSAK			
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total
X1 Usia	20 s.d. 30 tahun	13	36	2	51
	31 s.d. 40 tahun	6	11	2	19
	41 s.d. 50 tahun	0	0	4	4
	Total	19	47	8	74

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	35.995 ^a	4	.000
Likelihood Ratio	21.495	4	.000
Linear-by-Linear Association	7.349	1	.007
N of Valid Cases	74		

a. 5 cells (55,6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,43.

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Phi	.697	.000
	Cramer's V	.493	.000

Symmetric Measures

		Value	Asymp. Std. Error ^a
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	.572	
Interval by Interval	Pearson's R	.317	.132
Ordinal by Ordinal	Spearman Correlation	.206	.137
N of Valid Cases		74	

a. Not assuming the null hypothesis.

Symmetric Measures

		Approx. T ^b	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient		.000
Interval by Interval	Pearson's R	2.839	.006 ^c
Ordinal by Ordinal	Spearman Correlation	1.783	.079 ^c

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

c. Based on normal approximation.

X2 Latar Belakang Pendidikan * Pemahaman PSAK

Crosstab

Count

		Pemahaman PSAK				
		8	9	10	11	12
X2 Latar Belakang Pendidikan	SMA sederajat	2	3	0	0	2
	D3	0	1	3	0	0
	S1	0	0	10	4	12
	S2	0	0	0	1	0
	Total	2	4	13	5	14

Crosstab

Count

		Pemahaman PSAK				
		13	14	15	16	Total
X2 Latar Belakang Pendidikan	SMA sederajat	0	0	0	0	7
	D3	0	0	0	0	4
	S1	13	13	7	1	60
	S2	1	1	0	0	3
	Total	14	14	7	1	74

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	65.601 ^a	24	.000
Likelihood Ratio	51.314	24	.001
Linear-by-Linear Association	19.650	1	.000
N of Valid Cases	74		

a. 31 cells (86,1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,04.

Symmetric Measures

		Value	Asymp. Std. Error ^a
Nominal by Nominal	Phi	.942	
	Cramer's V	.544	
	Contingency Coefficient	.686	
Interval by Interval	Pearson's R	.519	.091
Ordinal by Ordinal	Spearman Correlation	.472	.094
	N of Valid Cases	74	

a. Not assuming the null hypothesis.

Symmetric Measures

		Approx. T ^b	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Phi		.000
	Cramer's V		.000
	Contingency Coefficient		.000
Interval by Interval	Pearson's R	5.150	.000 ^c
Ordinal by Ordinal	Spearman Correlation	4.541	.000 ^c

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

c. Based on normal approximation.

X2 Latar Belakang Pendidikan * Y Pemahaman PSAK

Crosstab

Count

		X2 Latar Belakang Pendidikan				
		SMA sederajat	D3	S1	S2	Total
Y Pemahaman PSAK	Rendah	5	4	10	0	19
	Sedang	2	0	42	3	47
	Tinggi	0	0	8	0	8
	Total	7	4	60	3	74

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	23.759 ^a	6	.001
Likelihood Ratio	23.518	6	.001
Linear-by-Linear Association	12.476	1	.000
N of Valid Cases	74		

a. 9 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,32.

Symmetric Measures

		Value	Asymp. Std. Error ^a
Nominal by Nominal	Phi	.567	
	Cramer's V	.401	
	Contingency Coefficient	.493	
Interval by Interval	Pearson's R	.413	.089
Ordinal by Ordinal	Spearman Correlation	.447	.092
	N of Valid Cases	74	

a. Not assuming the null hypothesis.

Symmetric Measures

		Approx. T ^b	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Phi		.001
	Cramer's V		.001
	Contingency Coefficient		.001
Interval by Interval	Pearson's R	3.852	.000 ^c
Ordinal by Ordinal	Spearman Correlation	4.244	.000 ^c

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

c. Based on normal approximation.

X3 Lama Bekerja * Pemahaman PSAK

Crosstab

Count		Pemahaman PSAK				
		8	9	10	11	12
X3 Lama Bekerja	Kurang dari 3 tahun	2	4	12	4	9
	antara 3 - 5 tahun	0	0	1	1	5
	antara 5 - 7 tahun	0	0	0	0	0
	Total	2	4	13	5	14

Crosstab

Count

		Pemahaman PSAK				Total
		13	14	15	16	
X3 Lama Bekerja	Kurang dari 3 tahun	10	3	0	0	44
	antara 3 - 5 tahun	4	7	5	0	23
	antara 5 - 7 tahun	0	4	2	1	7
	Total	14	14	7	1	74

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	44.686 ^a	16	.000
Likelihood Ratio	48.117	16	.000
Linear-by-Linear Association	27.929	1	.000
N of Valid Cases	74		

a. 23 cells (85,2%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,09.

Symmetric Measures

		Value	Asymp. Std. Error ^a
Nominal by Nominal	Phi	.777	
	Cramer's V	.549	
	Contingency Coefficient	.614	
Interval by Interval	Pearson's R	.619	.057
Ordinal by Ordinal	Spearman Correlation	.638	.069
	N of Valid Cases	74	

a. Not assuming the null hypothesis.

Symmetric Measures

		Approx. T ^b	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Phi		.000
	Cramer's V		.000
	Contingency Coefficient		.000
Interval by Interval	Pearson's R	6.680	.000 ^c
Ordinal by Ordinal	Spearman Correlation	7.035	.000 ^c

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

c. Based on normal approximation.

X3 Lama Bekerja * Y Pemahaman PSAK

Crosstab

Count

		Y Pemahaman PSAK			Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	
X3 Lama Bekerja	Kurang dari 3 tahun	18	26	0	44
	antara 3 - 5 tahun	1	17	5	23
	antara 5 - 7 tahun	0	4	3	7
	Total	19	47	8	74

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	24.368 ^a	4	.000
Likelihood Ratio	29.024	4	.000
Linear-by-Linear Association	21.275	1	.000
N of Valid Cases	74		

a. 5 cells (55,6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,76.

Symmetric Measures

		Value	Asymp. Std. Error ^a
Nominal by Nominal	Phi	.574	
	Cramer's V	.406	
	Contingency Coefficient	.498	
Interval by Interval	Pearson's R	.540	.067
Ordinal by Ordinal	Spearman Correlation	.543	.066
	N of Valid Cases	74	

a. Not assuming the null hypothesis.

Symmetric Measures

		Approx. T ^b	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Phi		.000
	Cramer's V		.000
	Contingency Coefficient		.000
Interval by Interval	Pearson's R	5.442	.000 ^c
Ordinal by Ordinal	Spearman Correlation	5.487	.000 ^c

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

c. Based on normal approximation.

X4 Frekuensi Training * Pemahaman PSAK

Crosstab

Count

		Pemahaman PSAK				
		8	9	10	11	12
X4 Frekuensi Training	1 - 3 kali	2	4	11	4	11
	4 - 6 kali	0	0	2	1	3
	7 - 9 kali	0	0	0	0	0
	Total	2	4	13	5	14

Crosstab

Count

		Pemahaman PSAK				Total
		13	14	15	16	
X4 Frekuensi Training	1 - 3 kali	11	9	1	0	53
	4 - 6 kali	3	4	5	0	18
	7 - 9 kali	0	1	1	1	3
	Total	14	14	7	1	74

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	40.960 ^a	16	.001
Likelihood Ratio	25.841	16	.056
Linear-by-Linear Association	13.885	1	.000
N of Valid Cases	74		

a. 22 cells (81,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,04.

Symmetric Measures

		Value	Asymp. Std. Error ^a
Nominal by Nominal	Phi	.744	
	Cramer's V	.526	
	Contingency Coefficient	.597	
Interval by Interval	Pearson's R	.436	.088
Ordinal by Ordinal	Spearman Correlation	.420	.102
N of Valid Cases		74	

a. Not assuming the null hypothesis.

Symmetric Measures

		Approx. Tb	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Phi		.001
	Cramer's V		.001
	Contingency Coefficient		.001
Interval by Interval	Pearson's R	4.112	.000 ^c
Ordinal by Ordinal	Spearman Correlation	3.928	.000 ^c

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

c. Based on normal approximation.

X4 Frekuensi Training * Y Pemahaman PSAK

Crosstab

Count		Y Pemahaman PSAK			Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	
X4 Frekuensi Training	1 - 3 kali	17	35	1	53
	4 - 6 kali	2	11	5	18
	7 - 9 kali	0	1	2	3
	Total	19	47	8	74

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	20.958 ^a	4	.000
Likelihood Ratio	18.029	4	.001
Linear-by-Linear Association	14.467	1	.000
N of Valid Cases	74		

a. 5 cells (55,6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,32.

Symmetric Measures

		Value	Asymp. Std. Error ^a
Nominal by Nominal	Phi	.532	
	Cramer's V	.376	
	Contingency Coefficient	.470	
Interval by Interval	Pearson's R	.445	.095
Ordinal by Ordinal	Spearman Correlation	.413	.100
N of Valid Cases		74	

a. Not assuming the null hypothesis.

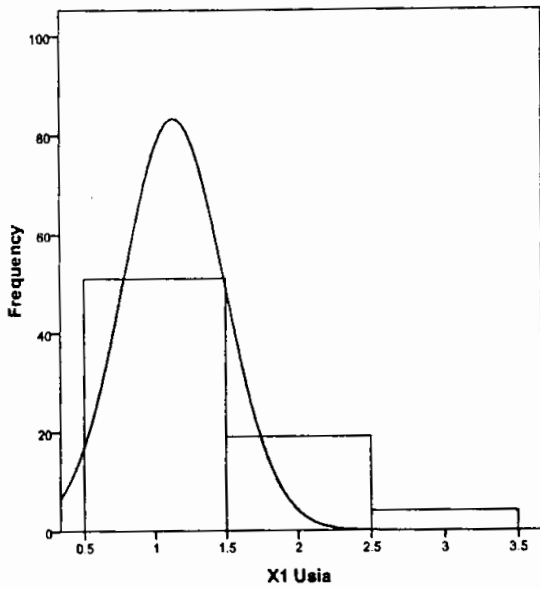
Symmetric Measures

		Approx. T ^b	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Phi		.000
	Cramer's V		.000
	Contingency Coefficient		.000
Interval by Interval	Pearson's R	4.218	.000 ^c
Ordinal by Ordinal	Spearman Correlation	3.849	.000 ^c

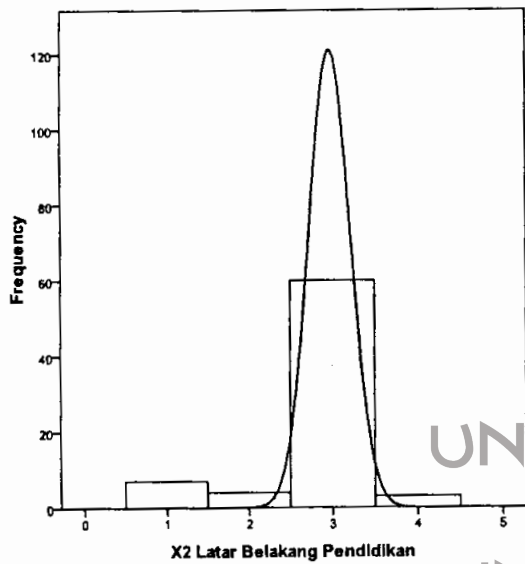
- b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
- c. Based on normal approximation.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA



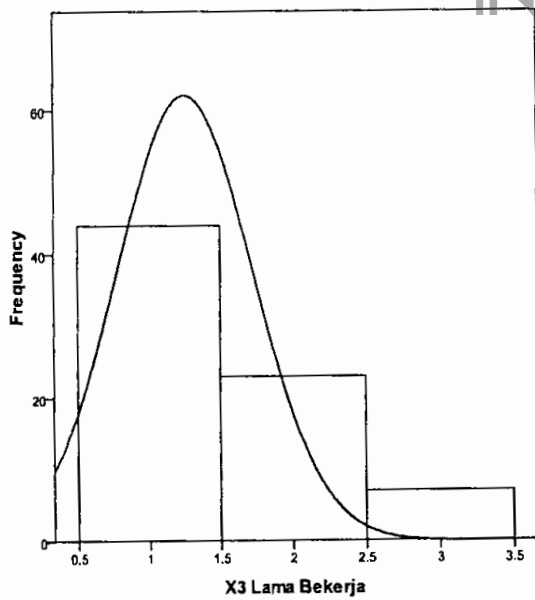
Mean =1.36
Std. Dev. =0.587
N =74



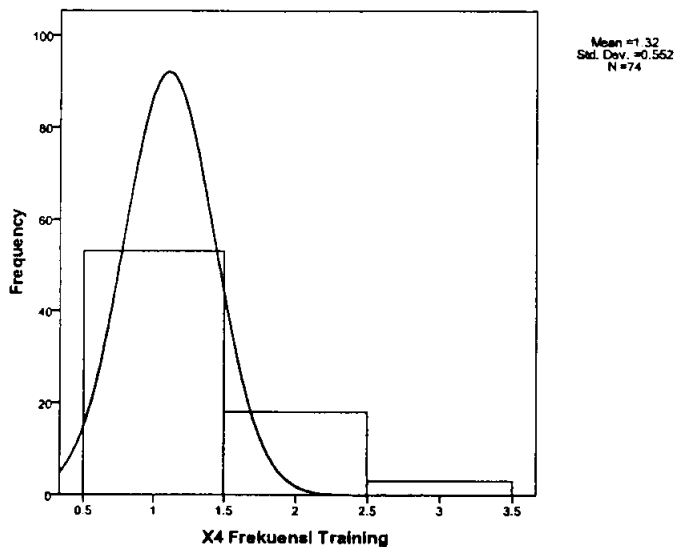
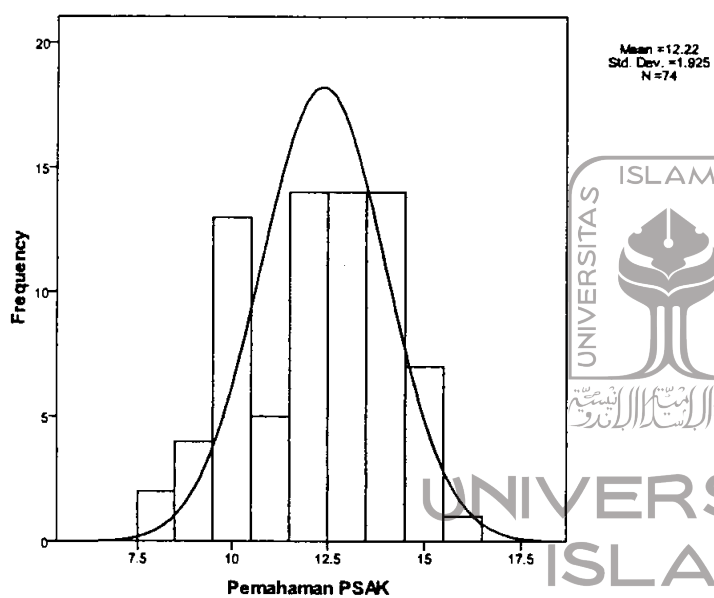
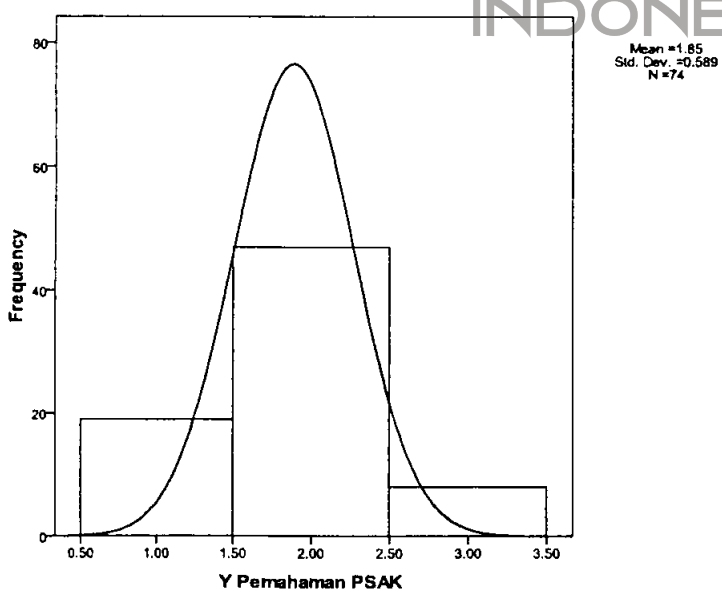
Mean =2.8
Std. Dev. =0.662
N =74



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA



Mean =1.5
Std. Dev. =0.667
N =74



piran 2

TABEL NILAI-NILAI r PRODUCT MOMENT

Taraf Signif		N	Taraf Signif		N	Taraf Signif	
5 %	1 %		5 %	1 %		5 %	1 %
0.997	0.999	26	0.388	0.496	55	0.266	0.345
0.850	0.990	27	0.381	0.487	60	0.254	0.330
0.878	0.959	28	0.374	0.478	65	0.244	0.317
		29	0.367	0.470	70	0.235	0.306
0.811	0.917	30	0.361	0.463	75	0.227	0.296
0.754	0.874						
0.707	0.834	31	0.355	0.456	80	0.220	0.286
0.666	0.798	32	0.349	0.449	85	0.213	0.278
0.632	0.765	33	0.344	0.442	90	0.207	0.270
		34	0.339	0.436	95	0.202	0.263
0.602	0.735	35	0.334	0.430	100	0.195	0.256
0.576	0.708						
0.553	0.684	36	0.329	0.424	125	0.176	0.230
0.532	0.661	37	0.325	0.418	150	0.159	0.210
0.514	0.641	38	0.320	0.413	175	0.148	0.194
		39	0.316	0.408	200	0.138	0.181
0.497	0.623	40	0.312	0.403	300	0.113	0.148
0.482	0.606						
0.468	0.590	41	0.308	0.398	400	0.098	0.128
0.456	0.575	42	0.304	0.393	500	0.088	0.115
0.444	0.561	43	0.301	0.389			
		44	0.297	0.384	600	0.080	0.105
0.433	0.549	45	0.294	0.380	700	0.074	0.097
0.423	0.537						
0.413	0.526	46	0.291	0.376	800	0.070	0.091
0.404	0.515	47	0.288	0.372	900	0.065	0.086
0.396	0.505	48	0.284	0.368			
		49	0.281	0.364	1000	0.062	0.081
		50	0.279	0.361			

Lampiran 5

TABEL NILAI-NILAI CHI-SQUARE

d.b.	Interval Kepercayaan								
	99 %	95 %	90 %	75 %	50 %	25 %	10 %	5 %	1 %
1	6.63	3.84	2.71	1.32	0.455	0.102	0.0158	0.0039	0.0002
2	9.21	5.99	4.61	2.77	1.39	0.575	0.211	0.103	0.0201
3	11.3	7.81	6.25	4.11	2.37	1.21	0.584	0.352	0.115
4	13.3	9.49	7.78	5.39	3.36	1.92	1.06	0.711	0.297
5	15.1	11.1	9.24	6.63	4.35	2.67	1.61	1.15	0.554
6	16.8	12.6	10.6	7.84	5.35	3.45	2.20	1.64	0.872
7	18.5	14.1	12.0	9.04	6.35	4.25	2.83	2.17	1.24
8	20.1	15.5	13.4	10.2	7.34	5.07	3.49	2.73	1.65
9	21.7	16.9	14.7	11.4	8.34	5.90	4.17	3.33	2.09
10	23.2	18.3	16.0	12.5	9.34	6.74	4.87	3.94	2.56
11	24.7	19.7	17.3	13.7	10.3	7.58	5.58	4.57	3.05
12	26.2	21.0	18.5	14.8	11.3	8.44	6.30	5.23	3.57
13	27.7	22.4	19.8	16.0	12.3	9.30	7.04	5.89	4.11
14	29.1	23.7	21.1	17.1	13.3	10.2	7.79	6.57	4.66
15	30.6	25.0	22.3	18.2	14.3	11.0	8.55	7.26	5.23
16	32.0	26.3	23.5	19.4	15.3	11.9	9.31	7.98	5.81
17	33.4	27.6	24.8	20.5	16.3	12.8	10.1	8.67	6.41
18	34.8	28.9	26.0	21.7	17.3	13.7	10.9	9.36	7.01
19	36.2	30.1	27.2	22.7	18.3	14.6	11.7	10.1	7.63
20	37.6	31.4	28.4	23.8	19.3	15.5	12.4	10.9	8.26
21	38.9	32.7	29.6	24.9	20.3	16.3	13.2	11.6	8.90
22	40.3	33.9	30.8	26.0	21.3	17.2	14.0	12.3	9.54
23	41.6	35.2	32.0	27.1	22.3	18.1	14.8	13.1	10.2
24	43.0	35.4	33.2	28.2	23.3	19.0	15.7	13.8	10.9
25	44.3	37.7	34.4	29.3	24.3	19.9	16.5	14.6	11.5
26	45.6	38.9	35.6	30.4	25.3	20.8	17.3	15.4	12.2
27	47.0	40.1	36.7	31.5	26.3	21.7	18.1	16.2	12.9
28	48.3	41.3	37.9	32.6	27.3	22.7	18.9	16.9	13.6
29	49.6	42.6	39.1	33.7	28.3	23.6	19.8	17.7	14.3
30	50.9	43.8	40.3	34.8	29.3	24.5	20.6	18.5	15.0
40	53.7	55.8	51.8	45.6	39.9	33.7	29.1	26.5	22.2
50	88.4	67.5	63.2	56.3	49.3	42.9	37.7	34.2	29.7
60	88.4	79.1	74.4	67.0	59.3	52.3	46.5	43.2	37.5
70	100.4	90.5	85.5	77.6	69.3	61.7	55.3	51.7	45.4
80	112.3	101.9	96.6	88.1	79.3	71.1	64.3	60.4	53.5
90	124.1	113.1	107.6	98.6	89.3	10.6	73.3	69.1	61.8
100	135.8	124.3	118.5	109.4	99.3	90.1	82.4	77.9	70.1
d.b.	1 %	5 %	10 %	25 %	50 %	75 %	90 %	95 %	100 %
	Tarf Signifikasi								

PUSAT KOPERASI SYARIAH (PUSKOPSYAH) BMT SEJAHTERA

Jl. Cut Nyak Dien No. 23 Imopuro Metro-Lampung 34111 Telp/fax. 072544324

Nomor : 01/Puskopsyah/BS/X/09
Lampiran : -
Perihal : Pengantar Penelitian

Kepada Yth,
Manager BMT Anggota Puskopsyah
di-
Lampung

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah diberikan Allah SWT kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Sehubungan dengan rencana penelitian dalam rangka penyusunan karya ilmiah berupa tesis, yang dilakukan oleh:

Nama : Ika Trisnawati Alawiyah, S.EI
NIM : 07913149
Program Studi : MAGISTER STUDI ISLAM
Universitas Islam Indonesia
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Alamat : Jln. Demangan Baru No.24 Lt.2 Yogyakarta 55281
Judul Tesis **Pemahaman Praktisi BMT di Lampung terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.106 Akuntansi Musyarakah**

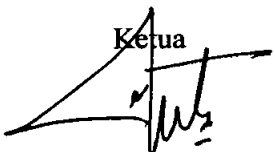
Dengan ini dimohon dari BMT anggota Puskopsyah BMT Sejahtera untuk berkenan memberi data/keterangan yang diperlukan oleh yang bersangkutan.

Demikian surat pengantar ini kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Lampung, 12 Oktober 2009

PUSKOPSYAH BMT SEJAHTERA

Ketua

Ir. Kusnoto, M.TA



Sekretaris

Sunaryo, A.md

PUSAT KOPERASI SYARIAH (PUSKOPSYAH) BMT SEJAHTERA

Jl. Cut Nyak Dien No. 23 Imopuro Metro-Lampung 34111 Telp/fax. 072544324

SURAT KETERANGAN

No: 02/Puskopsyah/BS/X/09

Bismillahirrrahmanirrahiim

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Ika Trisnawati Alawiyah, S.EI

NIM : 07913149

Program Studi : MAGISTER STUDI ISLAM

Universitas Islam Indonesia

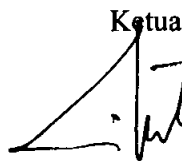
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Adalah mahasiswa MAGISTER STUDI ISLAM Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang melakukan penelitian pada BMT anggota Puskopsyah BMT Sejahtera dalam rangka penyusunan Tesis dengan judul: **“Pemahaman Praktisi BMT di Lampung terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.106 Akuntansi Musyarakah”** dan telah menyelesaikan kegiatan dimaksud.

Demikianlah keterangan ini dibuat sesungguhnya. Semoga bermanfaat.

Lampung, 12 Oktober 2009

PUSKOPSYAH BMT SEJAHTERA

Ketua


Ir. Kusnoto, M.TA



Sekretaris


Sunaryo, A.md

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- Nama : Ika Trisnawati Alawiyah, S.EI
- NIM : 07913149
- Tempat / Tanggal lahir : Tanggul Angin, 07 Maret 1986
- Alamat : Sonopakis Lor, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul,
Yogyakarta
- Alamat Asal : Kedaton I, Batanghari Nuban, Lampung Timur,
Lampung
- Pendidikan :
- SDN I Kedaton 1997
- SMPN I Punggur 2000
- SMAN I Terbanggi Besar 2003
- Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Metro
Lampung 2007
- MSI UII Yogyakarta Tahun 2007-2009
- Pengalaman organisasi :
- Pengurus BEM STAIN Jurai Siwo Metro
- Pengurus UKM KRONIKA (Jurnalis) STAIN
Jurai Siwo Metro
- Pengurus PMII Cabang Kota Madya Metro
- Pengurus KOPRI Cabang Kota Madya Metro
- Pengurus Fatayat NU Cabang Lampung Timur

Correlations

		P16	Pemahaman PSAK
P1	Pearson Correlation	.263	.640**
	Sig. (2-tailed)	.160	.000
	N	30	30
P2	Pearson Correlation	.408*	.659**
	Sig. (2-tailed)	.025	.000
	N	30	30
P3	Pearson Correlation	.263	.402*
	Sig. (2-tailed)	.160	.028
	N	30	30
P4	Pearson Correlation	.000	.588**
	Sig. (2-tailed)	1.000	.001
	N	30	30
P5	Pearson Correlation	.327	.551**
	Sig. (2-tailed)	.078	.002
	N	30	30
P6	Pearson Correlation	.263	.380*
	Sig. (2-tailed)	.160	.038
	N	30	30
P7	Pearson Correlation	.463**	.487**
	Sig. (2-tailed)	.010	.006
	N	30	30
P8	Pearson Correlation	.099	.359
	Sig. (2-tailed)	.604	.052
	N	30	30
P9	Pearson Correlation	.059	.398*
	Sig. (2-tailed)	.755	.029
	N	30	30
P10	Pearson Correlation	.263	.489**
	Sig. (2-tailed)	.160	.006
	N	30	30
P11	Pearson Correlation	-.066	.424*
	Sig. (2-tailed)	.730	.020
	N	30	30
P12	Pearson Correlation	.099	.316
	Sig. (2-tailed)	.604	.089

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).